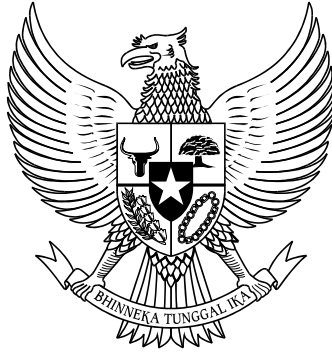


LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2025 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2025

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2025



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui perencanaan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik serta pengelolaan sumber daya secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah diperlukan program dan kegiatan yang kreatif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap arah dan perwujudan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Program Prioritas Daerah adalah Program Prioritas Daerah adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas Daerah.
19. Kinerja adalah capaian hasil kerja yang meliputi keluaran, hasil, dan dampak.
20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

BAB II
RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam Tujuan, Sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, program unggulan dan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan RPJPD; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
 - c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029.

- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD mencakup Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD mencakup perumusan Visi dan Misi, strategi dan arah Kebijakan, Kebijakan umum dan Program, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pembiayaan dan Indikator Kinerja Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam upaya mewujudkan Visi.
- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT:
(5/140/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun guna mewujudkan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan agar dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RPJMD Tahun 2025-2029 memuat Tujuan, Sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat, RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RTRW serta kajian lingkungan hidup strategis.

Selain itu, terdapat kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. RPJMD Tahun 2025-2029 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan RKPD pada setiap tahun anggaran masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 79

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peran strategis Daerah sudah terlihat sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda. Peran tersebut masih tetap bertahan hingga sekarang. Daerah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi dan sosial kawasan. Ke depannya, Daerah sangat berpeluang untuk berkembang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan investasi, konsumsi, dan distribusi bagi wilayah sekitarnya.

Pengembangan Daerah ke depan juga harus dapat berkontribusi dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045. Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud pada prinsipnya sudah sejalan dengan cita-cita Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu Kreatif, Unggul, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas Wali Kota adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selanjutnya, dalam melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, mengamanatkan bahwa Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, harus dipedomani dalam penyusunan RPJMD tanpa mengesampingkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini juga merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa RPJPD, jangka menengah berupa RPJMD serta jangka pendek berupa RKPD.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dikuatkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa RPJMD dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD. Penyusunan RPJMD ini juga harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Dilantiknya pasangan H. Ayep Zaki dan Bobby Maulana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Periode 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 maka Daerah harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara bersamaan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan Pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki beberapa aspek strategis dan politis, antara lain:

1. Media untuk melaksanakan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada saat kampanye sesuai dengan kaidah perencanaan;
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan dioperasionalkan dalam RKPD;
3. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
4. Pedoman penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5. Instrumen untuk mengukur ketercapaian kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen RPJMD lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dijadikan panduan dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat berkontribusi maksimal sesuai dengan kapasitasnya.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang melandasi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

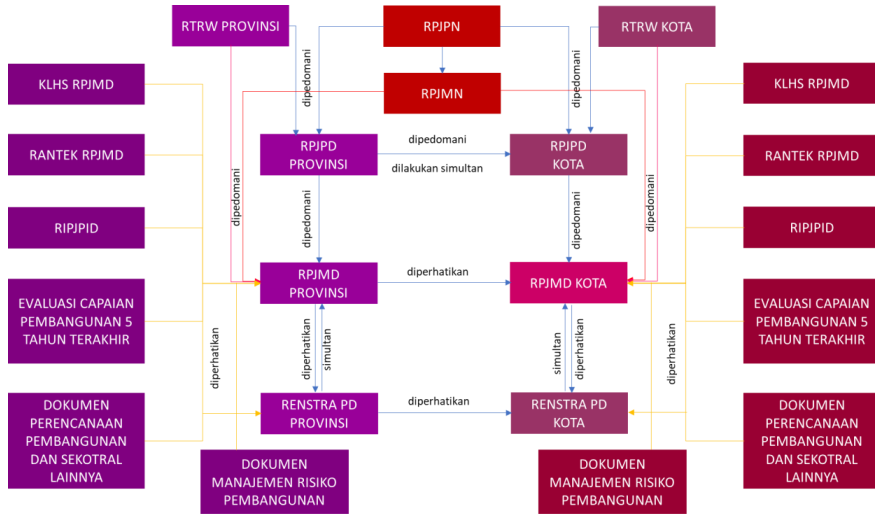
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Dokumen perencanaan lainnya tersebut dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya (provinsi dan nasional) ataupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kota.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Inmendagri No.2 Tahun 2025 (diolah)

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini memedomani RPJPD Tahun 2025-2045 terutama berkaitan dengan arah kebijakan tahap pertama dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045. Dokumen lainnya yang dipedomani yaitu RTRW Tahun 2022-2042. Tujuan memedomani RTRW ini yaitu untuk menyelaraskan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana strategis kota ke dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Dokumen perencanaan jangka menengah yang juga harus dipedomani yaitu RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut perlu diakomodasi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terutama berkaitan dengan isu strategis, kinerja, strategi dan arah kebijakan dari masing-masing dokumen tersebut.

Selain dokumen di atas, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020-2024 sebagai masukan dalam perumusan gambaran umum Daerah.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan panduan perencanaan pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mengoptimalkan potensi dan peluang Daerah sebagai modalitas dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2025-2029;
2. Mengoperasionalkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali sesuai dengan kaidah perencanaan;
3. Menjamin keselarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
4. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
5. Memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2026 hingga Tahun 2030.

1.5 SISTEMATIKA

RPJMD Tahun 2025-2029 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan, dasar hukum yang digunakan, keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian dokumen.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait program perangkat daerah yang merupakan sigma dari program yang terdapat dalam Renstra PD. Selain itu, pada bab ini dijelaskan terkait dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

Bab V Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

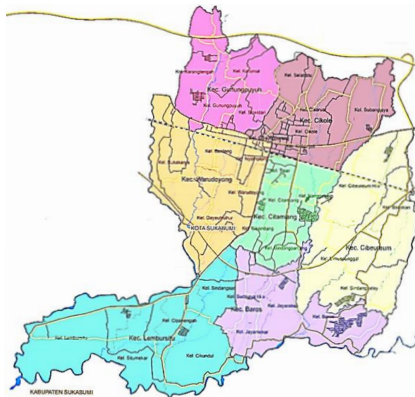
2.1.1.1 GEOGRAFI

A. Posisi dan Peran Strategis

Daerah merupakan sebuah kota terkecil ketiga (setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi) di Provinsi Jawa Barat. Daerah merupakan dataran tinggi terletak pada posisi 106°45'50" Bujur Timur dan 106°45'10" Bujur Timur, 6°50'44" Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 Km dari Jakarta serta 96 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung). Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Sukabumi



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Wilayah administrasi Daerah terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Baros dengan luas 5,58 km², Kecamatan Lembursitu 10.70 km², Kecamatan Cibereum 9,13 km², Kecamatan Citamiang 4,00 km², Kecamatan Warudoyong 7,56 km², Kecamatan Gunungpuyuh 5,13 km², dan Kecamatan Cikole 6,21 km². Adapun jumlah wilayah administrasi di bawah kecamatan terdiri dari 33 kelurahan, 357 rukun warga dan 1.576 rukun tetangga.

Meskipun berada di kaki gunung, letak Daerah cukup strategis karena berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Daerah Khusus Jakarta. Dalam konstelasi sebagai pusat kegiatan wilayah Jawa Barat yang berada di dalam jalur lintasan Jabodetabek dan Bandung Raya, Daerah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi dan sosial kawasan. Karena itu, Daerah sangat berpeluang dalam pengembangan perekonomian daerah dan masyarakat. Di samping itu, Daerah juga dapat berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan investasi, konsumsi, dan distribusi bagi wilayah sekitarnya. Sebagai kota dengan luas wilayah yang relatif kecil, Daerah masih berpotensi untuk dikembangkan lagi secara optimal. Pola penggunaan lahan di Daerah tahun 2018 berdasarkan pada hasil pengamatan lapangan dan interpretasi dari foto citra didominasi oleh kegiatan sawah, bangunan permukiman kota, kebun campuran, dan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan terluas yaitu untuk bangunan permukiman kota seluas 1.736,63 Ha atau 35,93 persen dari luas wilayah. Penggunaan lahan sawah seluas 1.661,03 Ha atau seluas 34,37 persen dari total luas wilayah Sedangkan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran seluas 340,66 Ha atau 7,05 persen dari luas wilayah.

B. Potensi Sumber Daya Alam

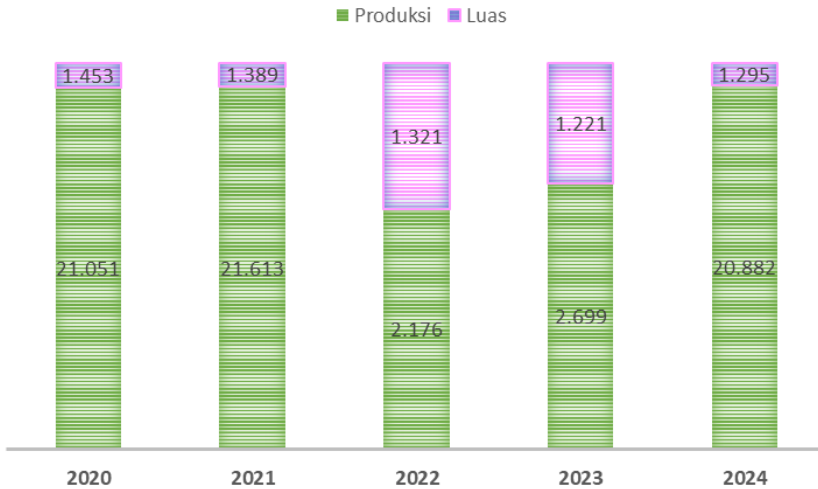
Daerah tidak dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Dengan karakteristik geografis dan kewilayahan yang dimiliki, Daerah hanya memiliki potensi kekayaan alam terutama pada sektor pertanian.

Pertanian ini masih dominan pada sebagian wilayah yang bersifat perdesaan, meskipun Daerah berstatus kota. Luas kawasan pertanian di Daerah sekitar 34,37 persen dari luas total wilayah.

Pertanian yang terdapat di Daerah pun juga terbatas pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman pangan yang ada mayoritas berupa padi. Sedangkan tanaman hortikultura antara lain tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias.

Produksi padi Daerah menunjukkan penurunan yang signifikan di tahun 2022, yaitu berkurang sekitar 2.176 ton. Namun pada tahun 2024, produksi padinya meningkat sebesar 20.882 ton, jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.2
Produksi Padi dan Luas Panen Sawah
di Kota Sukabumi Tahun 2020-2024



Sumber: BPS kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Meskipun mengalami kenaikan produksi, ancaman penurunan luas lahan sawah di Daerah cukup besar sebagai akibat dari pembangunan kota yang makin masif. Kebutuhan ruang untuk aktivitas perdagangan dan jasa serta perumahan dan permukiman tidak dapat dihindari. Kondisi demikian diperburuk dengan keberadaan Jalan Tol Bocimi yang akan memberikan ancaman lebih pada keberadaan lahan sawah. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian perlu dilakukan. Upaya tersebut antara lain dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada secara optimal serta menggalakkan *urban farming*.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kebutuhan air di Daerah cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut dipenuhi dengan mengandalkan sumber dari air hujan dan air permukaan.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Daerah memiliki jumlah curah hujan tahunan sekitar 10.528 mm pada stasiun ciau 4.078 mm, pada stasiun cimandiri 3164 dan pada stasiun situmekar 3.286 mm. Adapun sungai yang melintasi Daerah sebanyak 29 sungai dengan panjang total sungai 113,8 km. Sungai tersebut terdiri dari 1 induk sungai cimandiri dan 5 anak sungai yang terdiri dari sungai cipelang, sungai cipanengah, sungai tonjong, sungai cisuda, dan sungai ceger serta 23 sungai kecil yang bermuara ke-5 anak sungai tersebut. Sungai-sungai tersebut memiliki kapasitas berkisar antara 17 m³/detik sampai 1.981 m³/detik. Sistem aliran sungai terdiri dari orde-1 sampai orde 4 yang semua sungai bermuara ke sungai sungai cimandiri. Berdasarkan hasil perhitungan ambang batas daya dukung lingkungan hidup air di Daerah, ambang batas tinggi sebagian besar tersebar pada bagian tengah dan selatan, sementara ambang batas rendah sebagian besar terdapat di wilayah barat dan timur. Daerah dengan ambang batas rendah rentan terhadap kelangkaan air dimasa mendatang. Daerah yang memiliki status daya dukung penyedia air terlampaui berada pada bagian barat, tengah, serta timur. Secara keseluruhan status daya dukung air di Daerah sebagian besar masih belum terlampaui (3.037,44 Ha).

Tabel 2.1
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sukabumi Tahun 2022

KECAMATAN	STATUS DAYA DUKUNG DAN TAMPUNG AIR (Ha)		TOTAL (Ha)
	BELUM TERLMPAUI	SUDAH TERLAMPALUI	
Baros	306,63	251,58	558
Lembursitu	671,44	398,72	1.070
Cibereum	308,43	604,94	913
Citamiang	332,52	67,87	400
Warudoyong	449,76	306,62	756
Gunung Puyuh	426,31	87,30	513
Cikole	542,34	78,46	621
Kota Sukabumi	3.037,44	1.795,49	4.831

Sumber: RPPLH Kota Sukabumi Tahun 2022-2052

Tabel 2.2
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kota Sukabumi Tahun 2022

KECAMATAN	STATUS DAYA DUKUNG DAN TAMPUNG PANGAN (Ha)		TOTAL (Ha)
	BELUM TERLAMPAUI	SUDAH TERLAMPAUI	
Baros	198,88	351,28	558
Lembursitu	465,71	605,41	1.070
Cibereum	458,84	464,65	913
Citamiang	28,30	374,97	400
Warudoyong	205,13	551,79	756
Gunung Puyuh	76,18	435,93	513
Cikole	44,67	573,19	621
Kota Sukabumi	1.475,72	3.357,22	4.831

Sumber: RPPLH Kota Sukabumi Tahun 2022-2052

Status daya dukung lingkungan hidup pangan dianalisis berdasarkan hasil perhitungan selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk di setiap grid. Nilai selisih ambang batas yang negatif menunjukkan bahwa ambang batas pangan di grid tersebut telah terlampaui, artinya jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di grid tersebut, demikian sebaliknya. Berdasarkan hal itu untuk total status daya dukung pangan belum terlampaui di Daerah sebesar 1.475,72 Ha, dan untuk total status terlampaui di Daerah sebesar 3.357,22 Ha.

D. Berketahanan Energi, Air, dan Pangan

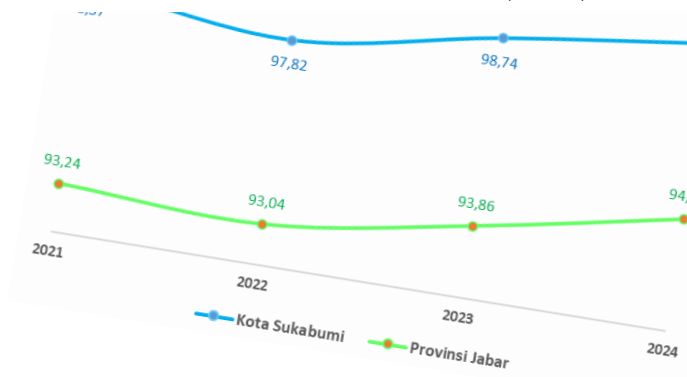
Berketahanan energi, air, dan pangan merupakan kemampuan suatu daerah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan dari tiga kebutuhan dasar energi, air, dan pangan dalam jangka panjang. Dalam kondisi atau situasi krisis atau gangguan eksternal (seperti perubahan iklim, konflik, atau bencana alam) ketiga kebutuhan dasar tersebut tetap harus dipenuhi.

Ketahanan energi yang menunjukkan kemampuan untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau (listrik) di Daerah sudah mencapai angka 99,99 persen di tahun 2024. Jumlah pelanggan listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2020 pelanggan listrik di Daerah sebanyak 169.480 dan meningkat menjadi 191.904 pada tahun 2024. Penggunaan listrik di Daerah pada tahun 2024 dilihat dari listrik terjual adalah sebesar 329.812.719 KWh. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat di Daerah sudah menikmati aliran listrik.

Ketahanan air ditujukan untuk menjamin hak atas air bagi semua dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dengan menyediakan air bersih yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan ekosistem. Kondisi ketahanan air di Daerah ini dapat dilihat berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak.

Gambar 2.3
Persentase RT yang Memiliki Akses Air Minum Layak
di Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

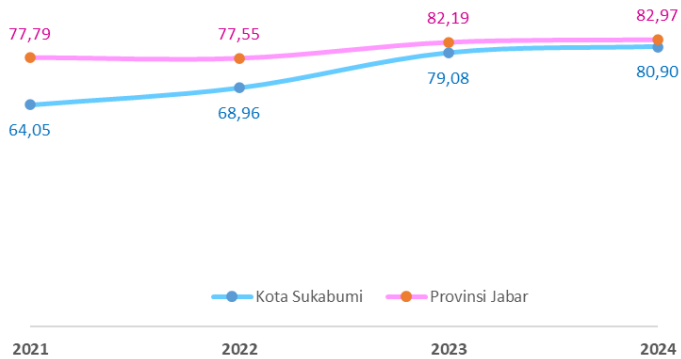
Dari gambar di atas, terlihat bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di Daerah sudah melebihi capaian Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini perlu ditingkatkan agar capaiannya mencapai 100 persen sehingga hak setiap warga akan air minum layak terpenuhi semuanya.

Dari sisi ketahanan pangan, pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Ketahanan pangan ini merupakan rangkaian dalam menyediakan

pangan untuk masyarakat agar menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, produktif, dan berdaya saing.

Indeks ketahanan pangan di Daerah cenderung meningkat dan masuk dalam kategori baik meskipun masih di bawah capaian Provinsi Jawa Barat. Daerah yang berstatus kota, namun ketersediaan pangan sebagian juga dipenuhi dari hasil produksi sendiri. Jika aspek tersebut dimasukkan dalam perhitungan, indeks ketahanan pangan di Daerah diperkirakan akan semakin baik. Jika dibandingkan dengan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, indeks ketahanan pangan di Daerah hanya lebih baik dari Kota Tasikmalaya. Karena itu, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan perlu terus dilakukan terutama pada aspek pemanfaatan yang angkanya masih di bawah angka indeks ketahanan pangan.

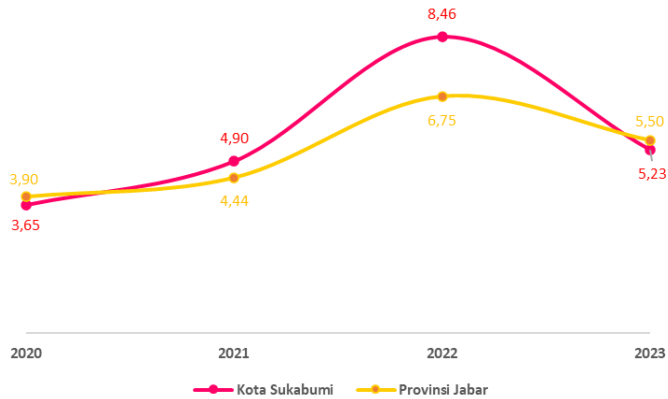
Gambar 2.4
Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (Poin)



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2025 (diolah)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, atau *Prevalence of Undernourishment*, adalah persentase penduduk yang asupan energinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum guna menjalani kehidupan yang sehat dan aktif. Ini adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kerawanan pangan dan gizi.

Gambar 2.5
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kota Sukabumi Tahun 2020-2023 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Daerah kurun waktu tahun 2020-2023 cenderung fluktuatif. Jika tahun 2020-2021 prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan trennya meningkat, namun pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik, menurun menjadi 5,23. Angka ini masuk dalam kategori moderat dan menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Daerah terdapat 5 orang yang mengalami kekurangan gizi. Upaya berkesinambungan perlu dilakukan agar angka prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan dapat ditekan dibawah 5 dan masuk dalam kategori rendah.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup. indeks kualitas lingkungan hidup ini merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Indeks ini mencakup berbagai aspek lingkungan seperti kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. indeks kualitas lingkungan hidup dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung stabil berada di angka 60 poin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan berada pada tingkat yang sedang atau moderat.

Gambar 2.6
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 (Poin)

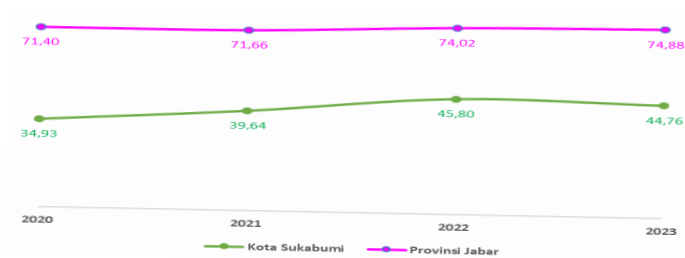


Sumber: DLH, 2025 (diolah)

Tantangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Daerah antara lain terkait dengan perkembangan kota dengan transportasi yang cukup tinggi menyebabkan meningkatnya polusi udara. Kondisi ini diperburuk dengan keberadaan industri yang banyak di pinggiran/sekitar Daerah. Keberadaan berbagai sungai dengan kondisi air yang tercemar akibat kegiatan industri dan limbah rumah tangga semakin memperburuk kualitas air yang ada. Sementara pengelolaan ruang terbuka hijau dan kawasan konservasi masih belum optimal dilakukan.

Mengatasi tantangan lingkungan hidup seperti yang diuraikan di atas perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain mengintensifkan pemantauan lingkungan, meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan, mengoptimalkan pengelolaan persampahan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup.

Gambar 2.7
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2023 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

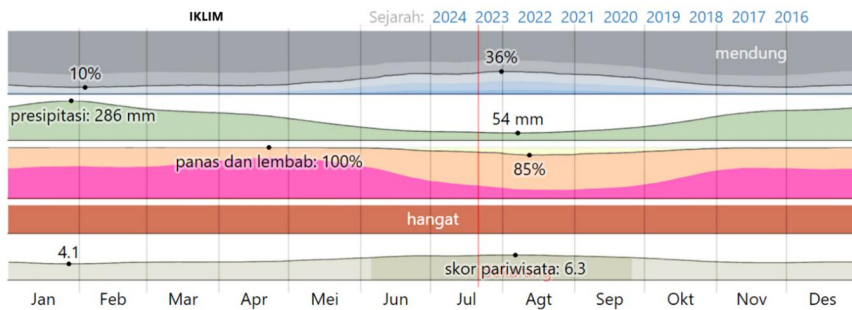
Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (fasilitas buang air besar dengan kloset leher angsa dan tangki septik atau sistem pengolahan tinja yang sesuai standar kesehatan) di Daerah tahun 2023 sebesar 44,76 persen. Artinya, lebih sedikit dari setengah rumah tangga di yang sudah memiliki akses sanitasi layak. Hal ini menandakan tantangan besar dalam akses sanitasi dan potensi risiko kesehatan, seperti penyakit menular dan pencemaran lingkungan. Kondisi ini masuk dalam kategori sangat rendah, bila dibandingkan standar nasional dan provinsi. Diperlukan usaha perbaikan aktif dari Pemerintah Daerah melalui pembangunan infrastruktur dan gerakan budaya, namun diperlukan juga investasi lebih besar dan partisipasi warga agar mencapai target universal.

Kondisi lingkungan hidup yang lain di Daerah dapat dilihat dari timbulan sampah yang dihasilkan. Berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah Tahun 2022-2052, timbulan sampah Daerah mencapai 66.037.829,40 M³/Tahun dan didominasi pada kecamatan cikole sebesar 12.225.773,55 M³/Tahun. Adapun produksi sampah harian sangat tinggi, antara 135–184 ton/hari, Seiring dengan perkembangan kota, timbulan sampah diperkirakan akan semakin besar sementara tempat fasilitas pengolahan sampah yang terbatas. Tempat pembuangan akhir cikundul, yang hanya memiliki luas lahan efektif sekitar 1,2 hektar dari total 10,8 ha, sudah kelebihan beban. Kapasitas ini diperkirakan hanya cukup bertahan 3–4 tahun jika tidak dilakukan perubahan signifikan. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah (organik/anorganik) juga masih rendah, sehingga memperpendek usia tempat pembuangan akhir dan meningkatkan pencemaran. Bank sampah TPS3R belum mendapat dukungan aktif dari warga, skala masih terbatas, sehingga dihadapkan dengan dominasi “residu” yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Secara keseluruhan, persampahan di Daerah menghadapi krisis dalam hal volume, keterbatasan tempat pembuangan akhir, pengolahan, dan kesadaran masyarakat. Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai strategi dari hulu ke hilir, namun perlu pendanaan lebih besar, sumber daya manusia lebih andal, dan kolaborasi aktif warga agar sistem pengelolaan sampah bisa berkelanjutan.

F. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Daerah sangat dipengaruhi oleh iklim tropika khatulistiwa dengan suhu udara rata-rata berkisar 26°C-28°C dan intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas surah hujan di Daerah menggunakan stasiun terdekat yaitu stasiun cimandiri. Hujan maksimum terjadi di bulan desember di stasiun cimandiri sebesar 102 mm dengan jumlah curah hujan 530 mm. Sementara jumlah hari hujan terbanyak adalah 25 hari yang terjadi di bulan maret dan desember.

Gambar 2.8
Iklim Kota Sukabumi



Sumber: <https://id.weatherspark.com> (diakses 16 Maret 2025)

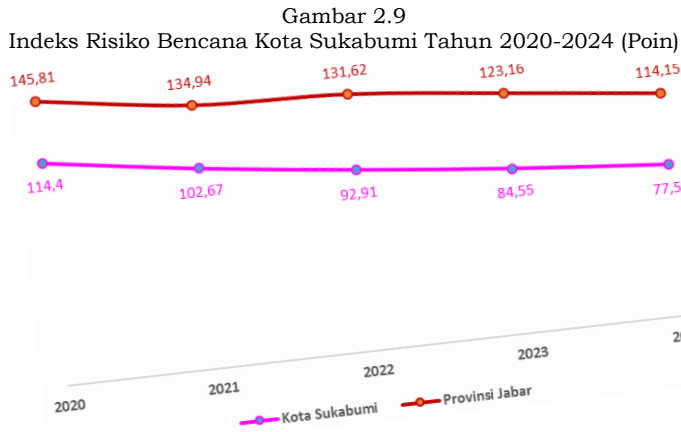
Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Tahun 2025-2029, penilaian kerentanan terhadap perubahan iklim bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman iklim spesifik yang dihadapi masing-masing lokasi dan bagaimana sistem ekologi dan sosial setempat kemungkinan besar meresponsnya untuk memahami perubahan apa dan dimana ancaman yang kemungkinan besar memberikan dampak terbesar. Luasan terbesar pada jasa lingkungan pengaturan iklim di Daerah berada pada kelas jasa rendah dengan luas sebesar 4.155,16 Ha dan paling luas berada di Kecamatan Cibereum dengan luas sebesar 846,68 Ha. Luas jasa lingkungan pengaturan iklim per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kota Sukabumi Tahun 2022

KECAMATAN	JASA LINGKUNGAN PENGATURAN IKLIM (Ha)			TOTAL (Ha)
	RENDAH	SEDANG	TINGGI	
Baros	508,32	42,51	7,39	558
Lembursitu	807,13	235,94	27,08	1.070
Cibereum	846,68	58,62	8,08	913
Citamiang	364,58	33,72	2,09	400
Warudoyong	670,76	68,97	16,65	756
Gunung Puyuh	419,90	87,13	6,57	513
Cikole	537,80	78,73	4,28	621
Kota Sukabumi	4.155,16	605,62	72,14	4.831

Sumber: RPPLH Kota Sukabumi Tahun 2022-2052

Wilayah Daerah berisiko terhadap berbagai ancaman bencana. Nilai indeks risiko bencana Daerah tahun 2020-2024 menunjukkan tren menurun, yaitu dari angka 114,40 di tahun 2020 menjadi 77,56 di tahun 2024. Artinya, Daerah berada pada kelas risiko sedang.



Sumber: BNPB dan RPJMD Jawa Barat 2025-2029, 2025 (diolah)

Risiko bencana di Daerah, antara lain:

1. Gempa bumi

Adanya sesar cimandiri yang membentuk gawir sepanjang 100 Km dari padalarang hingga pelabuhan ratu yang terbagi menjadi tiga segmen menyebabkan Daerah rawan terhadap gempa bumi.

2. Tanah longsor

Potensi bencana longsor yang bersifat lokal tersebar di bagian utara Daerah meliputi Kelurahan Subangjaya, Cisarua Dan Karangtengah. Pada bagian selatan Daerah potensi longsor berada di Kelurahan Lembursitu dan sebagian di Kelurahan Situmekar, Kelurahan Cikundul, Kelurahan Jayamekar, dan Kelurahan Limusnunggal.

3. Gunung api

Ancaman bencana gunung api yaitu berupa aliran lahar dari Gunung Gede dan Pangrango yang mengalir melalui Sungai Cibeureum, Cipelang, dan Cigunung.

4. Banjir

Berdasarkan peta potensi banjir, hampir seluruh wilayah Daerah berada pada ancaman bencana banjir.

5. Cuaca ekstrem

Ancaman cuaca ekstrem tinggi di Daerah berada di 22 kelurahan. Adapun ancaman cuaca ekstrem rendah berada di 6 kelurahan.

6. Kebakaran

Tingkat bahaya kebakaran tinggi di Daerah hanya berada di Kelurahan Nyomplong dan Kelurahan Karang Tengah.

Adanya risiko bencana tersebut, kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana. Kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu diukur dengan indeks kapasitas bencana Daerah.

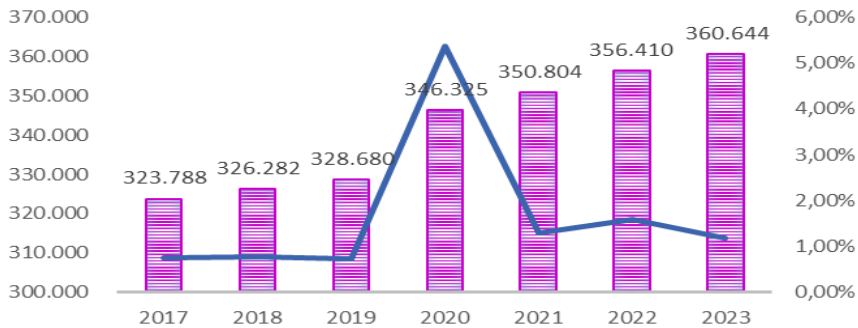
Indeks kapasitas bencana daerah Tahun 2020-2023 menunjukkan tren meningkat yaitu dari 0,51 menjadi 0,57. Artinya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk ke dalam kelas kapasitas sedang.

2.1.1.2 DEMOGRAFI

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Daerah cenderung bertambah setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk terbanyak yaitu di tahun 2020 yang pertambahannya mencapai 17.645 jiwa. Lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga penduduk yang merantau kembali ke Daerah dengan berbagai pertimbangan.

Gambar 2.10
Jumlah Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2017-2024 (Jiwa)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Laju pertumbuhan penduduk Daerah tahun 2020-2024 sebesar 1,46 persen. Kecamatan Cibereum, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Lembursitu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, dimana tiga kecamatan tersebut masih memiliki banyak area yang bisa dikembangkan sebagai wilayah pemukiman.

Tabel 2.4
Jumlah (Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)
Per Kecamatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (RIBU)					LPP TAHUN 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Baros	37,734	38,576	39,548	40,38	41,32	2,45
Lembursitu	41,432	42,196	43,098	43,84	44,69	2,04
Cibereum	44,961	46,025	47,247	48,31	49,50	2,60
Citamiang	53,049	53,517	54,154	54,57	55,11	1,02
Warudoyong	58,972	59,511	60,236	60,72	61,34	1,06
Gunung Puyuh	48,292	48,685	49,230	49,58	50,03	0,95
Cikole	61,885	62,294	62,897	63,24	63,73	0,79
Kota Sukabumi	346,325	350,804	356,410	360,64	365,74	1,46

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

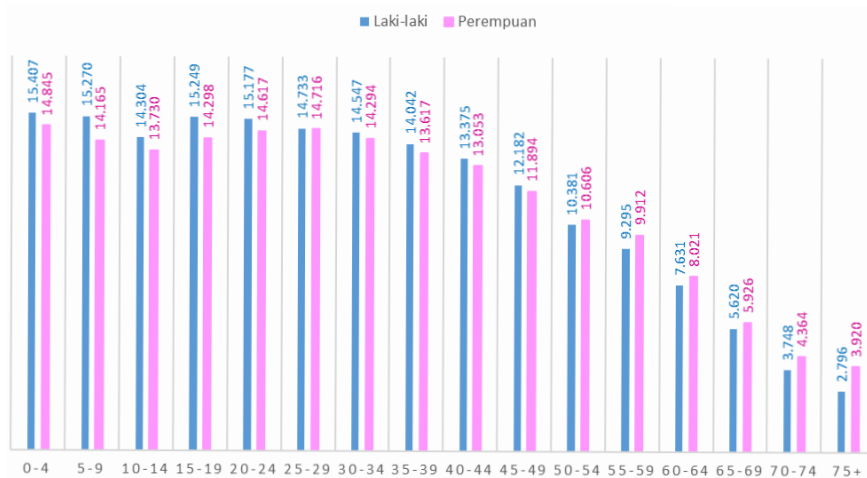
Tingkat kepadatan penduduk Daerah tahun 2024 sebesar 7.570 jiwa/km². Jika dirinci menurut kecamatan, Citamiang adalah kecamatan terpadat dan Lembursitu menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah. Di sisi lain rasio jenis kelamin penduduk tahun 2024 berada di kisaran angka 101 yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

B. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan piramida penduduk di Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 183.757 jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 181.978 jiwa.

Dari komposisi penduduk Daerah tahun 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja di Daerah adalah sebesar 62,58 persen, yang artinya 62,58 persen dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) aktif secara ekonomi. Jumlah penduduk bekerja tahun 2024 tercatat sebanyak 159.828 jiwa, yang mana 47,10 persen di antaranya bekerja sebagai buruh/ karyawan/pegawai.

Gambar 2.11
Komposisi Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2024 (Jiwa)

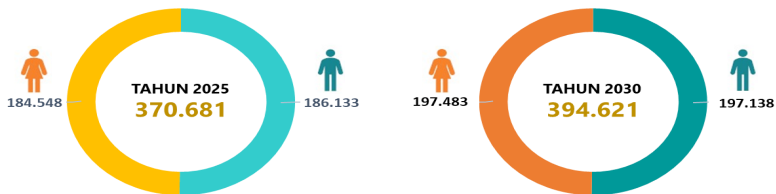


Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

C. Proyeksi Penduduk

Sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah dengan berbagai fasilitas pendukungnya, Daerah dapat menjadi salah satu destinasi untuk dikunjungi atau ditinggali. Daerah yang terbatas dan jumlah penduduk yang terus bertambah membawa konsekuensi serius terhadap perkembangan kota. Konsekuensi tersebut misalnya terkait dengan pemenuhan layanan dasar perkotaan, meningkatnya kemacetan, degradasi lingkungan, dan lainnya.

Gambar 2.12
Jumlah Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 (Jiwa)



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah)

Pada tahun 2025-2030, jumlah penduduk Kota Sukabumi diperkirakan akan bertambah sebesar 23.940 jiwa atau sekitar 6,46 persen. Pertambahan penduduk tersebut akan menyebabkan kepadatan penduduk bertambah menjadi 8.165 jiwa/km² di tahun 2030 dari sebelumnya 7.670 jiwa/km² di tahun 2025. Komposisi penduduk Kota Sukabumi tahun 2030 akan didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yaitu sekitar 254.691 jiwa (64,54 persen). Penduduk usia lanjut (65+ tahun) akan bertambah sekitar 8.497 jiwa, lebih banyak dari penduduk usia muda (0-14 tahun) yang hanya bertambah sekitar 2.460 jiwa. Kondisi ini mengikuti tren global di mana penduduk usia lanjut cenderung bertambah lebih banyak daripada penduduk usia muda.

Pada tahun 2025-2030, jumlah penduduk di Daerah diperkirakan akan bertambah sebesar 23.940 jiwa atau sekitar 6,46 persen. Pertambahan penduduk tersebut akan menyebabkan kepadatan penduduk bertambah menjadi 8.165 jiwa/km² di tahun 2030 dari sebelumnya 7.670 jiwa/km² di tahun 2025.

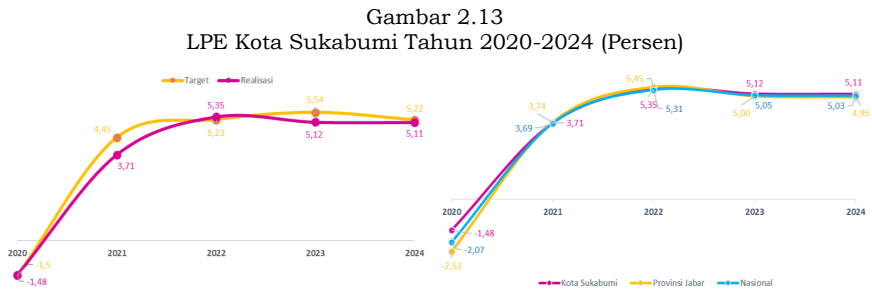
Komposisi penduduk di Daerah tahun 2030 akan didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yaitu sekitar 254.691 jiwa (64,54 persen). Penduduk usia lanjut (65+ tahun) akan bertambah sekitar 8.497 jiwa, lebih banyak dari penduduk usia muda (0-14 tahun) yang hanya bertambah sekitar 2.460 jiwa. Kondisi ini mengikuti tren global di mana penduduk usia lanjut cenderung bertambah lebih banyak daripada penduduk usia muda.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

A. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Daerah tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,48 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,49 persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi di tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi kembali naik di angka 3,71 persen dan meningkat kembali menjadi 5,35 persen di tahun 2022. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjadinya keberlanjutan pemulihan ekonomi.



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Di tahun 2024, perekonomian di Daerah tetap tumbuh positif dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen. Meskipun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,12 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Daerah masih berada dalam tren pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan dominan tampak berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2021, lapangan usaha M, N (Jasa Perusahaan) mencatat pertumbuhan tertinggi. Sementara pada tahun 2022, sektor R, S, T, U (Jasa Lainnya) menjadi yang tertinggi dibanding sektor lain. Untuk tahun 2023, sektor H (Transportasi) mengalami pertumbuhan paling signifikan.

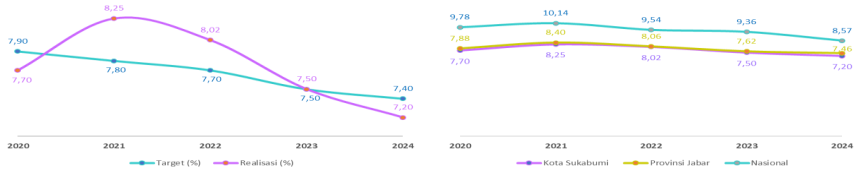
Meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, keterbatasan sumber daya alam, serta jumlah lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan, Daerah tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Daerah yang lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan nasional pada tahun 2023 dan 2024.

Tahun 2021 menjadi tahun resiliensi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah telah menjalankan berbagai kebijakan dan program untuk memulihkan ekonomi, seperti strategi pengeluaran pemerintah (*government spending strategy*), serta upaya meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang mendorong investasi dan kapasitas fiskal. Stabilitas pertumbuhan ekonomi hingga 2024 mencerminkan keberlanjutan upaya pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

B. Pengentasan Kemiskinan

Penduduk miskin di Daerah tahun 2024 sekitar 24,10 ribu jiwa atau 7,20 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Kinerja Pemerintah Daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan cukup baik terutama di tahun 2024 karena realisasinya melebihi target yang ditetapkan.

Gambar 2.14
Tingkat Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

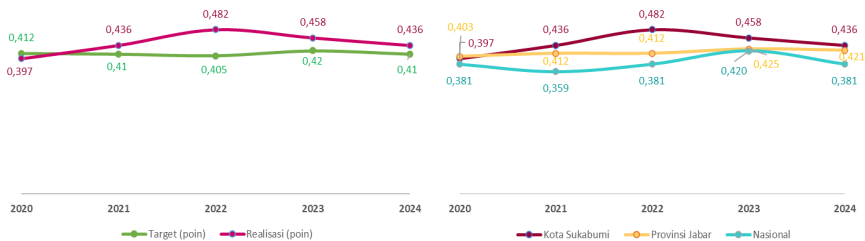
Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2024 lebih baik jika dibandingkan tahun 2023. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-19. Penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2024 masih lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Kemiskinan di Kota Sukabumi perlu untuk terus dikurangi dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendidikan, kesehatan, dan layanan air bersih serta sanitasi. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan juga perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, perlunya peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Jika hal-hal itu dilaksanakan secara tepat sasaran, penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi tentunya dapat mencapai hasil yang optimal.

A. Pengurangan Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang terbaik mengingat target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,412 tetapi Kota Sukabumi berhasil mencapai poin 0,397.

Gambar 2.15
Indeks Gini Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

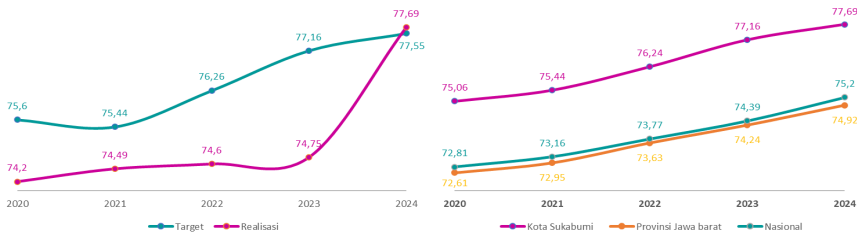
Meskipun LPE Kota Sukabumi tahun 2024 mencapai 5,11 persen, namun Indeks Gini berkurang secara signifikan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kota Sukabumi tahun 2024 masih dalam ketimpangan moderat (0,30 – 0,50), hal ini harus menjadi perhatian. Ketimpangan yang tinggi menyimpan potensi terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh.

Indeks Gini Kota Sukabumi dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Sukabumi masih di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Sukabumi masih menghadapi permasalahan seperti konsentrasi kekayaan yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi bagi masyarakat miskin masih terbatas, dan masyarakat masih mengalami kesenjangan dalam menghadapi situasi yang tak terduga seperti adanya Covid-19.

B. Peningkatan Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Di mana untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam satu periode.

Gambar 2.16
IPM Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

IPM Kota Sukabumi di tahun 2024 masuk dalam kategori tinggi (interval 70-79 poin). Naik cukup signifikan sekitar 0,53 poin dari 77,16 di tahun 2023 menjadi 77,69 di tahun 2024. Kenaikan IPM terjadi pada semua komponen yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Tabel 2.5
Komponen IPM Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	Tahun	74,23	74,38	74,64	74,89	75,11
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,47	13,58	13,59	13,60	13,62
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,59	9,81	10,14	10,37	10,38
Rata-rata Pengeluaran per Kapita sebulan	Ribu Rupiah	10.999	10.942	11.229	11.999	12.252
IPM	Indeks	75,06	75,44	76,24	77,16	77,69

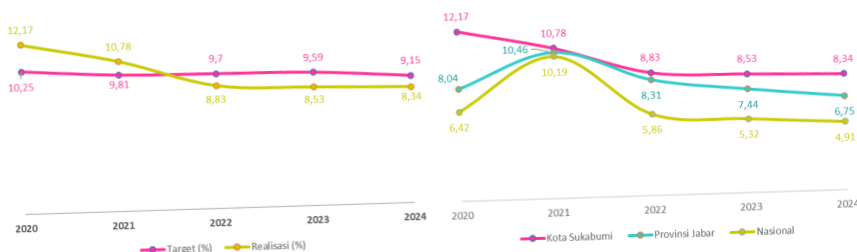
Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025

Jika dilihat perkembangan dari tahun 2020-2024, IPM Kota Sukabumi masih lebih baik jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Di antara kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi tahun 2024 berada di peringkat 7. Namun jika dilihat hanya kategori kota, dari 9 kota di Provinsi Jawa Barat, peringkat IPM Kota Sukabumi hanya lebih baik dari IPM Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. IPM Kota Sukabumi masih bisa lebih baik lagi asalkan 4 komponen pembentuk IPM diintervensi dengan tepat dan dilaksanakan oleh lintas urusan.

C. Pengurangan Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dari 8,53 persen (14.619 jiwa) di tahun 2023 menjadi 8,34 persen (14.547 jiwa) di tahun 2024. Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT ini tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang mencapai 28,02 persen di tahun 2024.

Gambar 2.17
TPT Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

TPT Kota Sukabumi mengalami penurunan di tahun 2024, namun masih berada di atas angka TPT Provinsi dan Nasional. Hal ini mengindikasikan masih ada permasalahan seperti jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja dan belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja.

2.1.2.2 PERLINDUNGAN SOSIAL

Kondisi perlindungan sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Perlindungan sosial salah satunya tercermin dari jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah mencapai 100 persen dengan kepesertaan aktif mencapai 76,9 persen di tahun 2024. Fokus selanjutnya adalah menjaga keaktifan peserta, memperbaiki sistem pendataan, dan meningkatkan pelayanan agar UHC tetap bermakna dalam kehidupan masyarakat.

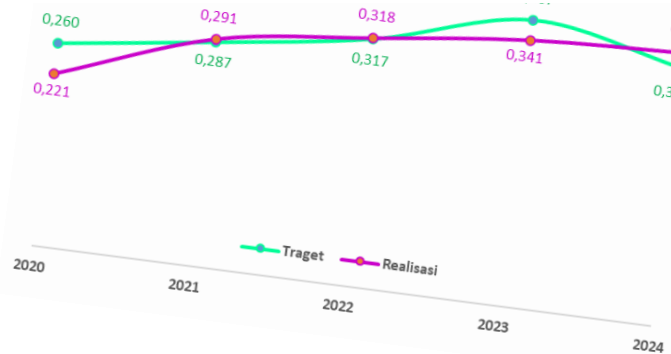
Sementara, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Desember 2023 sebanyak 52.402 dari 99.038 jiwa angkatan kerja. Capaian ini lebih besar 3.94 persen daripada tahun 2022. Sehingga, persentase *coverage* kepesertaannya sama dengan 52,91 persen di tahun 2023. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi bersama BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan program pengembangan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong peran aktif berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2.1.2.3 KESEHATAN UNTUK SEMUA

A. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu fokus capaian pembangunan nasional di bidang kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Keluarga sehat adalah fondasi masa depan bangsa yang gemilang. Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) telah menetapkan 12 IKS. Dengan menerapkan 12 indikator keluarga sehat menurut Kemenkes, maka diharapkan banyak dari keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal.

Gambar 2.18
Indeks Keluarga Sehat Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



Sumber: Dinkes Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

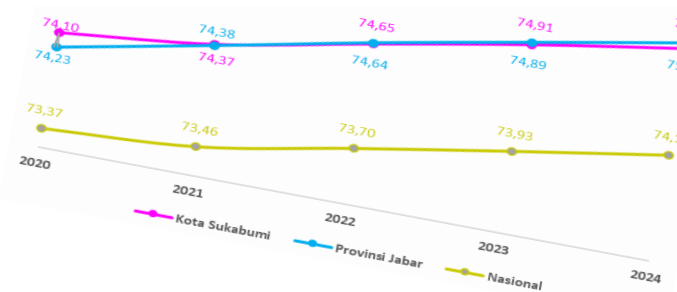
Secara umum status kesehatan keluarga di Kota Sukabumi cenderung mengalami perbaikan. Hal ini juga tercermin dengan jumlah keluarga tidak sehat dan pra sehat yang berkurang. Selain itu, meningkatnya pelayanan puskesmas juga menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan IKS. Untuk lebih meningkatkan IKS perlu dilakukan penguatan, pendampingan dan pemantauan terhadap puskesmas yang belum mencapai target, penguatan kerja sama tim lintas program, dan optimalisasi keterlibatan berbagai pihak seperti institusi pendidikan, organisasi profesi ataupun pihak swasta.

B. Peningkatan Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH di Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat dan mencapai angka 75,11 di tahun 2024.

Semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat Kota Sukabumi yang ditunjukkan dengan UHH merupakan salah satu indikator yang menentukan IPM. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas kesehatan penduduk utamanya pada kalangan bayi, balita, wanita berusia subur, dan lansia.

Gambar 2.19
UHH Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Meskipun capaian UHH Kota Sukabumi cenderung meningkat setiap tahun, namun masih di bawah UHH Provinsi Jawa Barat. Karena itu, upaya untuk lebih meningkatkan UHH Kota Sukabumi perlu terus dilakukan. Upaya tersebut seperti dengan meningkatkan kemudahan mengakses sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya angka warga yang sakit.

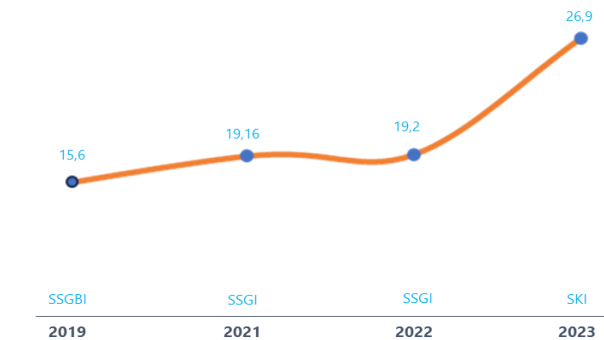
C. Penanganan Stunting

Untuk menciptakan generasi unggul, permasalahan kesehatan salah satunya stunting, harus ditangani dengan serius. Stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Angka persentase stunting yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam pemenuhan gizi pada anak-anak. Stunting pada dasarnya terjadi diakibatkan berbagai macam faktor tidak hanya persoalan gizi semata. Faktor lainnya disebabkan oleh usia dini pernikahan, lingkungan yang tidak sehat hingga pola asuh terhadap anak.

Stunting di Kota Sukabumi yang cenderung meningkat memerlukan kesadaran kolektif, saling kolaborasi dari semua pihak, penyusunan strategi yang tepat komprehensif, dan bergerak dengan cepat turun ke wilayah berisiko. Beberapa hal yang menjadi tantangan penanganan stunting seperti balita (bayi di bawah usia lima tahun) dan baduta (bayi di bawah usia dua tahun) tumbuh di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh dengan ventilasi dan cahaya matahari buruk, serta pola makan yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi berimbang.

Gambar 2.20
Prevalensi Stunting Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Persen)



Sumber: Kemenkes, 2024 (diolah)

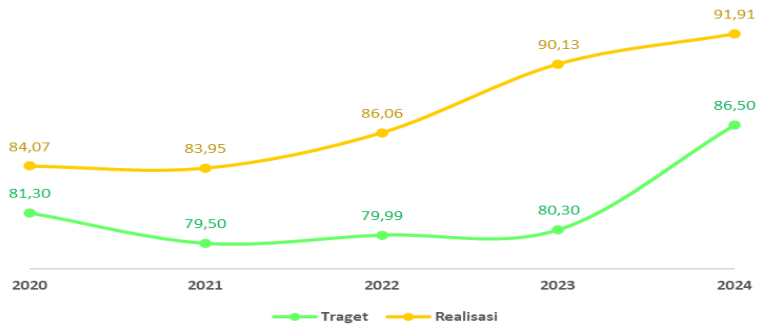
Untuk itu, upaya percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi cakupan intervensi berbasis bukti perlu terus dilakukan. Salah satunya dengan memastikan warga mendapatkan asupan gizi terbaik dan dalam pendataan terdeteksi tidak ada masalah. Selain itu, upaya kolaborasi dengan intervensi kasus secara tepat akan mempercepat penurunan stunting di Kota Sukabumi.

D. Peningkatan Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif maka diperlukan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam, bergizi, seimbang, aman dan halal (B2SAH) dalam jumlah dan komposisi yang cukup. Semakin mendekati skor ideal (maksimum 100), semakin baik kualitas pola konsumsi pangan masyarakat.

Skor PPH Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2024, Skor PPH-nya mencapai 91,91 poin yang artinya bahwa kualitas pola konsumsi pangan masyarakat berada pada kategori sangat baik (ideal).

Gambar 2.21
Skor Pola Pangan Harapan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Upaya untuk menjaga dan meningkatkan Skor PPH Kota Sukabumi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menyusun analisis PPH Konsumsi, pelatihan pengolahan pangan lokal, distribusi bibit/benih tanaman hortikultura yang mendukung peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, pelatihan teknologi *urban farming* yang mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah.

Sosialisasi gerakan konsumsi pangan B2SAH, pembinaan/fasilitasi dalam rangka pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan, subsidi harga pada acara Gelar Pangan Murah Kota Sukabumi, subsidi harga dan dipasarkan melalui PMT (Pasar Mitra Tani), rapat koordinasi distribusi pangan, vaksinasi pada Hewan Penular Rabies (HPR) dan AI untuk mencegah penularan zoonosis, dan fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan.

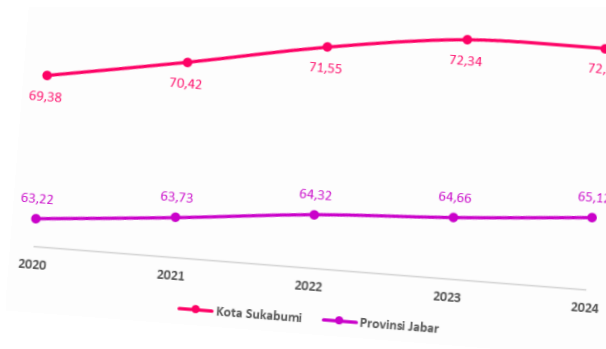
2.1.2.4 PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN MERATA

A. Perluasan Akses Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen yang menyusun IPM. Indeks Pendidikan terdiri dari komponen Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Jika dibandingkan dengan Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran, Indeks Pendidikan Kota Sukabumi termasuk terendah. Di mana kedua indeks lainnya berada di atas angka 80.00 poin.

Jika dilihat trennya, Indeks Pendidikan Kota Sukabumi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan ini berkorelasi dengan variabel pembentuknya yaitu RLS dan HLS. RLS Kota Sukabumi pada tahun 2024 adalah 10,38. Artinya rata-rata masyarakat Kota Sukabumi pendidikan terakhirnya adalah setara dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

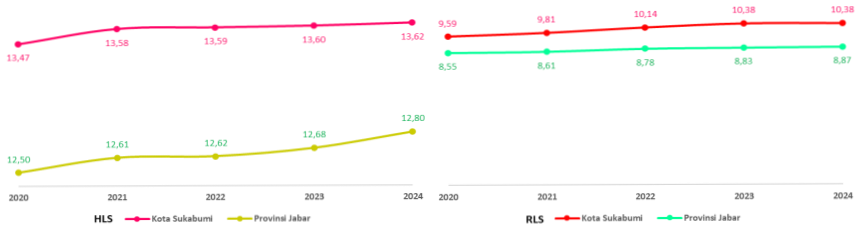
Gambar 2.22
Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Sementara itu, HLS Kota Sukabumi pada tahun 2024 mencapai 13,62 tahun, meningkat 0,02 poin dari angka HLS tahun 2023. Angka HLS sebesar 13,62 tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Kota Sukabumi sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kinerja urusan pendidikan sudah makin membaik.

Gambar 2.23
RLS dan HLS Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Untuk lebih meningkatkan Indeks Pendidikan di Kota Sukabumi tentunya harus ditingkatkan juga RLS dan HLS. Peningkatan akses dan mutu pendidikan menjadi kunci yang sangat penting untuk meningkatkan angka Indeks Pendidikan. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar formal maupun nonformal/kesetaraan, bantuan bagi siswa yang kurang mampu, dan pemberdayaan satuan pendidikan nonformal berbasis masyarakat. Jika hal tersebut dilakukan dengan tepat maka Indeks Pendidikan Kota Sukabumi akan tetap berada di atas Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

B. Peningkatan Mutu Pendidikan

Literasi/numerasi adalah komponen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Literasi merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksi dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya sehingga mampu beradaptasi sebagai masyarakat.

Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional menunjukkan peningkatan dan masuk dalam kategori BAIK. Itu artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

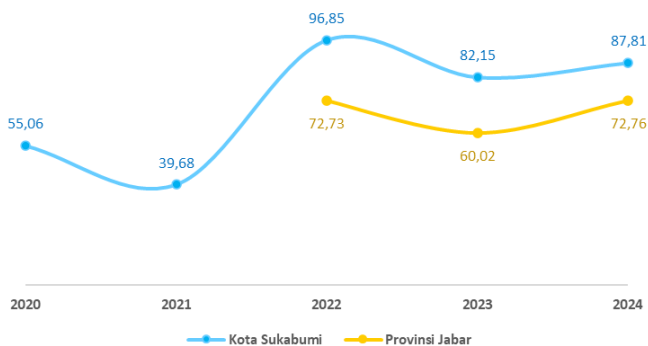
Tabel 2.6
Rata-rata Kemampuan Literasi/Numerasi Siswa
Kota Sukabumi Tahun 2021-2023 (Poin)

URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
Sekolah Dasar	48.55	34,88	53.67	38.27	56.6	41.54	64,86	55,25
Sekolah Menengah Pertama	59.24	53.20	68.64	55.98	69.92	57.83	77,59	66,66

Sumber: Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, 2024

Numerasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi seperti pada tabel di atas, rata-rata kemampuan numerasi siswa Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen Nasional menunjukkan tren meningkat dan masuk dalam kategori SEDANG. Itu artinya 40-70 persen peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi.

Gambar 2.24
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



Sumber: Perpusnas, 2025 (diolah)

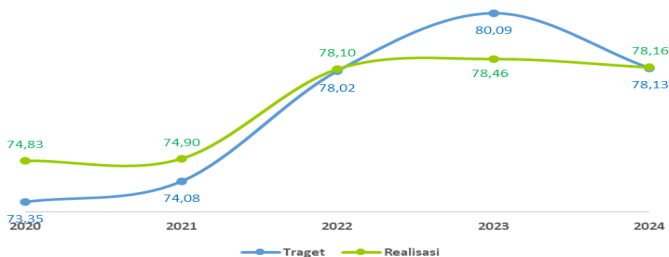
Seiring meningkatnya literasi/numerasi peserta didik, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Sukabumi juga menunjukkan hasil yang makin membaik meskipun di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Permasalahan pembangunan literasi di Kota Sukabumi yang perlu terus menjadi perhatian yaitu terkait dengan peningkatan budaya literasi masyarakat di tengah gempuran media sosial, sarana perpustakaan yang belum ideal, dan terbatasnya pustakawan.

2.1.2.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

A. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Agama merupakan landasan penting bagi masyarakat terkait dengan etika dan moral. Idealnya semakin etika dan moral masyarakat membaik kerukunan umat beragama juga turut membaik. Dengan demikian, kerukunan umat beragama dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diukur dengan Indeks KUB telah menjadi salah satu indikator capaian pembangunan di Kota Sukabumi dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 2.25
Indeks Kerukunan Umat Beragama
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Sukabumi cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketenteraman serta mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama.

B. Pengembangan Kebudayaan

Pengembangan kebudayaan di Kota Sukabumi yang ditunjukkan dengan indikator terlestarikannya cagar budaya masih memerlukan peningkatan untuk ke depannya. Meskipun capaiannya menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 73,33 persen menjadi 100 persen di tahun 2024. Hal ini penting sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang mewarnai perkembangan Kota Sukabumi hingga seperti sekarang ini. Selain itu, pelestarian ini juga untuk menunjang perkembangan wisata budaya.

Saat ini, terdapat 21 objek diduga cagar budaya di Kota Sukabumi yang sedang dikaji, dan tiga di antaranya (Balai Kota, Rumah Pengasingan Bung Hatta, dan Gereja Sidang Kristus) dalam proses penetapan. Proses ini menunjukkan adanya keseriusan dalam meningkatkan nilai warisan budaya, yang merupakan bagian penting dari indeks warisan budaya.

Untuk mengembangkan kebudayaan secara komprehensif, perlu bertindak pada lima level Utama, yaitu penguatan kebijakan dan hukum, peningkatan pendidikan dan regenerasi, peningkatan pelestarian dan digitalisasi, peningkatan ekspresi dan event budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif dan teknologi. Dengan dukungan lintas sektor (pemerintah, komunitas, sekolah, pelaku budaya, dan swasta), budaya lokal tidak hanya lestari tapi juga menjadi pilar ekonomi dan jati diri Kota Sukabumi

2.1.2.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

A. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak.

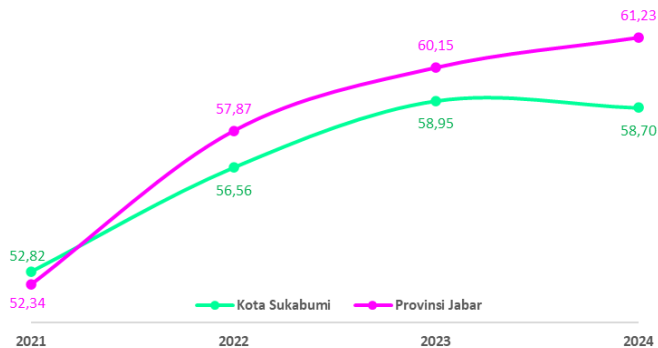
Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, IPA di Kota Sukabumi tahun 2022 yaitu 65,70. Angka ini termasuk terendah jika dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Jika ditelusuri per kluster, dari 5 kluster yang ada terdapat 2 kluster nilainya yang masih rendah yaitu kluster hak sipil dan kebebasan (48,00) dan kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (41,13).

Untuk meningkatkan upaya perlindungan anak di Kota Sukabumi diperlukan pelaksanaan strategi yang dibarengi pelaksanaan program/kegiatan yang lebih disesuaikan dengan karakteristik wilayah (level kecamatan). Kebutuhan akan pemenuhan dan perlindungan anak antara satu wilayah dengan wilayah lain tentunya akan berbeda. Karena itu, intervensi yang berbeda-beda sesuai karakteristik wilayah diharapkan lebih tepat sasaran dalam memenuhi dan melindungi anak.

B. Peningkatan Kualitas Keluarga

Pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dapat tercermin dari iBangga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan.

Gambar 2.26
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (Poin)



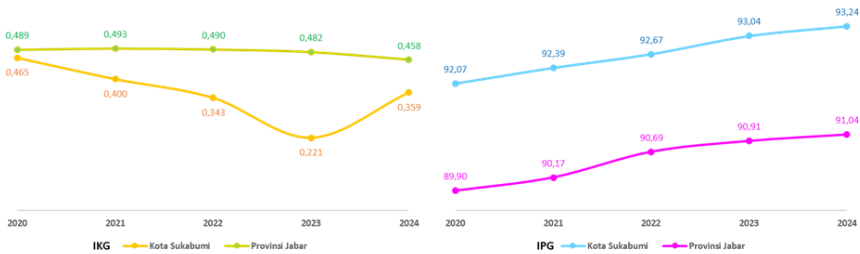
Sumber: BKKBN, 2025 (diolah)

iBangga Kota Sukabumi tahun 2024 sebesar 58,70, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 58,95. Dengan angka tersebut, Kota Sukabumi masuk dalam kategori “berkembang”. Perlu dilakukan upaya intervensi terhadap tiga dimensi pembentuknya agar capaiannya dapat meningkat menjadi “tangguh”.

C. Peningkatan Kesetaraan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.

Gambar 2.27
IKG dan IPG Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Tren IPG di Kota Sukabumi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPG Kota Sukabumi tahun 2024 sebesar 92,24 poin. Ini berarti bahwa pembangunan antara perempuan dengan laki-laki di Kota Sukabumi semakin mendekati setara (setara jika nilai IPG 100). Perkembangan IPG Kota Sukabumi dari tahun ke tahun juga masih lebih baik dari capaian IPG Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

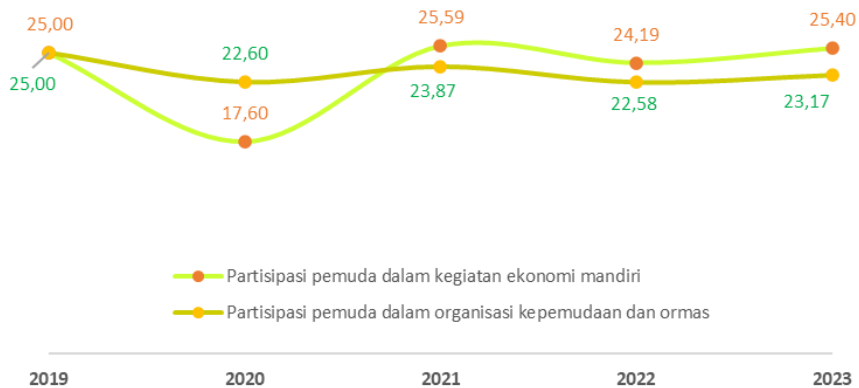
IKG Kota Sukabumi tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik yaitu 0,221 yang artinya masuk dalam kategori rendah. Namun pada tahun 2024, IKG Kota Sukabumi menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.

Mencermati kondisi di atas, upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pengarusutamaan gender di Kota Sukabumi supaya lebih baik salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan peran posyandu atau kader posyandu menyusuri rumah warga, *Homecare* atau perawat yang di tempatkan di 33 kelurahan untuk mendatangi rumah warga yang alami gangguan kesehatan, dan lainnya.

D. Pengembangan Kepemudaan

Peran pemuda sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa dan pemuda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif dan juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Pemuda itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Gambar 2.28
Tingkat Partisipasi Pemuda Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Persen)



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Tingkat partisipasi pemuda Kota Sukabumi dalam pembangunan menunjukkan angka di atas 20 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tingkat partisipasi tersebut mencakup dalam kegiatan ekonomi mandiri serta organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Mengingat jumlah pemuda di Kota Sukabumi saat ini jumlahnya paling besar maka upaya optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan perlu menjadi perhatian. Upaya tersebut meliputi peningkatan partisipasi pemuda dan peningkatan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

A. Pengurangan Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.7
Rasio Ketergantungan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

JUMLAH PENDUDUK	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
0-14	86.687	86.882	87.056	87.402	87.721
15-64	237.199	241.313	245.156	248.291	251.460
>65	20.942	22.609	24.198	24.951	26.374
Rasio Ketergantungan (%)	45,37	45,37	45,38	45,25	45,34

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

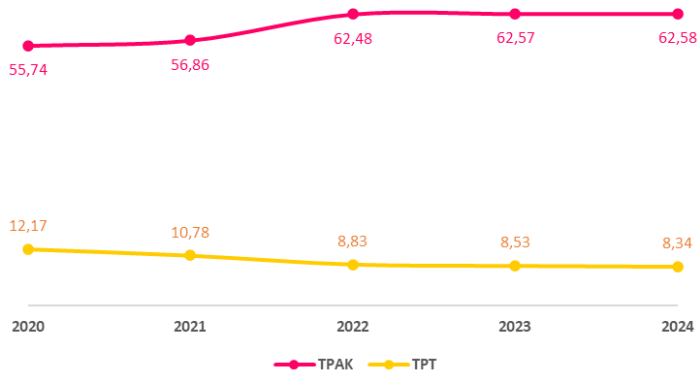
Rasio Ketergantungan Kota Sukabumi pada tahun 2024 sebesar 45,34 persen, di mana setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung sebanyak 45 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hal itu menandakan bahwa Kota Sukabumi sedang memasuki periode terbaik bonus demografi. Melimpahnya penduduk usia produktif tentu harus dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan peluang bagi Kota Sukabumi untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing.

B. Peningkatan Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu daerah yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja dan menjadi faktor penting dalam menggerakkan pembangunan. TPAK di Kota Sukabumi cenderung meningkat seiring pemulihan ekonomi pasca Covid-19. TPAK ini berkorelasi dengan TPT, di mana ketika TPAK mengalami peningkatan TPT cenderung menurun.

Jika dicermati lebih dalam, gap antara TPAK laki-laki dengan perempuan di Kota Sukabumi cukup lebar. Tren TPAK laki-laki dalam kurun 5 tahun terakhir selalu di atas 70 persen, sementara TPAK perempuan hanya di bawah 45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas perekonomian masih kurang.

Gambar 2.29
TPAK dan TPT Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

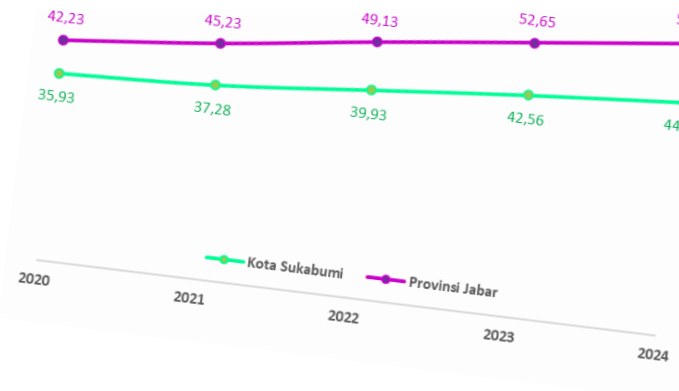
Sementara itu, jumlah penduduk Kota Sukabumi yang bekerja pada lapangan usaha utama cenderung mengalami peningkatan. Dari tiga lapangan usaha utama, penduduk Kota Sukabumi banyak bekerja di sektor jasa yaitu mencapai 70,76 persen pada tahun 2024. Hal ini menegaskan bahwa lapangan usaha dominan yang ada di Kota Sukabumi berada pada sektor perdagangan dan jasa.

C. Produktivitas Per Kapita

PDRB Per Kapita selain menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah juga menggambarkan produktivitas masyarakatnya. Semakin tinggi produktivitas masyarakat yang ditunjukkan dengan PDRB Per Kapita mencerminkan juga daya saing wilayah tersebut dengan wilayah lainnya.

PDRB Per Kapita Kota Sukabumi ADHB menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2020. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya Covid-19 yang melanda yang menyebabkan LPE Kota Sukabumi berkontraksi hingga -1,48 persen. Seiring membaiknya kondisi ekonomi, PDRB Per Kapita juga semakin meningkat.

Gambar 2.30
PDRB Per Kapita ADHB Kota Sukabumi
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

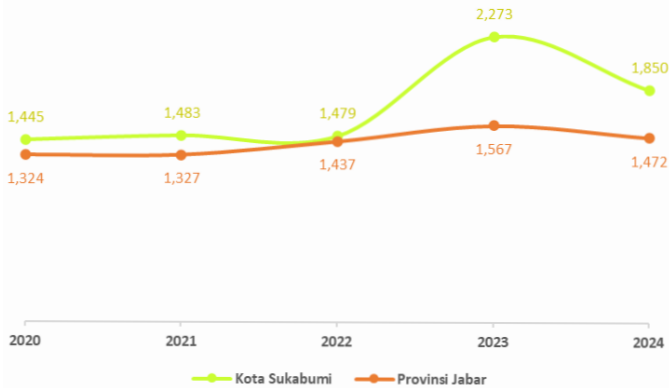
Untuk meningkatkan secara signifikan PDRB Per Kapita, upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti: meningkatkan nilai output produksi barang dan jasa; meningkatkan efisiensi dan produktivitas barang dan jasa; meningkatkan investasi SDM agar kualitas tenaga kerja semakin meningkat; pengembangan infrastruktur untuk menunjang efisiensi produksi; dan mendorong investasi daerah.

D. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sukabumi mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian, pengeluaran per kapita masyarakat mengalami kenaikan di tahun 2021 dan sedikit menurun kembali di tahun 2022. Namun angka tersebut meningkat sebesar 53,61 persen menjadi Rp 2.273.334,- di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Konsumsi masyarakat secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengeluaran konsumsi untuk kelompok makanan dan non makanan. Pada tahun 2023, masyarakat Kota Sukabumi mengalokasikan anggarannya sebanyak 38,86 persen untuk konsumsi makanan dan sebanyak 61,14 persen untuk pengeluaran konsumsi non makanan. Namun pada tahun 2024, menunjukkan hal yang berbeda dimana konsumsi untuk nonmakanan menurun signifikan tetapi konsumsi makan meningkat.

Gambar 2.31
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
di Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Adapun lima jenis komoditas makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Sukabumi adalah makanan dan minuman jadi, rokok, padi-padian, daging, dan telur dan susu. Sementara kelompok non makanan yang paling banyak dikonsumsi adalah subkelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga serta subkelompok aneka barang dan jasa.

2.1.3.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

A. Penerapan Inovasi

Inovasi merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah untuk menghadapi persaingan baik di tingkat regional, nasional, bahkan global. Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin.

Tabel 2.8
Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Target (persen/predikat)	550	Terinovatif (≥ 1001)	Terinovatif (≥ 1001)	Terinovatif (≥ 1001)	Terinovatif (≥ 1001)
Capaian (persen/predikat)	4675	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Dalam hal inovasi, Kota Sukabumi masuk dalam kategori sangat inovatif. Pertumbuhan aspek ekosistem inovasi didukung oleh pertumbuhan pilar dinamika bisnis serta pertumbuhan pilar kapasitas inovasi. Meskipun kondisi pilar kesiapan teknologi tidak bertumbuh, namun pertumbuhan pilar bisnis yang signifikan terutama didukung dengan adanya perbaikan pada dimensi kebijakan serta peningkatan dimensi kewirausahaan. Sementara pertumbuhan pilar kapasitas inovasi sangat dipengaruhi oleh dimensi interaksi dan keberagaman dan peningkatan dimensi penelitian dan pengembangan.

B. Peningkatan PDRB

Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2020 sebesar Rp12,401 triliun, meningkat sebesar 32 persen menjadi Rp16,370 triliun di tahun 2024. Adapun distribusi PDRB tertinggi tahun 2024 yaitu dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (36,83 persen), transportasi dan pergudangan (11,78 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (11,67 persen),.

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, kontribusi PDRB Kota Sukabumi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada kisaran 0,58 persen. Kontribusi tersebut masih lebih baik jika dibandingkan Kabupaten Pangandaran (0,54 persen) dan Kota Banjar (0,2 persen).

Tabel 2.9
PDRB ADHB Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	274,97	277,05	286,97	307,55	591,88
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	448,37	459,55	481,63	503,98	797,66
Pengadaan Listrik dan Gas	15,59	16,99	18,00	18,57	30,69
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	10,86	11,73	19,25	19,83	20,86
Konstruksi	578,34	601,49	943,84	1.041,63	1.112,21
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi	3.447,12	3.572,48	5.410,49	5.769,43	6.029,76
Transportasi dan Pergudangan	751,89	777,52	1.541,49	1.763,39	1.928,34
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	363,05	385,49	436,87	483,20	534,30
Informasi & Komunikasi	516,89	556,42	588,91	625,56	653,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.417,86	1.522,25	1.624,98	1.720,80	1.910,78
Real Estate	141,54	153,33	169,07	180,11	192,55
Jasa Perusahaan	210,82	228,98	255,45	279,41	296,02
Administrasi Pemerintah	590,52	583,17	580,28	600,15	608,50
Jasa Pendidikan	558,13	585,18	640,08	695,88	753,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	233,80	256,39	283,83	308,44	326,02
Jasa Lainnya	403,13	405,09	472,64	531,37	583,60
TOTAL PDRB	12.401,54	13.053,04	14.192,25	15.349,71	16.370,38

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025

Tabel 2.10
PDRB ADHK Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	274,97	277,07	286,97	307,55	329,00
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	448,37	459,55	481,63	503,98	534,04
Pengadaan Listrik dan Gas	15,59	16,99	18,00	18,57	18,57
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	10,86	11,73	12,47	12,73	13,38
Konstruksi	578,34	601,49	600,60	641,76	680,21
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi	3.447,12	3.572,48	3.767,92	3.911,06	4.082,00
Transportasi dan Pergudangan	751,90	777,52	836,52	912,50	997,68
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	241,16	247,78	271,81	293,05	309,67
Informasi & Komunikasi	493,86	534,52	571,97	607,26	635,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	891,90	934,62	958,67	990,62	1.020,26
Real Estate	108,13	116,52	123,86	130,72	136,22
Jasa Perusahaan	135,03	145,66	158,96	171,74	181,63
Administrasi Pemerintah	338,66	329,32	328,20	334,99	335,05
Jasa Pendidikan	334,49	344,12	371,97	393,52	413,46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168,39	181,55	199,43	210,84	221,95
Jasa Lainnya	295,94	300,15	335,16	360,99	394,66
TOTAL PDRB	8.534,72	8.851,05	9.324,16	9.801,88	10.303,16

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025

Jika dilihat dari lapangan usaha, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2024. Adapun 3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu transportasi dan pergudangan (9,33 persen), jasa lainnya (9,33 persen) serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (6,97 persen).

Secara khusus, terdapat dua lapangan usaha yang menjadi arahan untuk dikembangkan dalam rangka transformasi ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Kedua lapangan usaha itu yaitu industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Perkembangan kedua lapangan usaha tersebut menunjukkan tren yang terus bertumbuh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Rasio lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2024 yaitu 5,97 persen. Sementara itu, rasio lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB sebesar 5,67 persen.

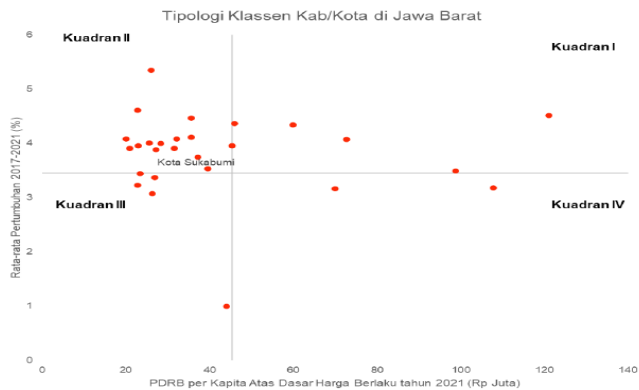
C. Pengembangan Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial

Berdasarkan *Tipologi Klassen* yang digunakan untuk mengetahui posisi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja dalam empat kuadran. Kota Sukabumi berada di posisi kuadran II, hal ini menunjukkan masuk pada daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota.

Berdasarkan analisis LQ pada periode tahun 2017-2021, Kota Sukabumi memiliki 11 sektor basis yang dapat mendorong perekonomian daerah. Sektor basis, artinya kontribusi sektor tersebut di wilayah Sukabumi lebih besar kontribusinya dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah lain di Jawa Barat, di mana sektor tersebut mampu mencukupi kebutuhan daerahnya. Adapun sektor yang paling potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi yaitu sektor Konstruksi serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

Berdasarkan analisis *Shift Share* pada periode tahun 2017-2021, Kota Sukabumi memiliki 10 sektor yang termasuk kompetitif dapat bersaing dengan sektor lainnya. Sektor yang memiliki nilai kompetitif tertinggi yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan penjualan motor.

Gambar 2.32
Tipologi Klassen



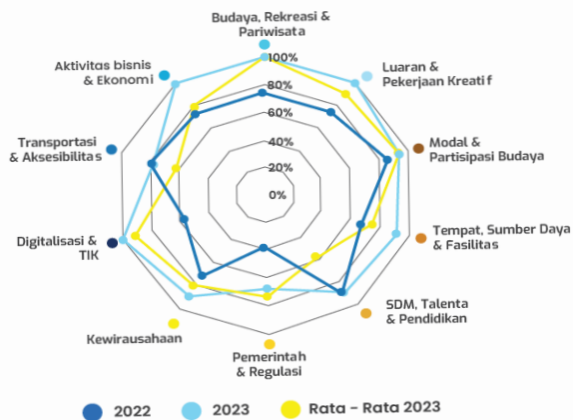
Sumber: Laporan *Background Study* RPJPD, 2023

D. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif Kota Sukabumi menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Didukung dengan generasi produktif Kota Sukabumi sebesar 53,33 persen, maka jumlah pelaku ekonomi kreatif sudah meningkat lebih dari 500 pelaku yang terdata. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang teraktivasi, terdapat 4 subsektor yang paling potensial, yaitu kuliner, musik, seni pertunjukan, dan kriya.

Sektor ekonomi kreatif di Kota Sukabumi masih perlu diperkuat agar menjadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan dan kesenjangan di Kota Sukabumi. Karena itu, keberadaan Sukabumi *Creative Hub* yang merupakan komite akselerasi, penataan, dan pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat mendorong kolaborasi pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam melahirkan kreativitas dan inovasi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ke depannya, ekonomi kreatif juga diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi baru.

Gambar 2.33
Spider Chart Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2022-2023

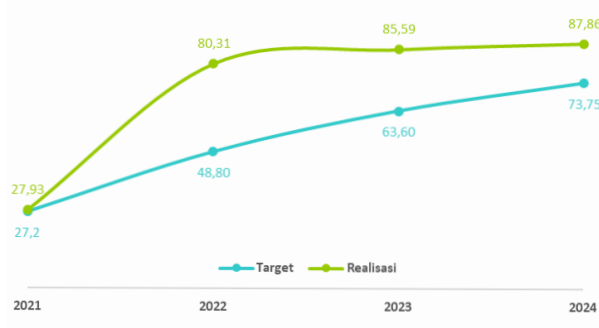


Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2024

Kota kreatif identik dengan kreativitas masyarakatnya. Semakin kreatif, semakin kompetitif kota tersebut. Para pemangku kepentingan di kota itu tentunya memiliki pemahaman tentang apa yang menjadi kekuatan yang akan membedakannya dengan kota lainnya.

Secara umum, kota kreatif ditandai dengan karakter yang terbuka, memiliki jejaring yang luas, masyarakat yang cair dan dinamis, selalu terbuka dengan hal-hal baru serta mudah menyesuaikan diri dengan ide-ide kontemporer.

Gambar 2.34
Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (Poin)



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Indeks Kota Kreatif mulai diterapkan di Kota Sukabumi sejak tahun 2021. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Sukabumi memiliki potensi industri kreatif yang menjanjikan. Pengembangan Kota Kreatif di Kota Sukabumi dilakukan dengan kolaborasi *Penta Helix* yang terdiri dari akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah dan media.

Agar Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi lebih baik lagi, maka perlu upaya kolaborasi berbagai pihak seperti dengan akademisi untuk pengembangan SDM melalui riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, kolaborasi dengan pelaku usaha atau bisnis yang memiliki peranan sebagai pencipta produk dan jasa kreatif, kolaborasi dengan komunitas kreatif seperti Sukabumi *Creative Hub* (SCH) untuk mewadahi pemasaran produk dan jasa kreatif melalui kegiatan yang diadakan oleh komunitas.

E. Penerapan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketimpangan sosial, sambil meminimalkan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis bagi generasi mendatang.

Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan. Ekonomi hijau menekankan pada pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Provinsi Jawa Barat, Indeks Ekonomi Hijau (Pilar Ekonomi) Kota Sukabumi tahun 2023 yaitu 41,15 poin, naik menjadi 41,43 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi masih dalam kategori "Sedang Tier 2". Perlu upaya lanjutan agar penerapan ekonomi hijau di Kota Sukabumi lebih masif lagi, seperti meningkatkan penerapan urban farming, penerapan energi terbarukan, pemanfaatan kendaraan listrik, penerapan green building, dan sebagainya.

F. Penerapan Ekonomi Syariah

Pemerintah Kota Sukabumi terus mendorong tumbuhnya ekonomi syariah dengan membangun perekonomian umat yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan semangat kebersamaan. Hal ini juga didukung dengan mayoritas warganya yang beragama Islam dan kotanya yang identik dengan Kota Santri. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi yaitu dengan mendorong penguatan ekosistem dekonomi syariah melalui sinergi antara koperasi, Baznas, lembaga wakaf, zakat, dan sedekah.

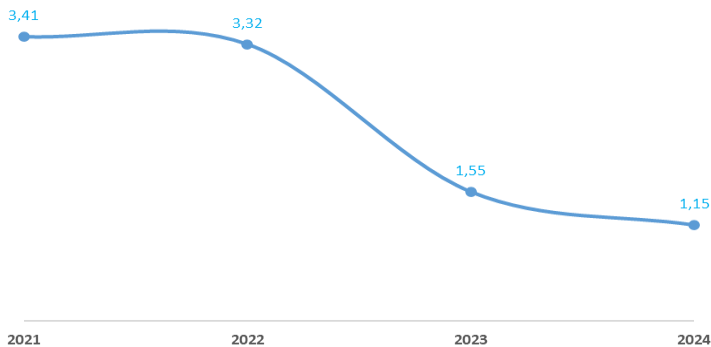
Pemerintah Kota Sukabumi juga menginisiasi dana abadi Kota Sukabumi berbasis wakaf. Di mana, dana wakaf yang ada di Kota Sukabumi yang nilainya Rp 284 juta, sekitar Rp 200 juta dibelikan ke sukuk BJB Syariah. Meski masih relatif kecil, namun potensi pengembangannya cukup besar. Sementara, jika dilihat dari Indeks Zakat Kota Sukabumi tahun 2024 yang mencapai 0,53 dan masuk dalam kategori "Stabil", mengindikasikan bahwa potensi zakat masih juga cukup besar untuk dikembangkan.

G. Peningkatan Investasi

Hingga November 2024, jumlah perusahaan di Kota Sukabumi mencapai 23.631 perusahaan, terdiri dari perusahaan kecil (PK) mencapai 753, perusahaan menengah (PM) 36, mikro 22.754 dan sebanyak 88 merupakan perusahaan besar (PB), dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 36.283 orang.

Jumlah tersebut perlu terus ditingkatkan, terlebih pengurusan perizinan dipermudah dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Untuk mendukung hal itu, berbagai inovasi kemudahan layanan terus diluncurkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satunya melalui aplikasi Si Jimat Boss (sistem jemput perijinan masyarakat bersama OSS).

Gambar 2.35
Realisasi Investasi Kota Sukabumi Tahun 2021-2024 (Triliun Rupiah)



Sumber: DPMPSTSP Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Meskipun tren investasi menunjukkan penurunan, adanya mega proyek yang tengah dilakukan pemerintah pusat, yaitu pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), ini tentunya akan sangat berdampak kepada laju investasi ke depannya. Peluang investasi di Kota Sukabumi tergolong cukup besar, terutama dibidang properti, hotel dan restoran, kuliner serta industri.

Karena itu, dengan fondasi pelayanan publik yang semakin baik dan kolaborasi antarlembaga yang diperkuat, Kota Sukabumi akan meneguhkan diri sebagai salah satu kota yang siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

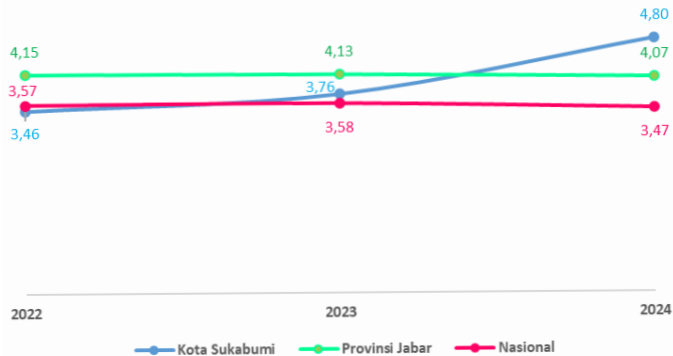
2.1.3.3 TRANSFORMASI DIGITAL

Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif. TIK dapat mengurangi biaya transaksi serta mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Salah satu cara mengukur penggunaan TIK yaitu dengan melihat tingkat adopsi TIK atau tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah.

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah yang diterbitkan Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada pilar ketiga disebutkan tentang adopsi TIK. Untuk Kota Sukabumi, skor adopsi TIK mengalami kenaikan signifikan di tahun 2024 yaitu sebesar 1,04 poin dari tahun 2023. Skor adopsi TIK Kota Sukabumi di tahun 2024 juga lebih baik dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Bahkan di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, skor tersebut berada pada peringkat kelima.

Gambar 2.36

Adopsi Teknologi Informasi Kota Sukabumi Tahun 2022-2024 (Poin)



Sumber: BRIN, 2025 (diolah)

Skor adopsi TIK yang sudah tinggi tersebut perlu didukung dengan ekosistem digital yang memadai. Dengan demikian, kumpulan teknologi informasi yang saling terintegrasi dan terkait dapat digunakan sebagai kesatuan yang utuh.

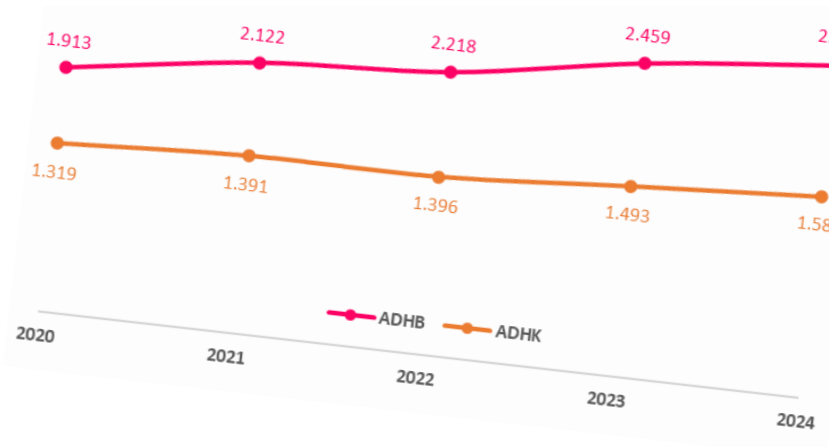
Sistem yang terbentuk kemudian dapat digunakan dan diisi oleh banyak pihak dalam bisnis, mulai dari pelanggan, pemasok, penyedia data, pihak pemerintah melalui dinas terkait, berbagai bentuk layanan dari bisnis lain, dan lain sebagainya.

2.1.3.4 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Informasi tentang PMTB, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan di suatu wilayah dari tahun ke tahun. Manfaatnya bagi pemerintah daerah adalah sebagai acuan mengambil kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan iklim investasi.

PMBT Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan cenderung meningkat.

Gambar 2.37
PMTB Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)



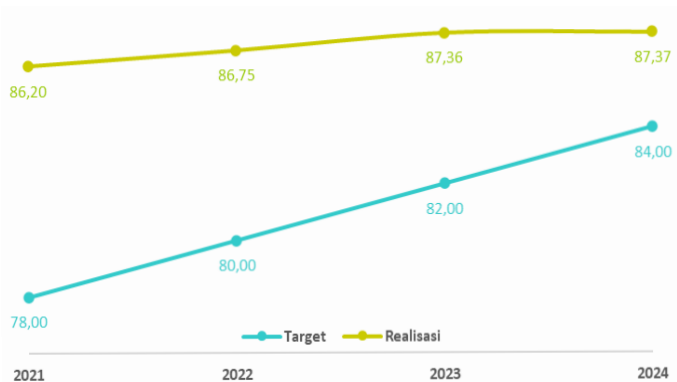
Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

2.1.3.5 PERKOTAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Sukabumi. Selain untuk mengukur kepuasan masyarakat, IKLI dapat digunakan untuk mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi.

Gambar 2.38
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Sukabumi
Tahun 2021-2024 (Persen)



Sumber: Dinas PUPR Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

IKLI Kota Sukabumi sudah masuk ke dalam kategori B atau memiliki mutu pelayanan baik. Namun demikian, layanan infrastruktur tetap harus ditingkatkan. Jika dicermati lebih dalam, layanan infrastruktur yang sudah termasuk baik adalah infrastruktur listrik, jalur pedestrian, taman kota dan jaringan telekomunikasi. Sedangkan infrastruktur yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah layanan transportasi seperti terminal dan jaringan jalan skala desa, jaringan air bersih, dan jaringan air limbah.

B. Peningkatan Kemantapan Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat, yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar lalu lintas barang dan jasa. Sehingga keadaan jalan dan jaringan-jaringan jalan bisa dijadikan acuan tentang tingginya kebudayaan dan kemajuan ekonomi suatu daerah.

Tingkat kemantapan jalan milik Kota Sukabumi saat ini tergolong cukup baik, dengan persentase mencapai sekitar 81 persen. Ada sekitar 154 ruas jalan Kota Sukabumi kondisinya tergolong cukup baik. Sedangkan untuk sisanya saat ini masih terus dalam perbaikan.

Tabel 2.11
Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan
di Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Km)

JALAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Negara	8,50	8,50	8,80	8,80	8,80
Provinsi	33,55	33,55	37,74	33,18	33,18
Kota	115,79	115,79	115,74	117,80	117,80
Total (km)	157,79	157,79	162,29	159,78	159,78

Sumber: Dinas PUPR, 2025

Meskipun saat ini secara persentase kemantapan jalan belum bisa 100 persen. Tapi, upaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap jalan rusak kewenangan Kota Sukabumi terus dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada. Kondisi sarana jalan itu sendiri banyak dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia dalam hal ini kendaraan. Kondisi jalan itu sendiri tidak akan mungkin bisa 100 persen. Tapi, setidaknya bisa mendekati ke angka tersebut.

Gambar 2.39
Kondisi Jalan di Kota Sukabumi Tahun 2022-2024 (Km)

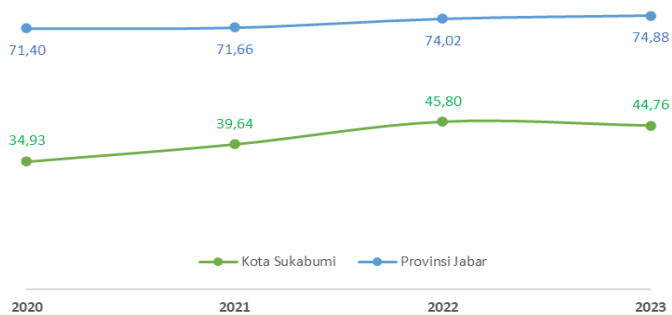


Sumber: Dinas PUPR, 2025 (diolah)

C. Peningkatan Akses Terhadap Sanitasi Layak

Sanitasi layak adalah fasilitas dan layanan yang memadai untuk pembuangan tinja secara aman dan higienis, serta mencegah kontak manusia dengan limbah. Akses sanitasi layak mencakup berbagai aspek yang memastikan fasilitas sanitasi memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Akses sanitasi yang layak sangat penting untuk mencegah penyakit menular dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 2.40
Persentase RT yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

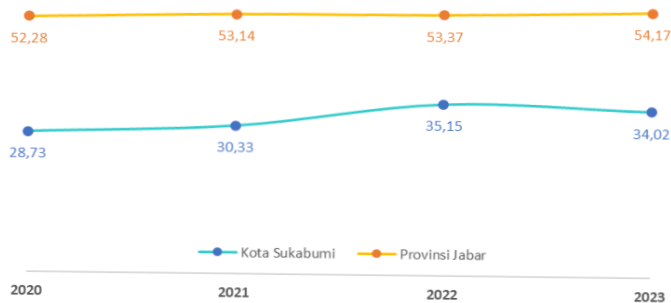
Akses sanitasi layak di Kota Sukabumi meskipun menunjukkan peningkatan namun capaiannya masih jauh di bawah Provinsi Jawa Barat. Capaian akses sanitasi layak Kota Sukabumi tahun 2023 yang hanya 44,76 persen mengindikasikan bahwa permasalahan ini perlu mendapat perhatian serius ke depannya. Penggunaan sanitasi yang tidak layak tentunya akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat.

Perlu upaya besar untuk meningkatkan akses sanitasi layak di Kota Sukabumi. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan pembangunan dan perbaikan fasilitas sanitasi di daerah yang kurang terlayani. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi layak dan perilaku hidup bersih harus terus digalakkan. Kerja sama dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program-program sanitasi perlu ditingkatkan. Selain itu, pemeliharaan dan pemantauan kondisi fasilitas sanitasi perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

D. Peningkatan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar minimum kesehatan, kenyamanan, dan keamanan untuk penghuninya. Rumah layak huni di Kota Sukabumi cenderung meningkat dalam kurun 4 tahun terakhir meskipun capaiannya masih 34,02 persen di tahun 2023. Capaian ini masih di bawah Provinsi Jawa Barat yang capaiannya sebesar 54,17 persen.

Gambar 2.41
Rumah Layak Huni Tahun 2020-2023 (Persen)



Sumber: Susenas, 2024 (diolah)

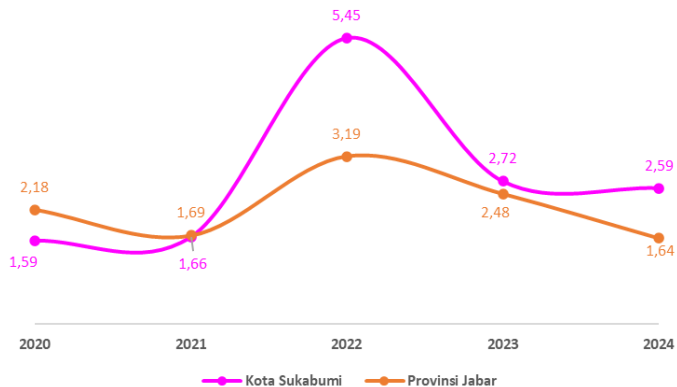
Jika dicermati lebih jauh, mayoritas rumah sudah memiliki struktur dinding, atap, dan lantai yang memadai. Namun, sebagian rumah masih menggunakan bahan yang kurang tahan lama seperti bambu atau kayu tanpa perlakuan khusus. Selain itu, sebagian rumah masih menghadapi masalah kepadatan, terutama di area dengan populasi tinggi.

Upaya untuk meningkatkan rumah layak huni di Kota Sukabumi perlu dilakukan berkesinambungan. Pembangunan dan renovasi melalui intervensi pemerintah dan pihak terkait perlu ditingkatkan. Intervensi tersebut dapat berupa menyediakan bantuan dan subsidi bagi keluarga yang tidak mampu. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kondisi rumah yang layak huni perlu digalakkan. Selain itu, kerja sama dengan melibatkan sektor swasta dalam program perumahan, baik dalam hal pendanaan maupun pelaksanaan proyek perlu ditingkatkan.

2.1.3.6 STABILITAS EKONOMI MAKRO

Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro yaitu terkait dengan inflasi.

Gambar 2.42
Inflasi Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan menggerus nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat akan menurun, dan demikian halnya investasi. Hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian inflasi yang terkendali merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi.

Secara *year on year* (y-o-y), pada tahun 2024 inflasi di Kota Sukabumi sebesar 2,59 persen dan termasuk tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini perlu disikapi dengan berbagai cara seperti pemantauan harga secara berkala untuk deteksi dini potensi kenaikan harga, stabilisasi pasokan pangan melalui kerja sama antardaerah (intervensi pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit), melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar murah ketika terjadi lonjakan harga pada komoditas tertentu dan memberikan subsidi distribusi pangan atau dukungan biaya logistik bagi pedagang kecil saat harga naik tajam.

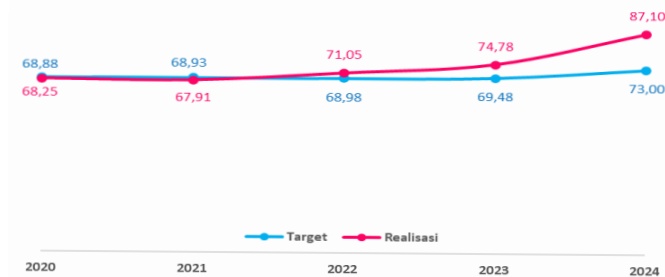
2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

A. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Daya saing dan produktivitas hanya dapat diraih bila dilakukan dengan konsisten dan fokus pada penyederhanaan sistem birokrasi dan manajemen, rekayasa dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan budaya produktif. Semua ini menjadi prasyarat guna menjawab tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan.

Gambar 2.43
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



Sumber: Setda Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

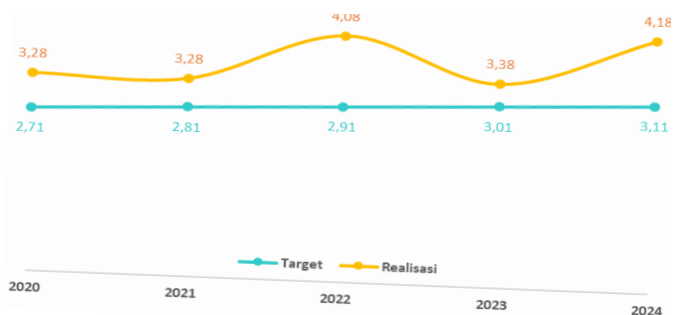
Memacu reformasi birokrasi menjadi salah satu strategi yang sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan daya saing daerah, peningkatan kualitas pelayanan dengan birokrasi yang efisien melayani akan menumbuhkan iklim investasi agar ekonomi tetap tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan kenaikan yang signifikan dan masuk dalam kategori “Memuaskan” di tahun 2024. Artinya, Pemerintah Kota Sukabumi telah menerapkan sebagian besar prinsip reformasi birokrasi dengan cukup baik. Struktur, tata kelola, dan pelayanan publiknya sudah mengalami peningkatan signifikan. Namun masih ada beberapa area yang perlu perbaikan lebih lanjut untuk mencapai efektivitas dan efisiensi optimal. Kinerja aparatur cukup baik, tetapi budaya kerja, integritas, dan inovasi layanan publik masih bisa ditingkatkan.

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyediaan pelayanan publik di era sekarang ini dan ke depannya akan semakin kompleks. Kecepatan dan kemudahan pelayanan menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Gambar 2.44
Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



Sumber: Setda Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

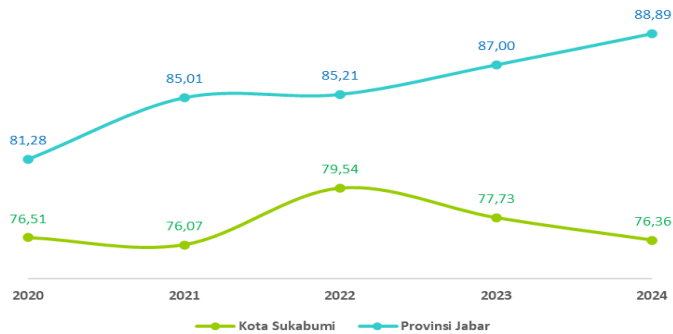
Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Namun demikian, upaya peningkatan standar pelayanan publik agar makin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Standar pelayanan tersebut mencakup kecepatan, kemudahan, dan keramahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

C. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk merencanakan kinerja, mengukur dan melaporkan kinerja, serta mengevaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Selama lima tahun berturut-turut, Kota Sukabumi berhasil mempertahankan predikat BB, menunjukkan konsistensi dalam akuntabilitas kinerja. Meskipun predikat tetap, terdapat fluktuasi nilai, dengan puncak pada tahun 2022 (79,54) dan penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

Gambar 2.45
Nilai SAKIP Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



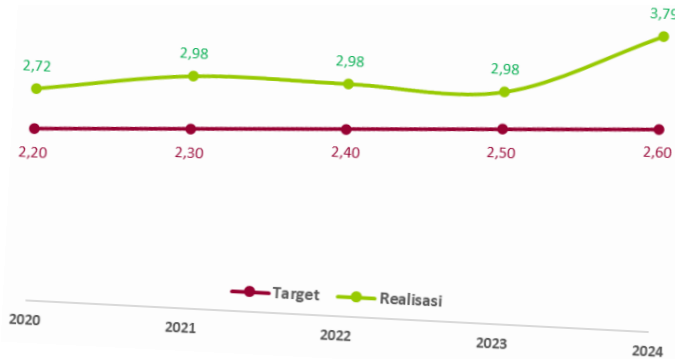
Sumber: Setda Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Tantangan dalam meningkatkan capaian SAKIP Kota Sukabumi antara lain masih adanya perangkat daerah yang belum sepenuhnya melengkapi data kinerja, menyebabkan ketidaksinkronan antara serapan anggaran dan realisasi kinerja. selanjutnya, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

D. Peningkatan Kualitas Pemerintahan Berbasis Digital

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka diharapkan dapat menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Gambar 2.46
Indeks SPBE Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



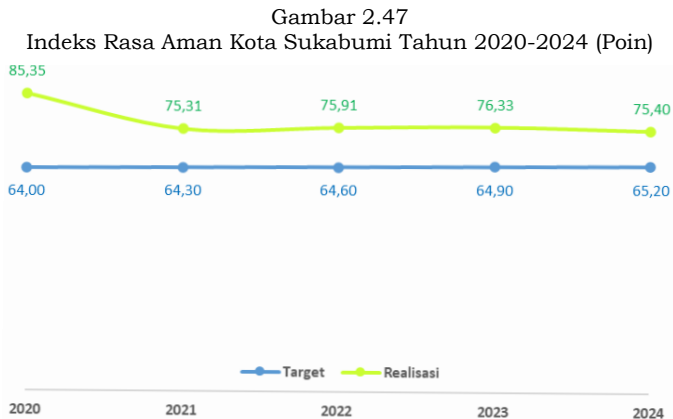
Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mendapatkan nilai Indeks SPBE Tahun 2021-2023 sebesar 2,98 dan meningkat menjadi 3,79 dengan kategori “Baik” di tahun 2024. Dengan demikian implementasi SPBE pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlaksana berkat kerja sama dan kolaborasi yang baik antar-PD yang tergabung dalam Tim Koordinasi Implementasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

2.1.4.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

Iklm investasi yang positif dapat dilihat dari tingkat keamanan dan ketertiban yang ada serta kemudahan regulasi. Tingkat keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari upaya penanggulangan pelanggaran perda dan unjuk rasa yang mencapai 100 persen. Artinya walaupun terdapat pelanggaran perda dan unjuk rasa, pemerintah Kota Sukabumi dapat menanggulangnya sehingga kondusifitas tetap terjaga.

Selain itu, tingkat keamanan Kota Sukabumi yang diukur dari Indeks Rasa Aman dan Indeks Kerukunan Umat Beragama juga menunjukkan hasil yang dapat mendukung iklim investasi. Untuk Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Walaupun tingkat rasa aman di Kota Sukabumi ini berada pada level “Aman” ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan, yaitu terkait partisipasi warga dalam kegiatan simulasi bencana, sosialisasi dan optimalisasi petunjuk keselamatan bencana, peningkatan akses warga terhadap lembaga/institusi pengembangan diri, dan masih terdapatnya kejadian kriminalitas (pencurian, perampasan, penganiayaan) serta kekerasan komunal (tawuran, perkelahian Ormas).



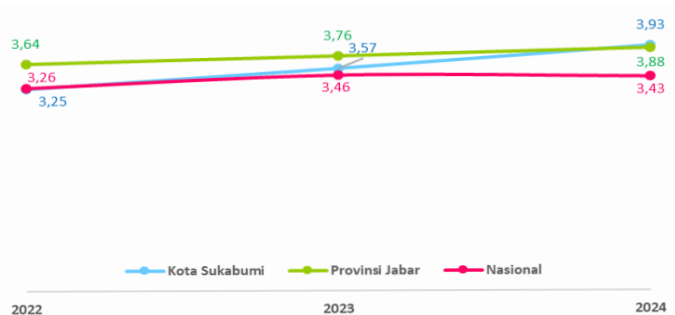
Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

2.1.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

Penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting. Dalam konteks ini, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat dijadikan alat untuk memahami kondisi daya saing suatu daerah, yaitu kondisi lingkungan pendukung, sumber daya manusia, tingkat efisiensi pasar, dan ekosistem inovasi.

IDSD Kota Sukabumi menunjukkan peningkatan di tahun 2024 dengan capaian 3,93 poin. Dari 12 pilar yang membentuk IDSD Kota Sukabumi, terdapat 1 pilar yang capaiannya masih di bawah 3,00, yaitu pilar kapabilitas inovasi (2,64). Agar daya saing daerah Kota Sukabumi meningkat diperlukan intervensi yang spesifik terhadap pilar-pilar yang capaiannya masih rendah tersebut.

Gambar 2.48
IDSD Kota Sukabumi Tahun 2022-2024 (Poin)



Sumber: BRIN, 2025 (diolah)

2.1.5 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Tabel 2.40
Capaian SPM Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
PENDIDIKAN							
1a	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/Mts)	101%	96,51%	-	-	-
2a	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	-	-	-
3a	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	80,7%	70,17%	-	-	-
1b	Pendidikan Dasar	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang terpenuhi	-	-	94,06%	98,29%	99,75%
2b	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang terpenuhi	-	-	93,21%	92,53%	99,65%
3b	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini yang terpenuhi	-	-	79,22%	80,32%	74,04%
KESEHATAN							
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,80%	101,91%	99,9%	100%	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	103,29%	103,83%	99,9%	100%	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	103,29%	108,69%	100%	99,89%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	75,59%	99,15%	95,6%	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	57,25%	100%	91,2%	96,62%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	27,09%	90,16%	53,1%	72,04%	98,37%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	72,06%	75%	91,6%	93,27%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	12,46%	100%	91,6%	87,31%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	13,03%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	91,93%	100%	81,6%	91,49%	96,72%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	95,05%	100%	95,1%	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	97,7%	100%	100%
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-sehari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	179%	48,66%	57,87%	100%	100%
PERUMAHAN RAKYAT							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	24,49%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	-	-	100%	-
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kebakaran	penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran					
SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Setda Kota Sukabumi, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian untuk masing-masing jenis pelayanan dasar dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pendidikan

Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Sukabumi tertinggi pada jenjang Pendidikan Dasar. Kondisi ini disebabkan pada jenjang Pendidikan Dasar baik secara jumlah lembaga dan kualitas layanan sudah relatif lebih baik dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lainnya dan adanya dukungan anggaran yang relatif lebih besar. Capaian pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini merupakan yang terendah dibandingkan dengan jenjang lainnya. Hal ini disebabkan dari sisi daya tampung belum sebanding dengan jumlah penduduk usia PAUD yang ada di Kota Sukabumi. Selain itu belum adanya pemahaman orang tua yang memiliki anak usia dini terkait pentingnya memberikan bekal pendidikan sedini mungkin kepada putra-putrinya.

2. Kesehatan

Dari 12 indikator capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Sukabumi, 10 indikator sudah mencapai target 100 persen. Adapun indikator yang capaiannya belum mencapai 100 persen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif tidak mencapai target dikarenakan sasaran pada saat dilakukan skrining kesehatan tidak dalam kondisi sehat, menolak untuk dilakukan skrining kesehatan, dan sasaran yang telah diberikan pelayanan kesehatan tidak terakui oleh aplikasi karena identitas tidak sesuai dengan *database*; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tidak mencapai target dikarenakan sasaran tidak ditemukan oleh petugas dan keluarga sasaran menyembunyikan pasien.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak di Kota Sukabumi pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Jumlah yang sudah terlayani sebanyak 450 SR untuk air minum serta sebanyak 570 RT untuk sanitasi.
4. Perumahan Rakyat
- Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni di Kota Sukabumi pada tahun 2024 telah dilakukan dengan capaian 100 persen, Terdapat 30 unit rumah yang dilakukan rehabilitasi dan pembangunan baru yang tersebar di 7 kecamatan. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni ini berdasarkan laporan dari kelurahan yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan melalui anggaran APBD.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi sudah mencapai target yang ditetapkan.
6. Sosial
- Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Sukabumi sudah mencapai target yang ditetapkan.

2.1.6 KINERJA PER URUSAN

2.1.6.1 URUSAN PENDIDIKAN

Kinerja urusan pendidikan Kota Sukabumi yang menunjukkan peningkatan yaitu pada indikator tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD serta tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.

Hal ini mengindikasikan semakin membaiknya akses pendidikan PAUD dan pendidikan menengah pertama serta meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak. Sementara pada indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar serta tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan capaiannya menurun di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak.

Tabel 2.12
Kinerja Urusan Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	80,7	70,17	79	81,21	82,59
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	101,83	98,30	99,18	98,87	98,04
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	108,34	92,79	96,54	92,15	96,76
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100	78,33

Sumber: Disdikbud Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.2 URUSAN KESEHATAN

Kinerja urusan kesehatan di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa 6 indikator capaiannya meningkat dan 8 indikator capaiannya tetap 100 persen. Untuk indikator yang capaiannya meningkat namun belum mencapai 100 persen diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan perlu dilakukan intervensi khusus terutama terkait dengan pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar, skrining kesehatan bagi orang usia 15-59 tahun, dan penanganan ODGJ berat.

Tabel 2.13
Kinerja Urusan Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0,4	0,45	3,17	3,23	3,30
2	Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	101,91	99,9	100	100
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	103,83	100	100	100
5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	108,69	99,9	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	73,97	99,15	95,6	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	24,07	100	91,2	95,79	96,97
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	26,6	90,16	53,1	67,79	96,90
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	72,45	75,00	91,6	97,07	118,18
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	12,46	100	91,6	84,13	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	13,03	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	91,93	100	81,6	89,36	95,89
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	94,56	100	95,1	100	100
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	97,7	100	100

Sumber: Dinkes Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Sukabumi secara umum menunjukkan peningkatan di tahun 2024.

Namun terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian agar capaiannya meningkat yaitu berkaitan dengan pengendali banjir, layanan pengolahan air limbah domestik, dan kemantapan jalan. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir perlu ditingkatkan karena Kota Sukabumi rawan akan bencana banjir. Layanan pengolahan air limbah domestik perlu ditingkatkan agar air limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga tidak mencemari lingkungan dan aman bagi kesehatan masyarakat. Sementara untuk tingkat kemantapan jalan masih perlu peningkatan agar memudahkan mobilitas orang dan kendaraan sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.

Tabel 2.14
Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Persen	478,95	57,32	57,32	18,45	18,45
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	m ²	165,25	57,57	55,41	64,15	64,97
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	71,54	91,20	57,87	71,64	75,72
5	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	3,43	100	100	100	100
6	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	Persen	84,81	81,08	84,54	86,86	88,59
7	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompeten	Persen	5,36	100	11,70	28,07	80,71
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangnya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: DPUPR Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Sukabumi yang masih perlu peningkatan terutama berkaitan dengan permukiman kumuh, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), dan PSU. Hal ini didasarkan pada realisasi capaian untuk masing-masing indikator yang belum sepenuhnya mencapai 100 persen. Hal ini penting agar produktivitas masyarakat makin meningkat karena lingkungan tempat tinggalnya bersih dan sehat.

Tabel 2.15
Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	Persen	24,49	100	100	100	100
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Persen	12,87	89,30	0,15	25,25	98,62
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	3,01	1,87	1,53	1,39	3,40
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0	100	100	35,01	31,51

Sumber: DPUPR Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.5 URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Capaian kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Sukabumi rata-rata sudah berada pada kategori sangat tinggi (91-100). Namun indikator layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang realisasinya mengalami penurunan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat Kota Sukabumi masih rawan terhadap ancaman bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi.

Tabel 2.16
Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	93	100	3,17
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	93	2,92	1,52
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	0	0	93	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	15	15	8,9	10,34	10,21

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.6 URUSAN SOSIAL

Kinerja urusan sosial Kota Sukabumi sudah sangat tinggi dengan realisasi mencapai 100 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Capaian ini agar tetap dapat dipertahankan untuk ke depannya dengan lebih mengoptimalkan upaya mitigasi potensi-potensi yang dapat menyebabkan permasalahan sosial.

Tabel 2.17
Kinerja Urusan Sosial Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.7 URUSAN TENAGA KERJA

Kinerja urusan tenaga kerja Kota Sukabumi yang masih memerlukan peningkatan terutama terkait dengan peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja. Jika kedua indikator ini meningkat, tentunya akan

berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pendataan tenaga kerja hingga level terendah misalnya kelurahan. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran.

Tabel 2.18
Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	Persen	100	1,91	27,88	8,85	9,08
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	100	100	100	91,71	91,71
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	40,33	29,33	25,61	47,24	50
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kab/kota	Persen	41,16	41,10	48,54	59,32	48,51

Sumber: Disnaker Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Sukabumi sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama berkaitan rasio kekerasan terhadap perempuan. Namun pada capaian indikator belanja APBD yang responsif gender mengalami penurunan. Untuk itu, upaya untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan yang terefleksi dari belanja langsung perlu untuk ditingkatkan.

Tabel 2.19
Kinerja Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	63,92	77,369	78,94	58,55	41,75
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	Angka	0,04	0,036	0,034	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk	Angka	0,01	11,464	0,008	25,69	41,91

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)						

Sumber: Dalduk KB dan P3A Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.9 URUSAN PANGAN

Kinerja ketahanan pangan Kota Sukabumi tahun 2024 berada pada kondisi yang tahan. Namun persentase ketersediaan pangan (beras/jagung) menunjukkan angka yang menurun. Kondisi ini dapat disebabkan karena luas lahan pertanian yang menghasilkan kedua komoditas berkurang akibat alih fungsi lahan. Untuk mengatasi ketersediaan pangan tersebut dapat dilakukan upaya intensifikasi lahan pertanian yang ada dan mengembangkan *urban farming*.

Tabel 2.20
Kinerja Urusan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	116,59	133,08	133,08	116,90	106,80

Sumber: DKP3 Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.10 URUSAN PERTANAHAN

Dari 3 indikator kinerja urusan pertanahan Kota Sukabumi yang diukur, hanya 1 indikator yang capaiannya sudah 100 persen. Pada indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum capaiannya 0 karena memang tidak ada rencana untuk itu.

Tabel 2.21
Kinerja Urusan Pertanahan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	26,65	-	85,37	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	-	-	-	-	-
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	26,65	-	85,37	100	65,80

Sumber: DPUPR Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.11 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja urusan lingkungan hidup Kota Sukabumi menghadapi permasalahan yang kompleks terutama berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Sebagai kota yang sedang berkembang dengan segala aktivitasnya, ancaman polusi udara dan alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Hal ini dapat berdampak pada kualitas lingkungan yang capaiannya cenderung stabil dalam kurun 3 tahun terakhir. Adapun untuk penanganan persampahan perlunya perubahan paradigma pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hal ini diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.22
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	Poin	59,58	60,30	59,71	60,00	62,53
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Persen	88,63	85,94	73,76	73,21	99,19
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kab/kota	Persen	0	0	0,03	0	0

Sumber: DLH Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.12 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Sukabumi pada indikator perekaman KTP elektronik dan kepemilikan akta kelahiran sudah sangat tinggi. Namun perlu upaya peningkatan dengan memperluas akses dan membuka kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak yang capaiannya masih 72,53 persen di tahun 2024. Selain itu perlu optimalisasi penggunaan data kependudukan oleh perangkat daerah.

Tabel 2.23
Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	98,19	99,45	99,43	99,32	99,58
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	28,44	49,75	57,99	61,25	72,53
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	97,69	98,02	98,90	99,43	99,95
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	15	41,93	62,5

Sumber: Disdukcapil Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.13 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur Kota Sukabumi cenderung muda, dengan mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif. Dengan kondisi demikian, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi sangat penting agar komposisi penduduk tetap terjaga. Dari indikator kinerja yang ada, berkaitan dengan pemakaian kontrasepsi dan kebutuhan KB perlu menjadi perhatian mengingat keduanya merupakan hal penting yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.24
Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	0	2,03	2	2,12	2
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	75,52	74,64	74,62	69,99	72,23
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	8,11	9,33	9,24	10,89	7,54

Sumber: Dalduk KB dan P3A Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.14 URUSAN PERHUBUNGAN

Kinerja urusan perhubungan Kota Sukabumi yang diukur dengan rasio konektivitas menunjukkan bahwa seluruh wilayah sudah terkoneksi. Namun pada derajat kejenuhan (v/c rasio) menunjukkan angka yang menurun dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja lalu lintas

menunjukkan perbaikan meskipun pada titik-titik tertentu sangat rawan terjadi kemacetan.

Tabel 2.25
Kinerja Urusan Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas kab/kota	Angka	80,8	100	1	1	0,9
2	V/C Ratio di Jalan kab/kota	Angka	0,48	0,38	0,37	0,33	0,32

Sumber: Dishub Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.15 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kinerja urusan komunikasi dan informatika Kota Sukabumi yang diukur dari 3 indikator sebagaimana pada tabel di bawah sudah menunjukkan capaian yang menurun di tahun 2024. Untuk itu diperlukan upaya percepatan transformasi digital di pemerintahan agar capaian indikator kinerja ke depannya semakin meningkat.

Tabel 2.26
Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	71,87	100	35	100	6,67
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	75,76	35	100	21,42
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kab/kota	Persen	75,27	76,93	62	68,26	11,88

Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.16 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Sukabumi menunjukkan tren yang meningkat. Meskipun demikian perlu upaya yang signifikan agar keberadaan koperasi semakin berkualitas dan pemenuhan jumlah wirausaha dapat mencapai minimal 4 persen agar Kota Sukabumi makin berkembang.

Tabel 2.27
Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	13,16	14,83	18,98	21,70	27,04
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Diskumindag Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.17 URUSAN PENANAMAN MODAL

Kinerja urusan penanaman modal Kota Sukabumi mengalami perbaikan meskipun masih minus di tahun 2024. Kondisi demikian memerlukan upaya terutama berkaitan dengan pemetaan potensi investasi dan promosi investasi yang masif serta meningkatkan dinamisme bisnis (kemudahan berinvestasi).

Tabel 2.28
Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	Persen	50,05	451,16	-2,60	-1	0,34

Sumber: DPMPSTSP Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kinerja urusan kepemudaan dan olah raga Kota Sukabumi memerlukan peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah. Mengingat potensi ekonomi kreatif Kota Sukabumi cukup besar maka diperlukan pemberdayaan pemuda dalam ekosistem kreatif sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan ekonomi lokal.

Tabel 2.29
Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	17,6	25,59	24,19	25,40	27,39
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	22,6	23,87	22,58	23,10	24,66

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Peningkatan prestasi olahraga	Jenis	9	15	17	36	43

Sumber: Disporapar Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.19 URUSAN STATISTIK

Kinerja urusan statistik Kota Sukabumi sudah sangat tinggi. Meski demikian upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna eksternal (selain perangkat daerah) perlu ditingkatkan mengingat data statistik sebagai salah satu bentuk informasi yang perlu diketahui banyak pihak.

Tabel 2.30
Kinerja Urusan Statistik Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	71,87	100	50	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	78,12	100	50	100	100

Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.20 URUSAN PERSANDIAN

Kinerja urusan persandian Kota Sukabumi sudah mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir. Namun demikian, upaya untuk memperkuat sistem keamanan perlu ditingkatkan mengingat ancaman serangan *cyber* semakin masif.

Tabel 2.31
Kinerja Urusan Persandian Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0	62,95	20	70,69	61,24

Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.21 URUSAN KEBUDAYAAN

Kinerja urusan kebudayaan Kota Sukabumi yang ditunjukkan dengan indikator terlestarikannya cagar budaya masih memerlukan peningkatan untuk ke depannya. Hal ini penting sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang mewarnai perkembangan Kota Sukabumi

hingga seperti sekarang ini. Selain itu, pelestarian ini juga untuk menunjang perkembangan wisata budaya.

Tabel 2.32
Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlestariannya Cagar Budaya	Unit/ Persen	73	73,33	73,33	83,56	100

Sumber: Disdikbud Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.22 URUSAN PERPUSTAKAAN

Kinerja urusan perpustakaan Kota Sukabumi menghadapi tantangan yang serius. Hal ini erat terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang serba digital dan cenderung menonjolkan visual. Untuk itu perlu upaya ekstra untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan menyesuaikan perilaku masyarakat saat ini dan ke depannya mengingat tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Sukabumi mengalami penurunan di tahun 2024.

Tabel 2.33
Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	61,49	65,34	70,10	70,42	69,27
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	55,06	39,68	96,85	82,15	87,81

Sumber: Dispusip Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.23 URUSAN KEARSIPAN

Kinerja urusan kearsipan Kota Sukabumi masih memerlukan upaya perbaikan meskipun capaiannya cenderung meningkat. Seiring dengan transformasi digital yang akan mempengaruhi sistem kearsipan ke depannya maka diperlukan juga upaya untuk menerapkan arsip digital sehingga lebih menghemat tempat dan lebih tersistem.

Tabel 2.34
Kinerja Urusan Kearsipan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	55,03	56,03	63,12	64,61	64,79
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	Persen	50	51,67	66,67	71,67	72,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						

Sumber: Dispusip Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.24 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kota Sukabumi tidak memiliki garis pantai sehingga produksi perikanan yang dihasilkan lebih bersumber dari perikanan budidaya. Mengingat karakteristik wilayah yang berkarakter kota maka diperlukan intensifikasi budidaya perikanan agar produksinya makin meningkat.

Tabel 2.35
Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/kota	Jumlah (ton)	1.243,83	1.388,07	1.368,95	102,89	100,20

Sumber: DKP3 Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.25 URUSAN PARIWISATA

Kinerja urusan pariwisata Kota Sukabumi cenderung fluktuatif dan menunjukkan kinerja positif di tahun 2024. Kondisi ini masih memerlukan peningkatan mengingat potensi wisata belum sepenuhnya dioptimalkan dan dukungan industri kreatif juga cukup besar. Pengembangan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru selain sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi.

Tabel 2.36
Kinerja Urusan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	7	1,999	2,24	7,78	8,12
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	Persen	27	21,74	21,97	23,01	19,45
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	4,47	36,00	82,05	102,06	102,42
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	2,92	2,95	2,71	3,17	3,26
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	13.419.712.356	46.861.100.000	22.448.213.698	6,03 (%)	5,71 (%)

Sumber: Disporapar Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.26 URUSAN PERTANIAN

Kota Sukabumi memiliki lahan pertanian yang semakin berkurang seiring dengan alih fungsi lahan yang masif. Untuk tetap menjaga dan meningkatkan produktivitas pertaniannya perlu dilakukan berbagai upaya, di antaranya dengan meningkatkan intensifikasi dan menerapkan sistem *urban farming*.

Tabel 2.37
Kinerja Urusan Pertanian Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	664,65	664,65	664,65	668,58	666,44
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	26,87	0	0	100	0

Sumber: DKP3 Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.27 URUSAN PERDAGANGAN

Kinerja urusan perdagangan Kota Sukabumi sudah sangat tinggi, hanya pada indikator persentase kinerja realisasi pupuk yang hanya 67,00 persen. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat Kota Sukabumi tidak mengandalkan pertanian sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan keberadaan lahan pertanian yang semakin berkurang.

Tabel 2.38
Kinerja Urusan Perdagangan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	6,19	100	-	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	91,95	53,78	-	67,00	59,58
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	23,6	89,33	208,75	80,89	72,95

Sumber: Diskumindag Kota Sukabumi, 2025

2.1.5.28 URUSAN PERINDUSTRIAN

Perkembangan kinerja urusan perindustrian Kota Sukabumi sangat positif terutama pada indikator pertambahan jumlah industri kecil dan menengah. Mengingat Kota Sukabumi sudah tidak memungkinkan menjadi

lokasi industri skala besar maka pengembangan industri kecil dan menengah ini penting dilakukan untuk mendukung perekonomian kota. Selain itu, pengembangan industri kecil dan menengah ini agar diarahkan untuk mendukung pengembangan industri kreatif.

Tabel 2.39
Kinerja Urusan Perindustrian Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

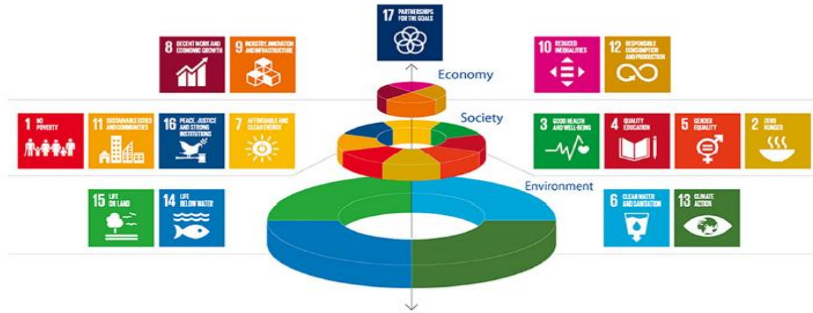
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persen	3,88	0,42	3,19	2,21	2,66
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	10	0	-	95	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	16,27	0	80	0	0
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	0	0	0	0
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Buku	85	85	1	95 %	55

Sumber: Diskumindag Kota Sukabumi, 2025

2.1.7 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah agenda pembangunan global yang disusun berdasarkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan. Terdapat 17 *goals*/tujuan dalam TPB yang diterjemahkan ke dalam 169 target dan ratusan indikator untuk mengukur pencapaiannya. TPB menempatkan kondisi lingkungan (*biosphere*) sebagai dasar dalam menopang kesejahteraan sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan. Terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera dari kondisi lingkungan dengan daya dukung kehidupan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 2.49
Keterkaitan Pilar TPB



Sumber: KLHS RPJMD Kota Sukabumi, 2025

Terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar ekonomi, yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Jumlah indikator TPB dalam Pilar Ekonomi yang menjadi kewenangan Kota Sukabumi berjumlah 45 indikator. Sebagian indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Sukabumi didominasi dengan indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 22 (48,89 persen) indikator, lalu indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) sebanyak 11 (24,44 persen) indikator, lalu sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 7 (15,56 persen) indikator, dan indikator tidak/belum ada data (NA) sebanyak 5 (11,11 persen) indikator. Indikator TPB Pilar Ekonomi yang belum mencapai target nasional, belum dilaksanakan belum mencapai target nasional dan tidak/belum ada data, perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan.

Pada pilar hukum dan tata kelola, TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) merupakan satu-satunya TPB yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. TPB 16 ini terdiri dari 21 indikator. Sebagian indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola di Kota Sukabumi didominasi dengan indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 9 (42,86 persen) indikator, lalu indikator tidak/belum ada data (NA) sebanyak 6 (28,57 persen) indikator, lalu sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 4

(19,05 persen) indikator, dan indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) sebanyak 2 (9,52 persen) indikator. Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola yang belum mencapai target nasional, belum dilaksanakan belum mencapai target nasional dan tidak/belum ada data, perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan.

Pada Pilar Lingkungan Hidup terdapat 6 TPB, yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB, 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 14 (Ekosistem Lautan), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan).

Namun, TPB 14 tidak menjadi kewenangan Kota Sukabumi, melainkan merupakan kewenangan provinsi sehingga indikatornya tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Jumlah indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Kota Sukabumi berjumlah 31 indikator. Sebagian indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup di Kota Sukabumi didominasi dengan indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 21 (67,74 persen) indikator, lalu sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 6 (19,35 persen) indikator, lalu indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) sebanyak 3 (9,68 persen) indikator, dan indikator tidak/belum ada data (NA) sebanyak 1 (3,23 persen) indikator. Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup yang belum mencapai target nasional, belum dilaksanakan belum mencapai target nasional dan tidak/belum ada data, perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan.

2.1.8 PROYEKSI SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

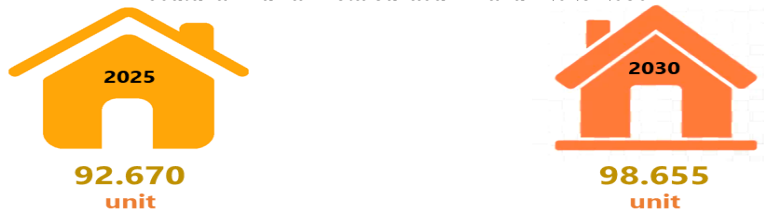
2.1.8.1 RUMAH/TEMPAT TINGGAL

Kebutuhan rumah di Kota Sukabumi menunjukkan tren meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan kota. Kesenjangan ketersediaan eksisting dengan kebutuhan rumah sekitar 3.500 unit di tahun 2025 dan akan meningkat terus hingga tahun 2030.

Berdasarkan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042, peruntukan kawasan permukiman dialokasikan seluas kurang lebih 2.761 hektar terdiri atas kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan

kawasan ruang terbuka non hijau. kondisi wilayah yang terbatas dan rawan terhadap bencana maka penyediaan rumah dengan konsep vertikal dan tahan terhadap bencana perlu mulai diterapkan untuk 5 tahun ke depan.

Gambar 2.50
Kebutuhan Rumah Kota Sukabumi Tahun 2025-2030



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah)

2.1.8.2 AIR MINUM

Kebutuhan air di Kota Sukabumi tahun 2025 diperkirakan sudah mencapai 46.335.125 liter/hari. Angka tersebut akan meningkat menjadi 49.327.625 liter/hari di tahun 2030. Kebutuhan air yang meningkat tersebut seiring dengan perkembangan kota dan aktivitas masyarakat yang juga meningkat. Sementara, kapasitas eksisting penyediaan air mencapai 44.551.250 liter/detik, sehingga masih terdapat gap yang harus dipenuhi untuk 5 tahun ke depan.

Gambar 2.51
Kebutuhan Air Minum Kota Sukabumi Tahun 2025-2030



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah)

Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut diarahkan dengan menggunakan sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Jaringan perpipaan meliputi unit produksi (Unit Produksi *Water Treatment Plant* Cimandiri Kecamatan Baros dan Unit Produksi *Water Treatment Plant* Cipelang Kecamatan Gunungpuyuh), unit distribusi tersebar di seluruh kecamatan termasuk saluran hidran kebakaran, dan unit pelayanan, berupa unit

pelayanan yang terdapat di Kecamatan Cikole. Bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur pompa yang tersebar di seluruh kecamatan, bak penampungan air hujan di seluruh kecamatan dan terminal air di Kecamatan Cikole.

2.1.8.3 LISTRIK

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, kebutuhan akan energi listrik di Kota Sukabumi di proyeksikan juga akan makin besar. Kebutuhan energi listrik di Kota Sukabumi tahun 2030 diperkirakan mencapai 67.085.570 kVA. Sementara itu, pasokan listrik saat ini sebesar 60.589.700 kVA.

Gambar 2.52
Kebutuhan Listrik Kota Sukabumi Tahun 2025-2030



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah)

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kota Sukabumi yang makin meningkat diperlukan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung direncanakan terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu dan di Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh.

2.1.8.4 PERSAMPAHAN

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Sukabumi, maka timbulan sampah akan terus bertambah. Jika diproyeksikan, jumlah sampah yang dihasilkan diperkirakan mencapai 73.458.699 liter/hari di tahun 2030. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 66.345.722 liter per hari.

Gambar 2.53
Timbulan Sampah Kota Sukabumi Tahun 2025-2030



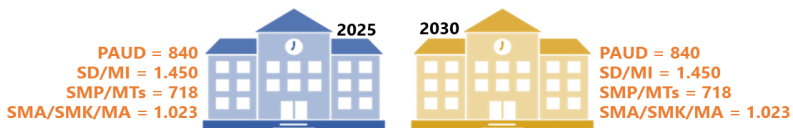
Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah)

Jika mengacu pada pola *business as usual*, yakni dengan mengangkut mayoritas sampah ke TPA, maka persoalan selanjutnya akan muncul. Setidaknya ada sekitar 83 persen timbulan sampah yang dikirimkan ke TPA. Sisanya diolah secara mandiri di rumah, diolah secara komunitas, serta dilakukan 3R. Oleh karena itu, sistem jaringan persampahan Kota Sukabumi direncanakan terdiri atas stasiun peralihan antara di Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang, tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* yang tersebar di seluruh kecamatan, tempat penampungan sementara yang tersebar di seluruh kecamatan dan tempat pemrosesan akhir di Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu.

2.1.8.5 PENDIDIKAN

Dari semua jenjang pendidikan, ketersediaan sarana pendidikan di Kota Sukabumi hingga tahun 2030 masih memerlukan penambahan. Hal ini perlu diantisipasi meskipun kemajuan teknologi informasi dan perkembangan sistem belajar mengajar akan berpengaruh terhadap perlu atau tidaknya penambahan sarana pendidikan tersebut.

Gambar 2.54
Kebutuhan Sarana Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2025-2030



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah)

2.1.8.6 KESEHATAN

Di Kota Sukabumi sudah terdapat berbagai pelayanan kesehatan primer yang merupakan pelayanan kesehatan terdekat dari masyarakat dan menjadi tonggak utama di bidang kesehatan masyarakat. Jumlah puskesmas di Kota Sukabumi tahun 2022 sebanyak 15 puskesmas. Adapun jumlah rumah sakit tahun 2022 sebanyak 6 Rumah Sakit dengan status milik Pemerintah Daerah sebanyak 2 rumah sakit, swasta 3 rumah sakit dan 1 rumah sakit milik Polri.

Tabel 2.41
Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

NO	FASILITAS KESEHATAN	2025 (UNIT)	2030 (UNIT)
1	Tingkat Pertama		
	▪ Puskesmas	15	16
	▪ Klinik Pratama	36	40
	▪ Tempat Praktek Mandiri/Dokter Umum	64	71
	▪ Tempat Praktek Mandiri/Dokter Gigi	48	55
	▪ Tempat Praktek Mandiri/Bidan	73	80
2	Tingkat Lanjut		
	▪ Rumah Sakit	6	7
	▪ Klinik Utama	7	9
	▪ Tempat Praktek Mandiri/Dokter Spesialis	30	37
3	Penunjang		
	▪ Laboratorium Kesehatan	6	7
	▪ Apotik	77	78
	▪ Unit Transfusi	1	1

Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah)

Meskipun sarana kesehatan di Kota Sukabumi relatif sudah memadai, namun terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang perlu ditambahkan untuk 5 tahun ke depan. Kebutuhan penambahan fasilitas kesehatan tersebut seperti pada tabel di atas.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1 KINERJA KEUANGAN LIMA TAHUN TERAKHIR

2.2.1.1 KINERJA PENDAPATAN

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penjelasan untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

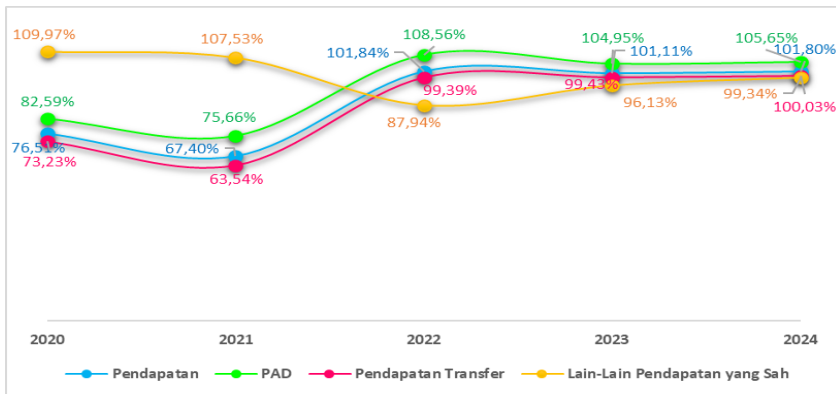
1. PAD terdiri atas beberapa jenis pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Capaian realisasi Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atas target yang ditetapkan pada periode 2020-2024 cenderung fluktuatif. Rata-rata capaiannya dalam kurun waktu itu sebesar 85,64 persen. Kinerja Pendapatan Daerah Kota Sukabumi pada saat Pandemi Covid-19 (tahun 2020-2021) menunjukkan penurunan yang tajam dan berada pada angka 67,40 persen di tahun 2021. Kinerja Pendapatan Daerah yang kurang dari 100 persen tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi belum berhasil menghimpun sumber-sumber pendapatannya untuk memenuhi target yang ditetapkannya pada awal tahun rencana.

Pada tahun 2022-2024, Kinerja Pendapatan Daerah Kota Sukabumi menunjukkan kinerja yang positif dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan. Kinerja pada periode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi regional dan nasional yang makin membaik, tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat, kebijakan pemerintah yang tepat, dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Gambar 2.55
Capaian Kinerja Pendapatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Jika dicermati per komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer selalu lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Meskipun demikian, PAD Kota Sukabumi yang pada tahun 2021 mengalami penurunan signifikan, secara bertahap meningkat di tahun berikutnya. Meningkatnya proporsi PAD ini berarti meningkatnya kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah Kota Sukabumi dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi Pemerintah Kota Sukabumi untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2.42
Target dan Realisasi Pendapatan
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

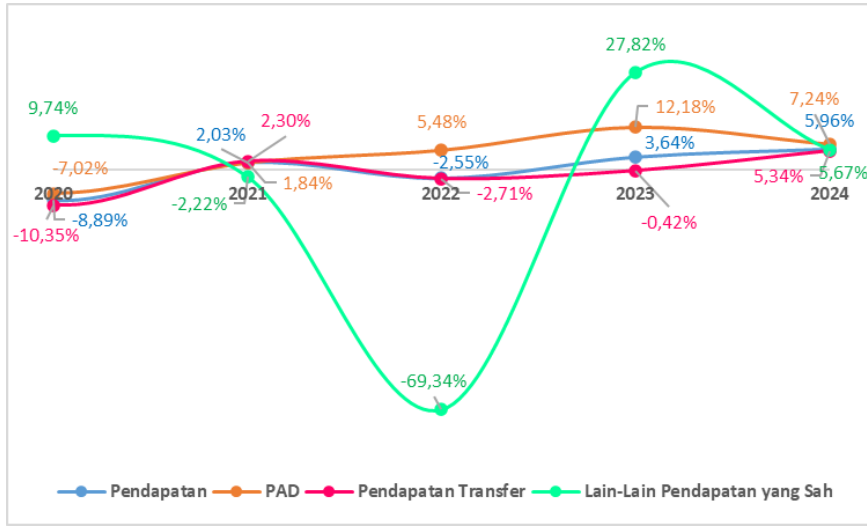
Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Target Pendapatan	1.593,754	1.845,889	1.190,541	1.242,719	1.307,949	1.436,170
▪ PAD	409,447	455,202	334,652	388,308	413,676	400,257
▪ Pendapatan Transfer	1.147,656	1.354,038	842,149	818,345	877,843	1.008,006
▪ Lain-lain Pendapatan yang Sah	36,649	36,649	13,739	16,065	16,428	23,906
Realisasi Pendapatan	1.219,380	1.244,104	1.121,391	1.256,510	1.331,427	1.234,562
▪ PAD	338,165	344,401	363,287	407,539	437,033	378,085
▪ Pendapatan Transfer	840,911	860,294	837,021	833,526	878,073	849,965
▪ Lain-lain Pendapatan yang sah	40,302	39,409	12,082	15,443	16,320	24,711
Kinerja Pendapatan	76,51%	67,40%	94,19%	101,11%	101,80%	85,96%

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025

Selama periode 2020-2024, Pendapatan Daerah Kota Sukabumi rata-rata tumbuh sebesar 0,04 persen. Untuk masing-masing komponen pendapatan daerah, terlihat bahwa PAD tumbuh paling tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan komponen lainnya. Pertumbuhan rata-rata komponen PAD sebesar 3,95 persen, pendapatan transfer sebesar -1,16 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -5,57 persen. Untuk lebih rincinya, perkembangan pertumbuhan pendapatan dan

pertumbuhan masing-masing komponennya dapat dilihat pada gambar di atas.

Gambar 2.56
Pertumbuhan Pendapatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

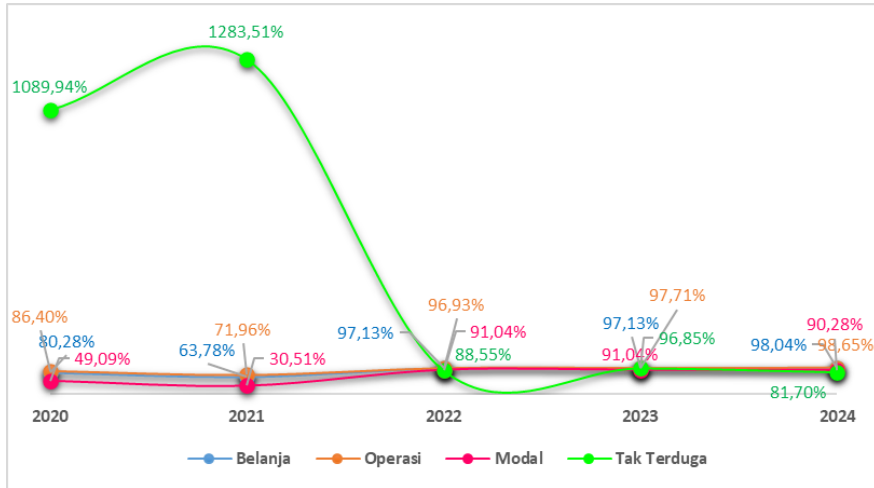


Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

2.2.1.2 KINERJA BELANJA

Belanja Daerah Kota Sukabumi terdiri dari komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, yang manfaatnya hanya sampai satu tahun anggaran. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Transfer terdiri dari transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya dan transfer bantuan keuangan lainnya. Adapun belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Gambar 2.57
Capaian Kinerja Belanja Kota Sukabumi Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Kinerja Belanja Daerah Kota Sukabumi pada kurun waktu 2020-2024 menunjukkan kecenderungan bahwa realisasi Belanja Daerah selalu berada di bawah pagu atau targetnya. Realisasi belanja yang lebih kecil dari target/pagu anggarannya ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi disisi lain, realisasi belanja yang lebih kecil dari pagu ini bisa jadi karena kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga kurang tepat dalam mengestimasi belanja, atau adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana.

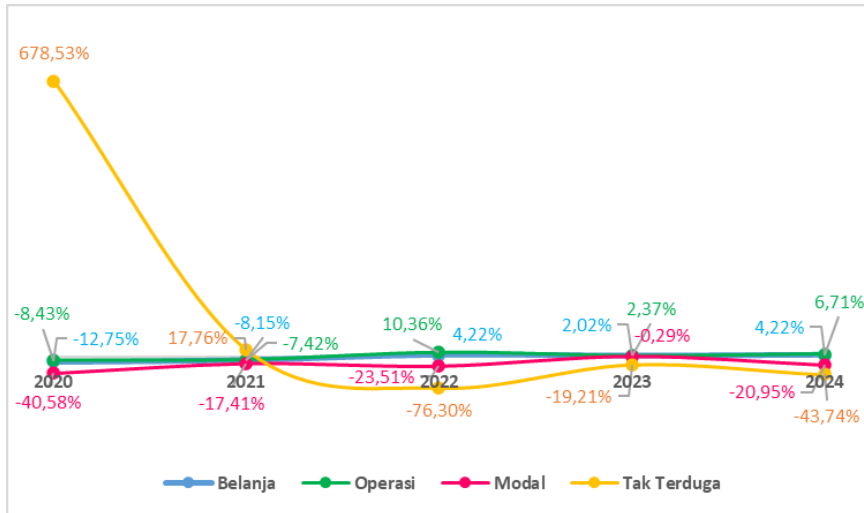
Realisasi Belanja Daerah Kota Sukabumi, yang mengalami penurunan signifikan akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021, mulai meningkat di tahun-tahun berikutnya. Adapun rata-rata komponen Belanja Daerah terbesar masih didominasi Belanja Operasi yaitu mencapai Rp 1.140,578 miliar. Meningkatnya realisasi Belanja Operasi terhadap total belanja daerah Kota Sukabumi berarti meningkatnya biaya operasional rutin daerah. Sementara itu, Belanja Modal berfluktuatif dan rata-ratanya sebesar Rp 117,799 miliar. Belanja Tak Terduga juga fluktuatif, terutama pada masa pandemi Covid-19 pata tahun 2020-2021, yang mengalami lonjakan belanja.

Tabel 2.43
Target dan Realisasi Belanja Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Target Belanja	1.628,973	1.883,023	1.304,258	1.314,794	1.357,513	1.497,712
▪ Belanja Operasi	1.291,846	1.435,828	1.176,458	1.194,788	1.262,677	1.272,319
▪ Belanja Modal	334,627	444,694	119,213	113,663	90,605	220,560
▪ Belanja Tak Terduga	2,500	2,500	8,586	6,343	4,230	4,832
Realisasi Belanja	1.307,678	1.201,051	1.251,737	1.277,025	1.330,938	1.273,686
▪ Belanja Operasi	1.116,158	1.033,284	1.140,354	1.167,407	1.245,687	1.140,578
▪ Belanja Modal	164,271	135,678	103,778	103,474	81,795	117,799
▪ Belanja Tak Terduga	27,248	32,087	7,604	6,143	3,456	15,308
Kinerja Belanja	80,28%	63,78%	95,97%	97,13%	98,04%	85,04%

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025

Gambar 2.58
Pertumbuhan Belanja Kota Sukabumi Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

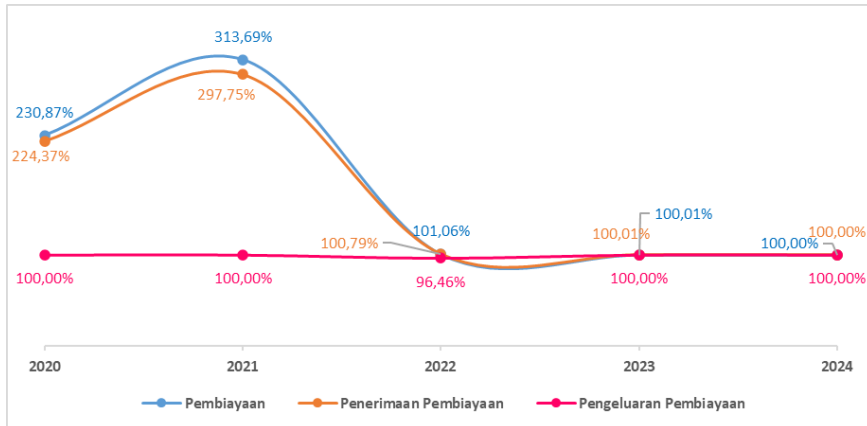
Pada periode tahun 2020-2024 itu, pertumbuhan tertinggi realisasi Belanja Daerah terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 4,22 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar -12,75 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata Belanja Daerah pada periode ini sebesar -2,09 persen per tahun.

Jika dilihat per komponen, pertumbuhan rata-rata Belanja Operasi sebesar 0,72 persen per tahun dan Belanja Modal sebesar -20,44 persen per tahun. Untuk Belanja Tak Terduga mengalami lonjakan pada saat Pandemi Covid-19 sehingga rata-ratanya menjadi tinggi yaitu mencapai 111,41 persen.

2.2.1.3 KINERJA PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah Kota Sukabumi terdiri dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Adapun Pengeluaran Pembiayaan, terutama untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

Gambar 2.59
Capaian Kinerja Pembiayaan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Capaian kinerja Pembiayaan Daerah Kota Sukabumi selama kurun waktu 2019-2023 menunjukkan bahwa realisasi kinerjanya selalu berada di atas pagu atau target yang sudah ditetapkan. Jika dilihat per komponen, kinerja Penerimaan Pembiayaan Kota Sukabumi tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Kondisi ini berbeda dengan kinerja Pengeluaran Pembiayaan yang cenderung stabil dalam kurun waktu tersebut.

Pertumbuhan tertinggi realisasi Penerimaan Daerah terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 56,24 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar -45,66 persen. Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan tertinggi yaitu sebesar 243,59 persen di tahun 2022 dan terendah sebesar -5772, persen di tahun 2020.

Tabel 2.44
Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Sukabumi
Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Target Pembiayaan	38,250	24,800	113,171	72,074	49,564	59,572
Penerimaan Pembiayaan	40,250	26,800	120,840	75,574	51,564	63,006
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	40,250	26,800	120,840	75,574	51,564	63,006
Pengeluaran Pembiayaan	2,000	2,000	7,1231	3,500	2,000	3,325
Realisasi Pembiayaan	88,300	77,790	114,920	72,079	49,564	80,531
Penerimaan Pembiayaan	90,300	79,790	21,791	75,579	51,564	63,805
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	90,300	79,790	120,840	75,574	51,564	83,614
Pengeluaran Pembiayaan	2,000	2,000	6,871	3,500	2,000	3,274
Kinerja Pembiayaan	230,85%	313,67%	101,55%	100,01%	100%	135,18%

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025

2.2.1.4 KAPASITAS FISKAL

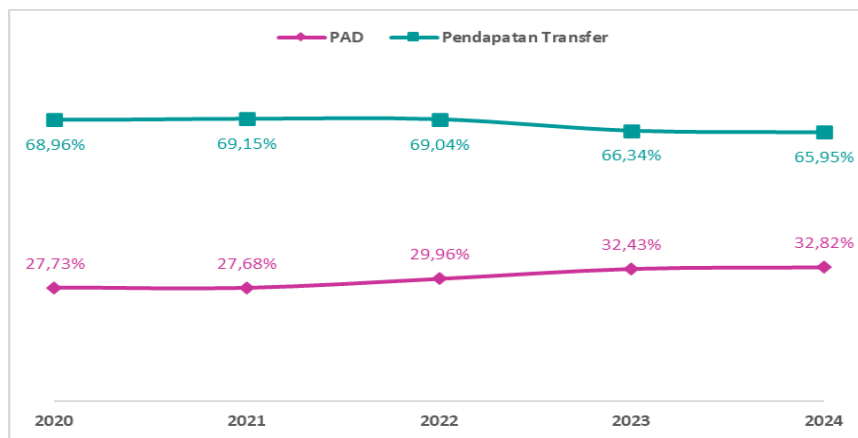
Mencermati tren rasio PAD dan Pendapatan Transfer dari Pusat tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Rasio PAD Kota Sukabumi cenderung meningkat sementara Rasio Pendapatan Transfer dari Pusat cenderung menurun. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengurangi ketergantungan pendapatan dari transfer Pemerintah Pusat menunjukkan kemajuan.

Untuk mengukur kapasitas fiskal daerah, Kementerian Dalam Negeri membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas fiskalnya menjadi 3, yaitu:

- a. Kapasitas Fiskal Kuat ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari Pendapatan Transfer;
- b. Kapasitas Fiskal Sedang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer seimbang (selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25 persen); dan

c. Kapasitas Fiskal Lemah ditandai dengan Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer.

Gambar 2.60
Persentase PAD dan Pendapatan Transfer terhadap
Total Pendapatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Mencermati gambar di atas, terlihat bahwa Pendapatan Daerah Kota Sukabumi masih sangat bergantung dengan Pendapatan Transfer. Jika dikategorikan sesuai klasifikasi kapasitas fiskal, dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal Kota Sukabumi masih berada pada kategori “lemah”. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pendapatan transfer dan lebih mengoptimalkan dan melakukan diversifikasi sumber-sumber PAD.

2.2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemampuan pemerintah dapat diukur dari berapa besar penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi keuangan daerah mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya serta isu terkini yang dianggap akan mempengaruhi kondisi perekonomian.

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah pada lima tahun ke depan, maka strategi dan arah kebijakan yang harus ditempuh dalam rangka mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBD yang sehat adalah dengan melakukan reformasi struktural di bidang pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui reformasi administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan dan retribusi daerah, belanja daerah, serta pengelolaan aset pemerintah.

Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada:

1. Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui:
 - (a) peningkatan penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah;
 - (b) merumuskan pembiayaan defisit anggaran;
2. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan daerah;
3. Revitalisasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah terutama ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi dan refocusing belanja daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran;
5. Perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan;
6. Optimalisasi dan normalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; serta
7. Pengelolaan pembiayaan dan pengendalian defisit dengan risiko yang minimal.

2.2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Efektivitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - a) Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame;
 - b) Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
 - c) Melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan *tapping box* dan alat bantu *software* rekam transaksi;
 - d) Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Normalisasi dan optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah melalui berbagai upaya dalam pengembangan layanan yang ada ataupun baru.
5. Mengembangkan alternatif-alternatif pendapatan pembangunan selain dari APBD, diantaranya Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan seperti; Obligasi Daerah, Dana Umat, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah, Corporate Sosial Responsibility /Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dana kemitraan dunia usaha, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

2.2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal maupun belanja tidak terduga. Belanja operasi digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah. Belanja Modal digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, sedangkan Belanja Tidak Terduga digunakan untuk membiayai kejadian yang bersifat luar biasa, mendesak dan bencana.

Belanja Daerah Tahun 2025-2019 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Belanja daerah juga harus memperhatikan isu strategis dan prioritas pembangunan yang ditetapkan. Adapun secara umum kebijakan belanja daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib yang mengikat, seperti gaji, tunjangan, belanja jasa kantor listrik, air, telepon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil serta mempertimbangkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, *access* serta kenaikan tunjangan.
2. Pemenuhan pencapaian Program Prioritas dan Indikator Kinerja Utama;
3. Pemenuhan belanja prioritas dalam rangka menjalankan program unggulan Kepala Daerah;
4. Pemenuhan belanja prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi;
5. Pemenuhan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kab/Kota yaitu sebanyak 29 jenis pelayanan dasar;
6. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG`s);
7. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD
8. Pengalokasian anggaran kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan.
9. Pengalokasian belanja untuk infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah;
10. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat

- diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah yang di antaranya disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya;
11. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
 12. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
 13. Belanja Daerah memperhatikan dan mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang serta hasil reses/pokok-pokok pikiran DPRD.
 14. Belanja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terjadi defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi daerah.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Maka dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, maka pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pengeluaran pembiayaan selama lima tahun ke depan diperkirakan akan digunakan untuk penyertaan modal perusahaan daerah, pembayaran atas layanan yang didapatkan serta pengeluaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan modal akan dilakukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi, PDAM Tirta Bumi Wibawa serta Bank Jabar Banten yang besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada peraturan daerah yang terkait.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2.2.2.4 ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka mendukung implementasi pembangunan daerah terutama pada program prioritas dan unggulan, maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Karena besarnya kebutuhan anggaran tersebut dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan yang ada, maka Kota Sukabumi dituntut untuk senantiasa terus mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam rangka pembangunan daerah.

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Sukabumi dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Sukabumi. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Provinsi; 3) Dana Masyarakat/Umat; 4) *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; 6) Hibah; 7) Obligasi Daerah; 8) Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah; 9) Dana kemitraan dunia usaha; 10) Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; serta 11) Pendanaan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.2.3 PROYEKSI KEUANGAN LIMA TAHUN KE DEPAN

Dalam penyusunan proyeksi Pendapatan Daerah ini perlu mempertimbangkan beberapa asumsi terkait dengan pertumbuhan pendapatan Kota Sukabumi selama beberapa tahun ke belakang, potensi pendapatan daerah yang dapat diperoleh Pemerintah Kota Sukabumi selama lima tahun ke depan, dan kebijakan keuangan pemerintah pusat, serta kondisi ekonomi makro Kota Sukabumi. Dalam penyusunan proyeksi pendapatan lima tahun kedepan fokus utamanya adalah bagaimana optimalisasi pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan dana transfer yang sifatnya pasti. Khusus untuk transfer pusat bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan Provinsi tidak dimasukkan sebagai proyeksi pendapatan karena sifatnya yang belum pasti serta disesuaikan dengan menu dan usulan yang disampaikan untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Proyeksi Belanja Daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sukabumi selama 6 (enam) tahun ke depan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Akan tetapi, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Sukabumi selama ini berpegang pada prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 2.45
Proyeksi APBD Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 (Rupiah)

URAIAN	APBD 2025	P-RAPBD 2025	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah	1.271.650.168.050	1.308.126.749.114	1.175.691.490.983	1.203.285.096.566	1.241.753.259.023	1.290.756.518.783	1.350.330.835.786
Pendapatan Asli Daerah	452.802.605.328	484.562.661.465	527.629.653.424	555.596.369.502	594.064.531.959	643.067.791.719	702.642.108.722
Pendapatan Transfer	803.910.562.722	807.313.184.526	633.226.837.559	632.853.727.064	632.853.727.064	632.853.727.064	632.853.727.064
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	14.937.000.000	16.250.903.123	14.835.000.000	14.835.000.000	14.835.000.000	14.835.000.000	14.835.000.000
Belanja Daerah	1.293.849.541.127	1.355.804.448.420	1.186.553.219.246	1.220.624.820.132	1.253.152.750.645	1.308.877.567.182	1.362.527.278.738
Belanja Operasi	1.226.865.604.837	1.265.797.281.421	1.133.079.480.344	1.144.425.615.148	1.154.220.066.463	1.167.735.373.426	1.192.646.428.499
Belanja Modal	55.592.340.972	85.627.512.022	48.402.143.584	61.010.197.994	82.737.527.429	124.405.967.191	149.737.198.889
Belanja Tak Terduga	11.391.595.318	4.379.654.977	5.071.595.318	15.189.006.990	16.195.156.753	16.736.226.565	20.143.651.340
Surplus/(Defisit)	(22.199.373.077)	(47.677.699.306)	(10.861.728.263)	(17.339.723.566)	(11.399.491.622)	(18.121.048.398)	(12.196.442.951)
Pembiayaan							
Penerimaan Pembiayaan	24.199.373.077	49.677.699.306	18.960.513.300	19.339.723.566	19.726.518.037	20.121.048.398	20.523.469.366
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.000.000.000	8.098.785.037	2.000.000.000	8.327.026.415	2.000.000.000	8.327.026.415
Pembiayaan Netto	22.199.373.077	47.677.699.306	10.861.728.263	17.339.723.566	11.399.491.622	18.121.048.398	12.196.442.951
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-

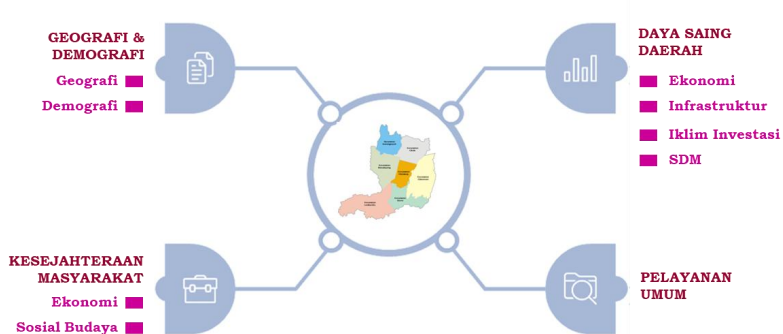
Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2025

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan pembangunan Kota Sukabumi akan disajikan sesuai dengan 4 aspek pembangunan yang masing-masingnya akan diuraikan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.61
Permasalahan Pembangunan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025

2.3.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan berkaitan dengan kondisi fisik geografi di Kota Sukabumi, antara lain:

- alih fungsi lahan untuk permukiman dan pusat perdagangan cukup besar yang ditunjukkan dengan berkurangnya luas lahan pertanian mencapai 150 hektar;
- minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang baru mencapai sekitar 2 persen dari yang seharusnya 20 persen;
- status daya dukung pangan di sebagian besar wilayah sudah terlampaui yaitu mencapai 3.357,22 ha;
- ketahanan pangan sudah masuk kategori sangat tahan (skor 80,90 di tahun 2024) namun dalam konteks kota di Provinsi Jawa Barat skornya hanya lebih baik dari Kota Tasikmalaya;

- e. kualitas lingkungan hidup cenderung stabil di angka 60 dalam kurun 5 tahun mengingat tekanan terhadap pencemaran air dan udara yang cenderung meningkat;
- f. kondisi geografis yang berkontur menyebabkan pengembangan infrastruktur seperti drainase mengalami tantangan;
- g. risiko bencana sudah masuk dalam kategori sedang (skor 107,44 di tahun 2024) namun risiko gempa bumi, banjir, dan tanah longsor masih cukup besar mengingat Kota Sukabumi masuk dalam lintasan Sesar Cimandiri; dan
- h. kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk ke dalam kelas kapasitas sedang (0,57 di tahun 2023) sehingga masih memerlukan peningkatan.

Permasalahan demografi berdasarkan kondisi umum daerah dan proyeksi yang telah dilakukan di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. distribusi penduduk yang belum merata yang ditunjukkan dengan konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Cikole (63,24 ribu jiwa), Warudoyong (60,72 ribu jiwa), dan Citamiang (54,57 ribu jiwa);
- b. dengan luas wilayah yang kecil ($\pm 48 \text{ km}^2$), jumlah penduduk Kota Sukabumi terus meningkat menyebabkan munculnya permukiman kumuh di beberapa wilayah;
- c. belum adanya perubahan paradigma terkait bonus demografi yang seharusnya lebih menekankan pada konfigurasi tingkat pendidikan penduduk yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk bekerja didominasi lulusan SMP ke bawah yaitu sebanyak 71.712 jiwa;
- d. Kota Sukabumi menjadi tujuan migrasi dari daerah pedesaan di Kabupaten Sukabumi maupun dari daerah lain;
- e. belum optimalnya pengelolaan SDM terintegrasi, baik dari sektor publik maupun swasta; dan
- f. keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di tengah arus globalisasi yang belum sepenuhnya tertangani.

2.3.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. adanya kesenjangan distribusi kekayaan di masyarakat yang relatif tinggi ditunjukkan dengan rasio gini yaitu 0,436 di tahun 2024 dan masih berada di atas angka Provinsi Jawa Barat serta nasional;
- b. pertumbuhan ekonomi cenderung melambat (5,11 persen) di tahun 2024 dan belum mencapai target (5,22 persen) meski capaiannya di atas angka Provinsi Jawa Barat;
- c. akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum optimal yang tercermin dari angka kemiskinan yang masih berada di angka 7,20 persen;
- d. terbatasnya lapangan kerja menyebabkan TPT masih tinggi yaitu berada di angka 8,34 persen di atas angka Provinsi Jawa Barat (6,75 persen) dan Nasional (4,91 persen); dan
- e. IPM untuk skala kota tahun 2024 masih cukup rendah dibanding kota lain di Provinsi Jawa Barat karena hanya lebih baik dari Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Permasalahan kesejahteraan sosial budaya berdasarkan kondisi umum di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. Indeks Keluarga Sehat cenderung meningkat namun masih memerlukan penguatan dan pendampingan di beberapa puskesmas serta kerja sama pelaksanaan program;
- b. belum merata dan tercukupinya SDM kesehatan yang komposisinya masih didominasi perawat (47 persen), bidan (12 persen), dan dokter (7 persen);
- c. Umur Harapan Hidup tahun 2024 yaitu 75,11 tahun, masih di bawah kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat;
- d. Indeks Pembangunan Keluarga masuk kategori siaga (skor 58,70 tahun 2024) dan masih termasuk terendah di antara kota-kota di Provinsi Jawa Barat;
- e. Indeks Ketimpangan Gender yang masih berada pada angka 0,359 di tahun 2024 memerlukan upaya komprehensif untuk menguranginya;

- f. Indeks Perlindungan Anak tahun 2022 termasuk rendah (65,70) jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat;
- g. ruang-ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan masih terbatas meskipun angka partisipasinya sudah mencapai 25,40 persen di tahun 2023; dan
- h. rendahnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga yang ditunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tahun 2024 yang berada di angka 45 persen, sementara TPAK laki-laki ditas 70 persen.

2.3.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. masih rendahnya kontribusi PDRB ADHB Kota Sukabumi terhadap Provinsi Jawa Barat yang hanya 0,58 persen di tahun 2024;
- b. PDRB per Kapita ADHB Kota Sukabumi tahun 2024 termasuk rendah dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat yaitu Rp44,76 juta;
- c. belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital dalam perekonomian kota;
- d. adanya kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita di wilayah utara-selatan dikarenakan perkembangan kota yang memang timpang dan lebih maju di wilayah utara;
- e. belum optimalnya pola kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar; dan
- f. realisasi investasi yang cenderung meningkat tidak serta menurunkan angka pengangguran secara signifikan, di mana TPT Kota Sukabumi masih berada di angka 8,34 persen di tahun 2024.

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing SDM di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. rata-rata masyarakat Kota Sukabumi tahun 2024 pendidikan terakhirnya setara dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- b. kemampuan numerasi siswa masih dalam kategori sedang di tahun 2023 (berkisar di angka 55 persen);

- c. belum optimalnya kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan SDM kreatif;
- d. ekosistem digital belum terbangun dengan baik meskipun skor adopsi TIK Kota Sukabumi sudah mencapai 4,80 di tahun 2024;
- e. kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan tahun 2024 yang cukup besar dimana TPAK laki-laki sekitar 70 persen, sementara TPAK perempuan hanya 45 persen; dan
- f. rasio ketergantungan yang stabil berada di angka 45 menunjukkan perlunya memanfaatkan bonus demografi untuk lebih meningkatkan produktivitas masyarakat.

Permasalahan daya saing infrastruktur di Kota Sukabumi berdasarkan kondisi umum daerah, antara lain:

- a. konektivitas antarwilayah agar memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur yang selama ini lebih berorientasi di wilayah utara; dan
- c. belum optimalnya penyediaan air minum (kebutuhan eksisting 44.551.250 liter/hari), pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan (produksi sampah mencapai 66.345.722 liter per hari).

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing iklim investasi di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. dinamisme bisnis masih belum optimal, ditunjukkan dengan skor pilar 11 IDSD yang hanya 2,48 di tahun 2024;
- b. belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban meskipun Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi sudah mencapai 75,40 di tahun 2024;
- c. masih adanya pelanggaran Perda dan unjuk rasa yang dilakukan; dan
- d. konflik sosial di masyarakat masih sering terjadi terutama berkaitan dengan perkelahian antarkelompok pelajar dan pemuda.

2.3.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pelayanan umum di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. penerapan Reformasi Birokrasi masih bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi (nilai Indeks RB berada di angka 87,10 di tahun 2024);
- b. Indeks SPBE tahun 2024 masuk kategori baik (3,79) namun masih diperlukan upaya untuk menguatkan ekosistem digital di pemerintahan; dan
- c. perlunya peningkatan pelayanan publik meskipun Indeks Pelayanan Publik mencapai angka 4,18 di tahun 2024;

2.3.2 ISU SESUAI KONTEKS

2.3.2.1 ISU GLOBAL

Isu global merujuk pada masalah atau tantangan yang mempengaruhi banyak negara dan memerlukan kerja sama internasional untuk menyelesaikannya. Isu-isu ini memiliki dampak luas yang melintasi batas-batas negara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Isu global untuk jangka waktu 5 tahun ke depan yang diidentifikasi dari berbagai referensi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.62
Isu Global



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025

- Krisis sumber daya alam (SDA) dunia adalah isu yang semakin mendesak, terutama dalam 5 tahun ke depan, dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang terbatas. Permintaan untuk logam dan mineral seperti lithium, kobalt, dan nikel yang digunakan dalam teknologi hijau seperti baterai kendaraan listrik diperkirakan akan terus meningkat. Sementara cadangan minyak dan gas bumi yang terbatas dan ketergantungan pada energi fosil menimbulkan tantangan dalam transisi ke energi terbarukan. Kondisi ini perlu segera diatasi agar tidak memperburuk terjadinya perubahan iklim.
- Iklim dan *biodeversity* (keanekaragaman hayati) merupakan hal yang menjadi perhatian untuk ke depannya. Dampak perubahan iklim semakin nyata dengan meningkatnya pemanasan global, perubahan pola cuaca, dan meningkatnya permukaan air laut. Dampak perubahan iklim tersebut diperburuk dengan deforestasi yang makin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi berkurangnya keanekaragaman hayati. Untuk itu diperlukan upaya bersama yang didukung pendanaan dan kebijakan serta inovasi teknologi untuk mengatasi isu ini.
- Disrupsi teknologi merupakan perubahan besar yang disebabkan oleh inovasi teknologi yang mengganggu industri atau pasar yang ada. Disrupsi teknologi akan mengubah struktur ekonomi, menciptakan peluang baru, dan menghilangkan beberapa industri yang ada. Pergeseran pekerjaan dan perubahan dalam keterampilan yang dibutuhkan dapat meningkatkan ketidaksetaraan jika tidak diimbangi dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat. Selain itu, perubahan dalam cara kerja, komunikasi, dan interaksi sosial akibat teknologi baru akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat.
- *Cyber insecurity* merujuk pada kerentanan dan ancaman yang dihadapi sistem informasi dan jaringan dari serangan siber yang dapat merusak, mencuri, atau mengakses data dan informasi sensitif secara tidak sah. Kondisi ini dapat berdampak pada kerugian finansial akibat pencurian data, pemerasan melalui *ransomware*, dan biaya pemulihan sistem. Selain itu, infrastruktur kritis seperti energi, transportasi, dan layanan kesehatan dapat di serang sehingga membahayakan keamanan nasional.

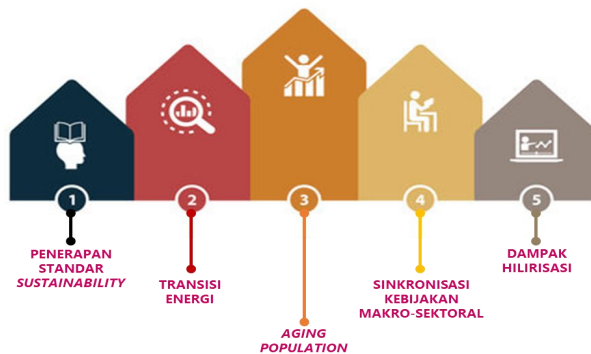
Pada konteks individu, pelanggaran terhadap privasi individu melalui pencurian data pribadi dan informasi sensitif tak dapat dihindarkan.

- Polarisasi sosial merujuk pada perpecahan yang semakin tajam di dalam masyarakat berdasarkan perbedaan politik, ekonomi, budaya, agama, dan lainnya. Polarisasi sosial ini dapat mengancam stabilitas sosial dan politik, dengan meningkatnya protes, kerusuhan, dan bahkan kekerasan. Polarisasi ini juga berdampak pada erosi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, media, dan antar kelompok masyarakat. Selain itu, perpecahan sosial tak dapat dihindarkan sehingga dapat menghambat kerja sama dan kohesi sosial yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2.3.2.2 ISU NASIONAL

Isu nasional adalah masalah atau tantangan yang mempengaruhi suatu negara secara signifikan dan memerlukan perhatian serta tindakan dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk 5 tahun ke depan, isu nasional yang dapat mempengaruhi daerah di Indonesia seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.63
Isu Nasional



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

- Penerapan standar *sustainability* adalah usaha untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berlangsung seimbang dan berkelanjutan.

Di Indonesia, penerapan standar ini menjadi semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan sosial. Salah satu isu ini adalah terkait dengan produk ramah lingkungan.

Peningkatan dan perluasan serta pengembangan produk yang ramah lingkungan ini perlu digencarkan agar produk dalam negeri dapat kompetitif di pasar global.

- Transisi energi sangat diperlukan untuk mendorong pemerataan terutama di luar Pulau Jawa. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan investasi, dan peningkatan kesadaran, Indonesia dapat berhasil dalam transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan, memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Tantangannya adalah ketergantungan akan energi fosil masih tinggi, akses teknologi masih terbatas, dan kesadaran serta pendidikan mengenai manfaat energi terbarukan di kalangan masyarakat dan pelaku industri masih kurang.
- *Aging population* yang melanda negara-negara maju dunia merupakan potensi bagi Indonesia untuk mengembangkan pariwisata kesehatan lanjut. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu tujuan utama pariwisata kesehatan di dunia, menawarkan layanan medis berkualitas tinggi dengan biaya yang kompetitif dan pengalaman pariwisata yang kaya. Namun upaya untuk itu menghadapi tantangan yang kompleks mengingat kompetisi regional cukup ketat dan negara-negara tersebut relatif lebih mapan dalam pariwisata kesehatan.
- Sinkronisasi kebijakan makro dengan sektoral perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional. Sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan makro yang berskala luas dan kebijakan sektoral yang lebih spesifik untuk sektor-sektor tertentu untuk mengurangi efisiensi ekonomi dan menghambat pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menyebabkan ketimpangan dan tidak merata, menghambat upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, kurangnya sinkronisasi dapat mengurangi daya saing Indonesia di pasar global.

- Dampak hilirisasi menunjukkan kemajuan positif bagi perekonomian Indonesia. Indonesia sangat mendorong hilirisasi untuk memperkuat ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dalam beberapa tahun terakhir. Hilirisasi yang merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk mentah melalui pengolahan dan manufaktur di dalam negeri sebelum diekspor akan menjadi isu penting ke depannya.

2.3.2.3 ISU REGIONAL JAWA BARAT

Isu regional merujuk pada masalah atau tantangan yang secara khusus mempengaruhi suatu wilayah (misal dalam batas administrasi provinsi) dan memerlukan perhatian serta tindakan dari pemerintah provinsi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Isu-isu ini bisa berbeda-beda antarprovinsi, tergantung pada kondisi geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan lingkungan dari provinsi tersebut. Berdasarkan identifikasi, isu regional Jawa Barat untuk 5 tahun ke depan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.64
Isu Regional Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025

- Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih terjadi. Pembangunan tersebut lebih berorientasi di wilayah utara dan tengah. Kondisi demikian menyebabkan konektivitas di wilayah selatan belum optimal terkoneksi dengan seluruh wilayah. Hal ini diperburuk dengan penyediaan infrastruktur dasar yang juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah.

- Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan yang kompleks. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif dan terpadu. Untuk itu diperlukan fokus pada kebijakan yang tepat sasaran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan.
- *Mismatch* pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) adalah masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial. *Mismatch* ini memerlukan tindakan kolaboratif. Dengan upaya yang tepat, seperti reformasi kurikulum, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan program vokasional, dan peningkatan kerja sama antara pendidikan dan industri, Provinsi Jawa Barat akan dapat mengatasi masalah ini dan menciptakan tenaga kerja yang lebih siap dan kompetitif.
- Pemanfaatan teknologi di Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun ke depan memiliki potensi besar untuk mendorong perkembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat daya saing regional. Dengan fokus pada transformasi digital, peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan yang tepat, Jawa Barat dapat menjadi pusat inovasi teknologi dan ekonomi digital yang berkelanjutan.
- Degradasi lingkungan adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi Provinsi Jawa Barat, mengingat pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi, dan aktivitas industri. Deforestasi dan kerusakan hutan, polusi air dan udara, pengelolaan sampah, dan perubahan iklim dapat menimbulkan dampak signifikan jika tidak ditangani dengan serius. Dengan penerapan kebijakan yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan inovasi teknologi, Provinsi Jawa Barat tentunya dapat mengatasi tantangan ini sehingga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang dapat terjaga.
- Kerentanan dan potensi bencana di Provinsi Jawa Barat memerlukan perhatian serius dan tindakan mitigasi yang komprehensif.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana alam. Dengan upaya yang tepat, termasuk penguatan infrastruktur, peningkatan sistem peringatan dini, pendidikan dan latihan kesiapsiagaan bencana, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Provinsi Jawa Barat tentunya akan dapat mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana dalam lima tahun ke depan.

2.3.3 ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG (2025-2045) KOTA SUKABUMI

Berdasarkan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045, isu strategis jangka panjang Kota Sukabumi seperti pada gambar berikut.



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045

- Investasi dan optimalisasi potensi ekonomi. Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan membawa pengaruh terhadap Kota Sukabumi. Aksesibilitas yang memadai dan terkoneksi langsung dengan Jakarta akan menjadi pilihan menarik bagi pengembangan investasi terutama di sektor riset dan teknologi serta pusat agrobisnis dan perdagangan. Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan ke depannya.
- Penduduk usia produktif dan kualitas SDM. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif di Kota Sukabumi perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar.

Hal ini merupakan tantangan besar bagi Kota Sukabumi untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi dengan perbaikan kualitas SDM eksisting, penyiapan SDM (usia dini, anak-anak, dan remaja) yang akan mengambil peran ke depannya dan penyediaan layanan sosial bagi penduduk usia lanjut.

- Ketimpangan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan Kota Sukabumi yang lebih berorientasi di wilayah utara menyebabkan wilayah selatan belum berkembang optimal. Adanya rencana pemindahan pusat pemerintahan dan adanya Tol Bocimi khususnya seksi-4 merupakan peluang untuk mengembangkan wilayah. Infrastruktur kota yang ramah lingkungan, terintegrasi, dan memanfaatkan teknologi menjadi tuntutan yang harus disediakan sebagai antisipasi perkembangan kota yang masif.
- Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kota Sukabumi yang berada di kaki gunung dan tekanan pembangunan yang makin masif memerlukan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Ancaman perubahan iklim dan ketahanan pangan perlu diantisipasi sejak dini. Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana juga perlu peningkatan.
- Perlindungan sosial dan penguatan budaya lokal. Modernisasi dan urbanisasi di Kota Sukabumi berimplikasi pada persoalan sosial masyarakat yang makin meningkat. Kondisi demikian diperparah dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah menyasar seluruh wilayah sehingga ancaman degradasi moral dan budaya lokal tak dapat dihindarkan.
- Tata kelola pemerintahan modern dan inovatif. Tuntutan perkembangan Kota Sukabumi berimplikasi pada pengelolaan pelayanan publik yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

2.3.4 ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH (2025-2029) KOTA SUKABUMI

Berdasarkan permasalahan pembangunan, isu sesuai konteks, isu RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dan mempertimbangkan potensi daerah, maka rumusan isu strategis untuk 5 tahun ke depan seperti berikut:

Gambar 2.66
Isu Strategis Jangka Menengah Kota Sukabumi



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025

1.	Pengembangan SDM dan Keterampilan Masyarakat Berbasis Vokasi
----	--

Kota Sukabumi tidak memiliki sumber daya alam sehingga modalitas utama dalam pembangunan bertumpu pada SDM yang dimilikinya. SDM yang ada saat ini rata-rata masih setara dengan lulusan SMP/ sederajat dan kondisi kesehatan masyarakat yang diukur dari UHH capaiannya masih di bawah kota lain di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, penyiapan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif diperlukan untuk memperkuat modalitas pembangunan dan sebagai fondasi untuk transformasi sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM.

2.	Masyarakat Inklusif, Berbudaya, dan Religius
----	--

Sebagai kota yang masyarakatnya heterogen, Kota Sukabumi perlu untuk meningkatkan inklusivitas masyarakatnya. Penghargaan dan pengakuan atas keberadaan atau eksistensi dari perbedaan dan keberagaman itu membutuhkan perlakuan yang setara, tidak diskriminasi, dan tidak diperlakukan semena-mena.

Perlakuan tersebut terutama ditujukan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. Di sisi lain, modernisasi dan urbanisasi di Kota Sukabumi berimplikasi pada persoalan sosial masyarakat yang makin meningkat. Kondisi demikian diperburuk dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah menyasar seluruh wilayah sehingga ancaman degradasi moral dan budaya lokal tak dapat dihindarkan. Untuk itu diperlukan penguatan budaya dan moralitas agar citra kota yang dikenal sebagai Kota Santri dapat dipertahankan.

3.	Ekonomi Kreatif dan Perluasan Lapangan Kerja
----	--

Kota Sukabumi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai itu diperlukan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik investor, pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada industri kreatif dan pariwisata, dan pengembangan pusat pelayanan dan pertumbuhan baru agar potensi ekonomi kota dapat dimaksimalkan dan lebih merata.

4.	Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan
----	--

Optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sukabumi sangat diperlukan di tengah perkembangan kota yang masif disertai dengan ancaman bencana dan perubahan iklim. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh pada daya dukung lingkungan terutama air dan pangan. Sementara pembangunan kota terutama pengembangan infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur perkotaan lainnya akan tetap diperlukan namun ke depannya diarahkan kepada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Hal tersebut akan disertai dengan upaya mendorong transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

5.	Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas
----	--------------------------------------

Peningkatan tata kelola pemerintahan berkualitas diperlukan mengingat Reformasi Birokrasi yang dilakukan masih bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat dituntut lebih prima seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi ini perlu dioptimalkan dalam sistem pemerintahan mengingat penerapannya masih di bawah kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, peningkatan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan secara simultan dengan penguatan peran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

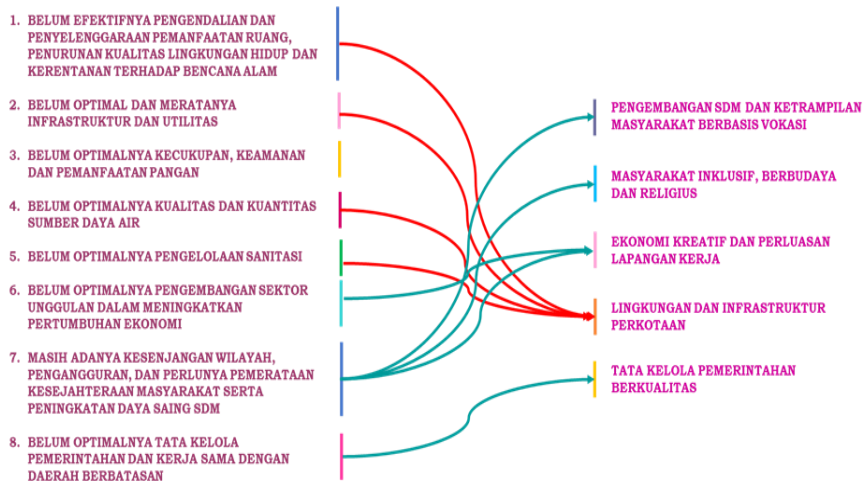
2.3.5 KETERKAITAN ISU STRATEGIS KOTA SUKABUMI DENGAN HASIL REKOMENDASI KLHS

Isu strategis Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, dalam proses perumusannya juga mempertimbangkan hasil rekomendasi KLHS yang telah dilakukan. Isu rekomendasi KLHS tersebut antara lain:

1. Belum efektifnya pengendalian dan penyelenggaraan pemanfaatan ruang, penurunan kualitas lingkungan hidup dan kerentanan terhadap bencana alam;
2. Belum optimal dan meratanya infrastruktur dan utilitas;
3. Belum optimalnya kecukupan, keamanan dan pemanfaatan pangan;
4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya air;
5. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi;
6. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
7. Masih adanya kesenjangan wilayah, pengangguran, dan perlunya pemerataan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing SDM; dan
8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama dengan daerah berbatasan.

Keterkaitan isu hasil rekomendasi KLHS dengan isu strategis Kota Sukabumi seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.67
Keterkaitan Isu Strategis dengan Rekomendasi KLHS



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Tabel 2.46
Pemetaan Isu Strategis Kota Sukabumi

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG KOTA SUKABUMI	ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH KOTA SUKABUMI
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribusi penduduk belum merata ▪ Belum adanya perubahan paradigma terkait bonus demografi ▪ Belum optimalnya pengelolaan SDM terintegrasi ▪ Kesenjangan distribusi kekayaan di masyarakat yang relatif tinggi ▪ IPM untuk skala kota tahun 2024 masih cukup rendah dibanding kota lain di Provinsi Jawa Barat ▪ Perlunya penguatan dan pendampingan di beberapa puskesmas untuk meningkatkan IKS ▪ belum merata dan tercukupinya SDM kesehatan ▪ Umur Harapan Hidup, masih di bawah kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat ▪ Indeks Pembangunan Keluarga masuk kategori siaga ▪ Indeks Perlindungan Anak termasuk rendah ▪ Ruang-ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan masih ter ▪ Rendahnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga ▪ Rata-rata pendidikan masyarakat setara dengan tamatan SMP atau sederajat ▪ Kemampuan numerasi siswa masih dalam kategori sedang ▪ Budaya literasi masyarakat mengalami penurunan ▪ Konflik sosial di masyarakat masih sering terjadi 	Polarisasi sosial	<i>Aging population</i>	<i>Mismatch pendidikan-DUDI</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penduduk usia produktif dan kualitas SDM ▪ Perlindungan sosial dan penguatan budaya lokal 	<p>Pengembangan SDM dan Ketrampilan Masyarakat Berbasis Vokasi</p> <hr/> <p>Masyarakat inklusif, berbudaya dan religius</p>

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG KOTA SUKABUMII	ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH KOTA SUKABUMII
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban ▪ Rendahnya kontribusi PDRB Kota Sukabumi terhadap Provinsi Jawa Barat ▪ PDRB per Kapita termasuk rendah dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat ▪ Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital dalam perekonomian kota ▪ Adanya kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita di wilayah utara-selatan ▪ Ekosistem digital belum terbangun dengan baik ▪ Belum optimalnya kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan SDM kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krisis sumber daya alam ▪ <i>Cyber insecurity</i> ▪ Disrupsi teknologi 	Dampak hilirisasi	Pemanfaatan teknologi	Investasi dan optimalisasi potensi ekonomi	Ekonomi kreatif dan perluasan lapangan kerja
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan untuk permukiman cukup besar ▪ Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik ▪ Kualitas lingkungan hidup cenderung stabil di angka 60 ▪ Risiko gempa bumi, banjir, dan tanah longsor masih cukup besar ▪ Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk ke dalam kelas kapasitas sedang ▪ Konektivitas antarwilayah agar memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan ▪ Masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur ▪ Belum optimalnya penyediaan air minum ▪ Belum optimalnya pengelolaan air limbah ▪ Belum optimalnya pengelolaan persampahan 	Iklim dan <i>biodersity</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan standar <i>sustainability</i> ▪ Transisi energi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Degradasi lingkungan ▪ Kerentanan dan potensi bencana ▪ Kesenjangan pembangunan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lingkungan hidup dan ketahanan bencana ▪ Ketimpangan wilayah dan pembangunan infrastruktur 	Lingkungan dan infrastruktur perkotaan

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG KOTA SUKABUMII	ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH KOTA SUKABUMII
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan Reformasi Birokrasi masih bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi ▪ Indeks SPBE masih terendah jika dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat ▪ Perlunya peningkatan pelayanan publik karena Indeks Pelayanan Publik mengalami penurunan 		Sinkronisasi kebijakan makro-sektoral			Tata kelola pemerintahan berkualitas

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2025

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD. Selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Visi Pembangunan Jangka Panjang Jawa Barat, Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 yaitu: “Kota Sukabumi Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dimaknai sebagai berikut:



Kreatif. Kota Sukabumi tidak dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Potensi yang dapat dioptimalkan tentunya bertumpu pada sumber daya manusianya. Kota yang sumber daya manusianya memiliki kreativitas yang tinggi dapat menciptakan atau mengembangkan sesuatu dalam rangka menangani permasalahan dan tantangan kehidupan. Di tahun 2045, Kota Sukabumi diharapkan sudah menjadi kota yang menekankan pengembangan dan promosi ekonomi kreatif, seni, budaya, dan inovasi. Ini tentunya melibatkan pembangunan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri kreatif. Tujuannya adalah menciptakan kota yang dinamis, beragam, dan inovatif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, ekspresi budaya, dan kolaborasi antar sektor.



Unggul. Kota Sukabumi diharapkan menjadi kota yang maju dengan sumber daya manusia, infrastruktur, layanan, dan ekonomi yang mempunyai kelebihan atau lebih baik dibanding dengan daerah lainnya. Dengan keunggulan itu, Kota Sukabumi dapat menawarkan kesempatan kerja yang variatif, sistem pendidikan yang bagus, infrastruktur transportasi yang memadai, serta layanan kesehatan dan fasilitas umum yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, Kota Sukabumi akan menjadi pusat ekonomi, budaya, dan inovasi bagi wilayah sekitar.

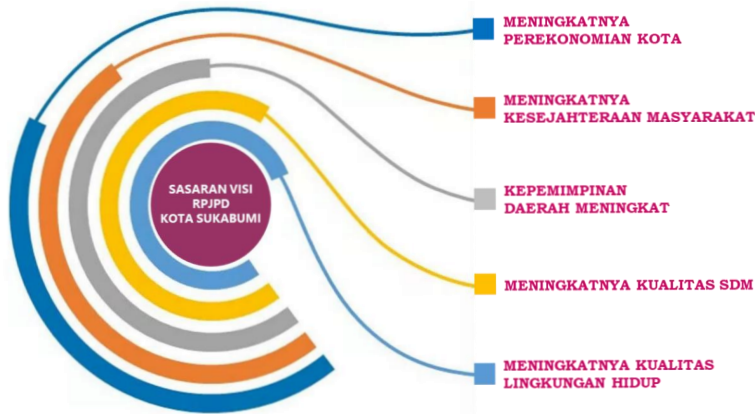


Berbudaya. Kota Sukabumi diharapkan menjadi kota berbudaya yang masyarakatnya memiliki pikiran, perasaan, akal budi dan budaya yang sudah maju. Kota berbudaya tersebut didukung dengan adanya keanekaragaman etnis dan budaya, warisan sejarah dan arsitektur, seni dan budaya kontemporer, pendidikan dan literasi yang mendukung perkembangan budaya, keragaman kuliner, partisipasi yang tinggi dari berbagai komunitas serta masyarakatnya yang kental dengan perilaku religius.



Berkelanjutan. Kota Sukabumi diharapkan mengusung konsep pembangunan kota yang berfokus pada kelestarian, keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan bagi generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Ini mencakup upaya untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, mempromosikan transportasi berkelanjutan, mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif bagi masyarakat.

Gambar 3.1
Sasaran Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah)

Gambar 3.2
Sasaran Pokok RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (diolah)

Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 seperti pada gambar di atas merupakan gambaran ketercapaian Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045. Berdasarkan kedua hal tersebut dan disandingkan dengan isu strategis jangka menengah Kota Sukabumi maka rumusan keadaan/kondisi Kota Sukabumi tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis”.

Gambar 3.3
Visi Kota Sukabumi Tahun 2025-2029



Sumber: Naskah Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Penjelasan visi di atas adalah sebagai berikut:



Inovatif menekankan pentingnya kreativitas dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kondisi ini akan tergambar dengan:

- Terintegrasikannya teknologi terbaru dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik;
- Diadopsinya metode baru untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan;
- Berkembangnya ide-ide baru dari semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat untuk solusi yang lebih baik;
- Tersedianya pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam teknologi dan inovasi;
- Terciptanya lingkungan yang mendukung pengembangan produk, layanan, atau teknologi baru yang inovatif dan usaha kecil dengan berbagai akses ke sumber daya dan teknologi; dan
- Terjalinnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian dalam pengembangan solusi baru untuk masalah lokal.



Mandiri berfokus pada kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Kondisi ini akan tergambar dengan:

- Meningkatnya kewirausahaan lokal dan ekonomi kreatif;
- Terkelolanya sumber daya alam dan manusia secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang tanpa mengandalkan bantuan eksternal;
- Tersedianya pelatihan keterampilan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah secara mandiri; dan
- Terfasilitasnya masyarakat untuk mengatasi tantangan secara efektif tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.



Agamis berarti menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Kondisi ini akan tergambar dengan:

- Disusunnya berbagai kebijakan yang sejalan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat;
- Diterapkannya prinsip-prinsip etika dan moral yang diambil dari ajaran agama dalam tindakan dan keputusan pemerintah;
- Dijaminnya kebebasan beragama dan terjaganya kerukunan antar umat beragama;
- Terbangunnya dan terpeliharanya fasilitas ibadah serta terdukungnya kegiatan keagamaan yang positif; dan
- Berkembangnya perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dalam interaksi sosial dan pelayanan publik.



Nasionalis berfokus pada cinta tanah air dan kepentingan nasional. Kondisi ini tergambar dengan:

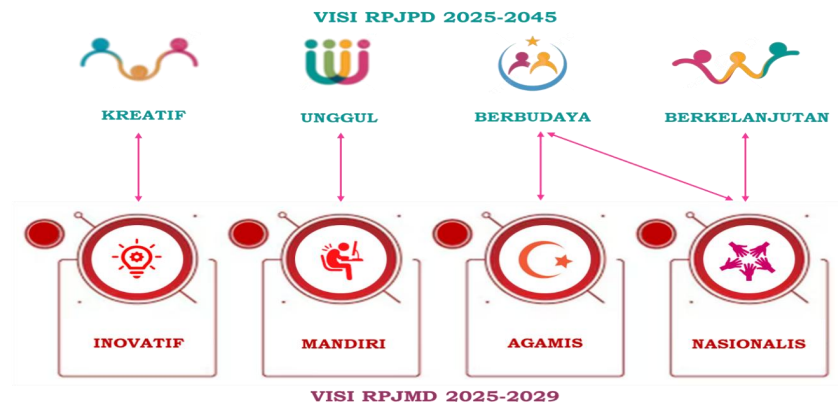
- Ditematkannya kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- Tergalangnya semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat untuk memperkuat identitas nasional;
- Dipertahankannya dan dipromosikannya budaya serta tradisi lokal yang merupakan bagian dari kekayaan nasional; dan
- Teredukasinya masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Korelasi antara Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi dengan Visi Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 terletak pada masing-masing aspek yang saling melengkapi dan memperkuat. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota “Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis” mendukung pencapaian visi jangka panjang “Kota Sukabumi Kreatif, Unggul, Berbudaya, dan Berkelanjutan”.

Dengan mempromosikan inovasi dan kreativitas, masyarakat diharapkan lebih siap untuk berkontribusi pada pengelolaan kota yang unggul. Kemandirian masyarakat memperkuat upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan. Nilai-nilai agama yang sejalan dengan budaya lokal akan menciptakan harmoni sosial. Semangat nasionalis akan mendukung pelaksanaan kebijakan berkelanjutan dalam menjaga sumber daya untuk generasi mendatang. Karena itu, semua elemen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan kota yang unggul dan sejahtera. Selanjutnya melalui pencapaian-pencapaian tersebut akan bisa mewujudkan mimpi besar bersama yaitu “Sukabumi Kota Bercahaya”.

Sinergitas Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.4
Sinkronisasi Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2025-2029



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

3.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi untuk mencapai Visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis” adalah:



1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi bertujuan untuk mempersiapkan warga kota dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mempromosikan kesempatan kerja yang lebih baik. Adapun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga kota mendapatkan akses yang efektif, efisien, dan berkualitas terhadap layanan kesehatan.



2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum

Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan penuh rasa saling menghargai. Sikap saling menghargai dengan mempromosikan toleransi dan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat tersebut akan memperkuat kohesi dan integrasi sosial. Hal ini didukung dengan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum untuk menjaga kondusif kota dan juga untuk menjaga iklim investasi.



3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata

Pengembangan ekonomi kreatif bertujuan untuk memanfaatkan potensi kreativitas dan inovasi dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing kota. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari pengembangan pariwisata yang lebih diarahkan pada industri MICE (*Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions*).



4. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik

Peningkatan kualitas lingkungan hidup ditujukan agar prinsip keberlanjutan menjadi arus utama dalam pembangunan mengingat ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim semakin nyata terjadi.

Sementara itu, pengembangan infrastruktur ditujukan agar masyarakat memiliki akses yang adil terhadap kebutuhan dasar serta peluang untuk pengembangan kehidupan yang lebih baik.



5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas

Penguatan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan didukung aparatur yang profesional, birokrasi yang transparan dan akuntabel, sistem pemerintahan berbasis digital, dan tata kelola yang inovatif.

Kelima misi di atas adalah rumusan upaya yang akan dijalankan dalam mencapai Visi RPJMD. Misi RPJMD tersebut juga mempunyai korelasi dengan misi RPJPD yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian maka sebenarnya seluruh upaya yang nantinya akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Sukabumi mempunyai keselarasan dan keterhubungan sehingga diharapkan dapat saling mendukung dalam mewujudkan Visi RPJPD maupun RPJMD. Keselarasan misi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.5
Sinkronisasi Misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

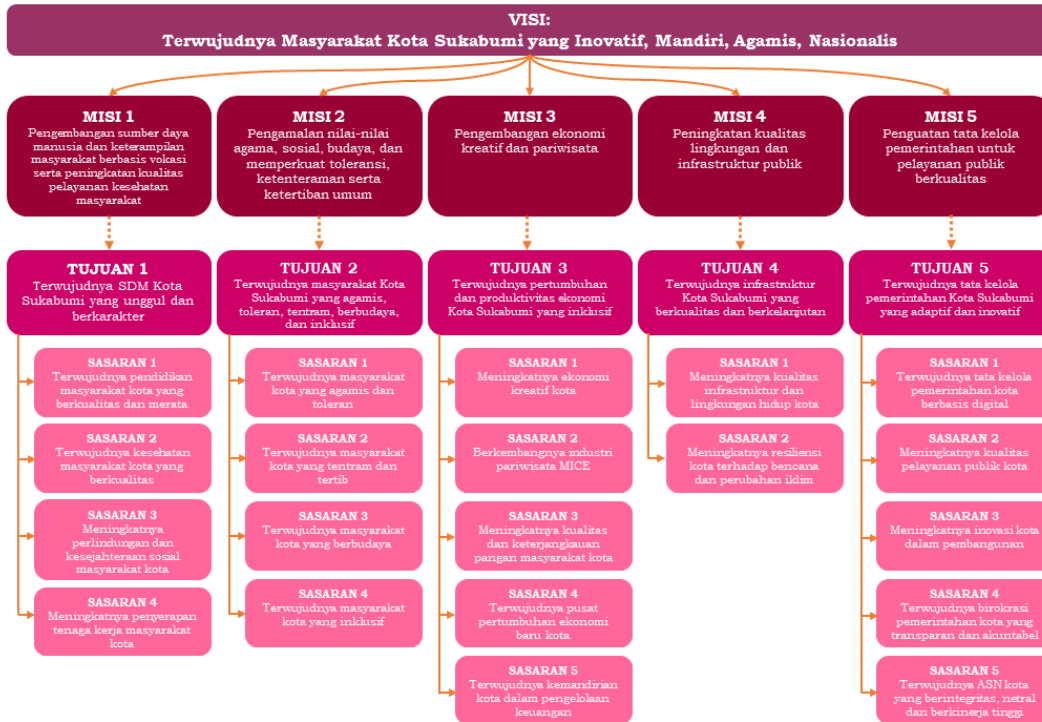


Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

3.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan diturunkan dari Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi selama lima tahun ke depan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.6
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025-2030



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Tabel 3.1
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<p>Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis"</p> <p>Misi: 1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat</p> <p>2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum</p> <p>3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata</p>	Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	77,69	78,19	78,31	79,82	80,58	81,36	82,17	
		Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	Indeks Pendidikan (Poin)	72,43	73,63	74,41	75,19	75,98	76,76	77,54	
		Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,11	75,31	75,52	75,73	75,94	76,15	76,36	
		Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	Tingkat Kemiskinan (Persen)	7,20	6,36 7,02	5,99 6,40	5,19 5,87	4,23 5,06	3,11 4,19	2,72 3,72	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	8,34	7,84 - 8,54	8	7,11 - 7,63	7,05 - 7,67	6,98 - 7,71	6,88 - 7,37	
	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, berbudaya, dan inklusif		Indeks Rasa Aman (Poin)	75,40	77,43	77,98	78,53	79,08	79,63	80,18	
		Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	78,16	79,00	79,27	79,55	79,82	80,09	80,36	
		Terwujudnya masyarakat kota yang tentram dan tertib	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Poin)	75	76	77	78	79	80	81	
		Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Indeks Warisan Budaya (Poin)	38,85	38,85	38,95	39,05	39,15	39,25	39,35	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik 5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas		Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Poin)	56,5	60,1	61,5	62,8	64,1	65,3	66,4	
	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif		PDRB Per Kapita (Juta Rp)	44,76	45,29 45,65	50,38 51,02	54,02 55,77	57,92 60,72	62,09 66,24	66,78 72,99	
		Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Indeks Kota Kreatif (Poin)	87,86	87,86	88,53	89,21	89,88	90,56	91,23	
		Berkembangnya industri pariwisata MICE (<i>Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions</i>)	Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Persen)	3,26	3,29	3,36	3,44	3,53	3,61	3,70	
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	80,90	81	81,25	81,50	81,75	82	82,25	
		Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru (Persen)	0	0	25	30	35	40	50	
		Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Persen)	2,47	10	12	14	16	18	20	
	Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni (Poin)	65,74	66,75	67,74	68,75	69,74	70,75	71,74	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	87,37	88,37	88,4	88,43	88,48	88,53	88,58	
		Meningkatnya resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (Skor)	77,56	75,56	73,56	71,55	70,53	69,51	68,50	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota		Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	BB	BB	BB	A	A	A	A	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Sukabumi yang adaptif dan inovatif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Poin)	3,79	3,83	3,87	3,90	3,94	3,97	4,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,18	4,25	4,30	4,35	4,40	4,45	4,50	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	87,20	87,50	88,00	88,30	88,50	89,00	90,00	
		Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (Kategori)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General) (Poin)	76,36	78	80	81	82	83	84	
		Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	Indeks Sistem Merit (Poin)	0,78	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	

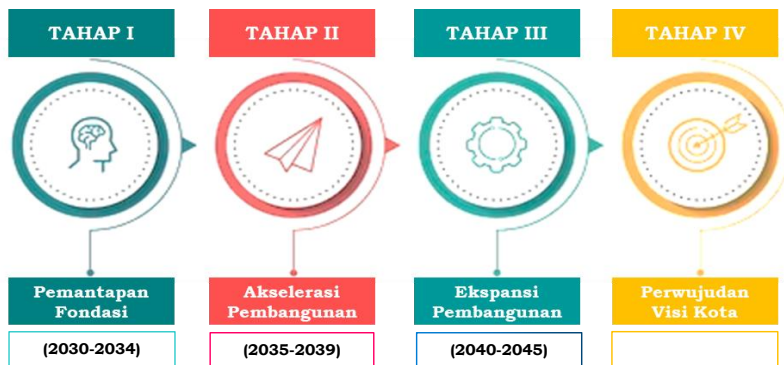
Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

3.4 STRATEGI

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam menyusun strategi dan penahapan pembangunan, selain memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD juga memedomani arah kebijakan dan fokus penahapan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 terutama pada tahap pertama yaitu pemantapan fondasi.

Gambar 3.7
Pentahapan Pembangunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045

Tahap pertama adalah pemantapan fondasi. Pemantapan fondasi ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan periode lalu dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal sebagai modalitas pembangunan ke depan. Fokus yang dilakukan pada tahap pertama seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.8
Fokus Pemantapan Fondasi (2025-2029)



Sumber: RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045

Berdasarkan data-data di atas, maka telah disusun penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan yang dimulai dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Penahapan pembangunan ini selanjutnya akan dijadikan prioritas pembangunan dalam setiap tahun anggaran selama lima tahun ke depan.

Tabel 3.2
Penahapan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan akses pendidikan dan kesehatan • Peningkatan nilai-nilai agama, sosial dan budaya • Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dan normalisasi PAD • Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan • Peningkatan toleransi dan kohesi sosial • Peningkatan jumlah SDM ekonomi kreatif serta penguatan BLUD dan BUMD • Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pendidikan vokasi • Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat • Peningkatan kualitas SDM ekonomi kreatif serta pengembangan BLUD dan BUMD • Peningkatan infrastruktur pendukung kenyamanan kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan vokasi • Peningkatan rasa aman kota • Perluasan pasar produk kreatif serta peningkatan PAD • Peningkatan pengembangan infrastruktur hijau 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyerapan tenaga kerja • Peningkatan stabilitas rasa aman kota • Peningkatan daya saing ekonomi kreatif serta optimalisasi PAD • Peningkatan pemerataan infrastruktur berkualitas

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kapasitas ASN	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan layanan publik berbasis digital	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan tata kelola pemerintahan modern

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Lokus pengembangan Kota Sukabumi berdasarkan RTRW Tahun 2022-2042, terdiri dari:

1. Pengembangan struktur ruang kota, dengan fokus pada:
 - a. Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan lainnya secara optimal, dengan strategi:
 - 1) Membagi wilayah kota menjadi 2 (dua) PPK yang terdiri dari PPK Cikole dan PPK Cibereum;
 - 2) Membentuk pusat kegiatan pariwisata, perdagangan kota, pendidikan, dan kesehatan secara berhierarki.
 - b. Peningkatan aksesibilitas dan transportasi, dengan strategi:
 - 1) Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan, memudahkan pergerakan serta distribusi antar wilayah;
 - 2) Menyempurnakan dan meningkatkan tingkat pelayanan jaringan transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
 - 3) Mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, terminal barang dan halte;
 - 4) Meningkatkan pelayanan rute angkutan umum dan transportasi wisata.
 - c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana, dengan strategi:
 - 1) Mengembangkan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 - 2) Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat kegiatan;

- 3) Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru;
- 4) Mengembangkan sarana dan prasarana energi pada pusat kegiatan baru;
- 5) Meningkatkan pemerataan pelayanan air minum di wilayah kota;
- 6) Mengembangkan pengolahan sampah setempat per-wilayah melalui teknologi yang berwawasan lingkungan guna mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir;
- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah;
- 8) Menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi;
- 9) Mengembangkan jalur pejalan kaki;
- 10) Mengembangkan jalur sepeda;
- 11) Mengembangkan jalur evakuasi bencana dan menyediakan lokasi-lokasi tempat evakuasi bencana.

2. Pengembangan pola ruang kota, dengan fokus pada:

- a. Pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan wilayah utara kota, dengan strategi:
 - 1) Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air dan mempertahankan keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya, potensi sumber daya kehidupan maupun keanekaragaman sumber genetiknya;
 - 2) Membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai khusus untuk kepentingan pariwisata yang tidak mengubah fungsi lindung;
 - 3) Mengelola kawasan lindung secara terpadu dan berkelanjutan;
 - 4) Melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung;
 - 5) Melestarikan dan merevitalisasi kawasan resapan air dan/atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air, kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya gerakan tanah.

b. Perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota, dengan strategi:

- 1) Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
- 2) Mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
- 3) Mengembangkan taman rukun warga, taman kelurahan dan taman kecamatan;
- 4) Mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan Masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH;
- 5) Memberikan Insentif kepada pemilik tanah yang ditetapkan sebagai RTH;
- 6) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi RTH dan ruang terbuka non hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan RTH;
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota guna mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan.

c. Pengendalian kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, dengan strategi:

- 1) Mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
- 2) Mengembangkan ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif;
- 3) Mengendalikan kegiatan industri agar tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan.

d. Pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, dengan strategi:

- 1) Mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
- 2) Membangun perkotaan yang didasarkan pada daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan;
- 3) Mengembangkan permukiman kepadatan rendah di kawasan rawan bencana;

- 4) Meremajakan dan merehabilitasi kawasan kumuh.
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dengan strategi:
 - 1) Mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 2) Memelihara dan menjaga aset pertahanan.
3. Pengembangan kawasan strategis kota, dengan fokus pada:
 - a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, dengan strategi:
 - 1) Mengembangkan Kawasan agrowisata dan kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata;
 - 2) Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - 3) Memberikan insentif dan stimulan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis ekonomi.
 - b. Kawasan strategis sosial budaya, dengan strategi:
 - 1) Mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional;
 - 2) Mengembangkan kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan strategi:
 - 1) Mempertahankan fungsi lindung di Kawasan sepanjang Sungai Cilandir dan hulu Sungai Cipeleng yang memiliki fungsi ekologis tinggi;
 - 2) Mengembangkan konsep ekowisata pada Kawasan sepanjang Sungai Cilandir dan hulu Sungai Cipeleng.

3.5 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026-2030

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan pusat pelatihan dengan memastikan kondisi yang memadai dan akses yang mudah ▪ Menyediakan beasiswa dan dukungan finansial untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan untuk memungkinkan lebih banyak warga kota mengikuti program vokasi ▪ Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran
2.	Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja ▪ Meningkatkan fasilitas pelatihan vokasi, seperti pusat pelatihan dan laboratorium, serta menyediakan peralatan yang diperlukan
3.	Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjalin kemitraan dengan perusahaan dan industri lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan merancang program pelatihan yang relevan
4.	Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan kesempatan magang dan penempatan kerja bagi peserta pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis dan mempermudah transisi ke dunia kerja
5.	Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan layanan konseling karir dan bimbingan untuk membantu individu memilih jalur vokasi yang sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat ▪ Membangun, memperbarui, atau memperbaiki fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar kesehatan yang baik dan mampu menangani kebutuhan kesehatan masyarakat ▪ Memastikan bahwa fasilitas kesehatan tersedia dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat dengan standar pelayanan prima ▪ Menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh, termasuk pemeriksaan rutin, imunisasi, vaksinasi, dan pencegahan penyakit ▪ Mengadakan program kesehatan gratis dan memberikan bantuan untuk biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta menyediakan asuransi kesehatan daerah yang inklusif ▪ Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru ▪ Menyelenggarakan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit, pola hidup sehat, pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, dan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat ▪ Mengembangkan sistem manajemen data kesehatan yang efisien untuk melacak kesehatan masyarakat, memonitor tren penyakit, dan mengelola informasi pasien ▪ Menerapkan teknologi <i>telemedicine</i> untuk memungkinkan konsultasi kesehatan jarak jauh, terutama di daerah yang sulit dijangkau ▪ Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan melalui forum kesehatan dan konsultasi publik ▪ Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk melengkapi dan memperluas upaya kesehatan

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan rencana darurat dan respons cepat untuk situasi kesehatan krisis, seperti wabah penyakit atau bencana alam, untuk melindungi kesehatan masyarakat secara efektif ▪ Menyediakan pelatihan dan simulasi bagi tenaga kesehatan dan responden darurat untuk memastikan kesiapan dalam menangani situasi darurat ▪ Menyediakan berbagai program sosial untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu, seperti bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan layanan kesehatan sosial ▪ Menyediakan bantuan sosial langsung untuk keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas guna memenuhi kebutuhan dasar mereka ▪ Mendukung penyelenggaraan acara dan perayaan keagamaan serta memperkuat kerja sama antar umat beragama <p>35. Membangun dan memelihara tempat-tempat ibadah, termasuk pondok pesantren</p> <p>36. Menyediakan dan mendukung program pendidikan agama di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, termasuk pelatihan bagi pendidik agama</p> <p>37. Mengadakan kursus dan seminar tentang nilai-nilai agama yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan etika sosial</p> <p>38. Menciptakan forum untuk dialog antar umat beragama guna meningkatkan saling pengertian dan toleransi antar kelompok agama yang berbeda</p> <p>39. Mendorong kegiatan bersama yang melibatkan berbagai komunitas agama untuk membangun rasa kebersamaan dan toleransi</p> <p>40. Menyediakan layanan penyuluhan dan dukungan bagi masyarakat yang menghadapi masalah sosial, seperti kekerasan domestik, penyalahgunaan narkoba, dan masalah kesehatan mental</p> <p>41. Mengembangkan kebijakan yang memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas</p> <p>42. Menyelenggarakan program kesadaran tentang hak-hak sosial dan hukum untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketidakadilan</p> <p>43. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan komunitas untuk memperkuat solidaritas sosial</p> <p>44. Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk kelompok masyarakat dalam mengelola kegiatan sosial dan proyek-proyek komunitas</p> <p>45. Melindungi dan melestarikan warisan budaya lokal, seperti situs bersejarah, tradisi, dan seni, melalui program pemeliharaan dan restorasi</p> <p>46. Menyelenggarakan festival, pameran, dan acara budaya yang merayakan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal</p> <p>47. Mengintegrasikan pendidikan tentang budaya lokal dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran dan apresiasi sejak dini</p> <p>48. Menggunakan media lokal untuk mempromosikan budaya dan seni, serta menyediakan platform untuk seniman lokal dan kelompok budaya</p> <p>49. Membangun kerja sama dengan organisasi budaya, komunitas seni, dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan acara dan program budaya</p>

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>50. Mendorong pertukaran budaya dengan daerah lain atau negara lain untuk memperluas wawasan budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap keragaman</p> <p>51. Menyelenggarakan kampanye kesadaran dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan etnis</p> <p>52. Menggunakan media sosial, poster, dan materi kampanye untuk menyebarluaskan pesan-pesan tentang persatuan dan toleransi</p> <p>53. Membuat forum atau kelompok diskusi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk membahas isu-isu terkait keberagaman dan mencari solusi bersama</p> <p>54. Menyelenggarakan acara bersama, seperti festival budaya, hari besar keagamaan, dan kegiatan sosial yang melibatkan semua komunitas untuk membangun rasa saling pengertian</p> <p>55. Mendukung dan memfasilitasi acara budaya dan seni yang merayakan keberagaman, serta mempromosikan partisipasi masyarakat dalam acara-acara tersebut</p> <p>56. Mengintegrasikan pendidikan tentang keberagaman dan toleransi dalam kurikulum sekolah, serta menyediakan pelatihan bagi tenaga pendidik</p> <p>57. Menyediakan pelatihan dan <i>workshop</i> untuk masyarakat tentang keterampilan sosial, empati, dan cara menghadapi perbedaan dengan positif</p> <p>58. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program yang mempengaruhi kehidupan mereka, memastikan bahwa suara semua kelompok terdengar</p> <p>59. Memberdayakan masyarakat dan kelompok masyarakat termasuk para tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan pondok pesantren</p> <p>60. Mendukung organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lokal dalam kegiatan yang mempromosikan persatuan dan kerja sama antar kelompok</p> <p>61. Memberikan dukungan kepada inisiatif komunitas yang bertujuan untuk mempromosikan persatuan dan kesatuan, seperti program-program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lintas budaya</p> <p>62. Menyediakan pendanaan atau sumber daya bagi proyek-proyek yang mempromosikan keberagaman dan integrasi sosial</p> <p>63. Menyediakan layanan mediasi dan resolusi konflik untuk menyelesaikan perselisihan atau ketegangan yang mungkin timbul antara kelompok-kelompok masyarakat</p> <p>64. Mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk menangani kasus-kasus intoleransi atau diskriminasi dengan cepat dan adil</p> <p>65. Mengawasi situasi sosial dan memantau potensi konflik atau ketegangan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan</p> <p>66. Menegakkan hukum dan peraturan yang melarang diskriminasi dan kebencian berbasis ras, agama, atau etnis</p> <p>67. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga agama, dan kelompok budaya untuk mengimplementasikan program-program yang mendukung toleransi dan persatuan</p> <p>68. Membentuk jaringan kerja dengan berbagai pihak untuk memastikan koordinasi yang baik dalam upaya mempromosikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan</p>

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>69. Mengimplementasikan program pemberdayaan sosial yang fokus pada pengembangan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi kelompok rentan</p> <p>70. Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi keluarga yang mengalami masalah sosial, seperti kekerasan domestik atau ketergantungan narkoba</p> <p>71. Menyediakan program yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak</p> <p>72. Membentuk forum atau kelompok diskusi untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program-program kesejahteraan</p> <p>73. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, program kesejahteraan, dan pengambilan keputusan lokal</p> <p>74. Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga sosial untuk memperluas jangkauan program kesejahteraan dan memaksimalkan dampaknya</p> <p>75. Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung program-program sosial dan memberikan sumber daya tambahan</p> <p>64. Mendirikan atau mendukung pusat kreatif dan inkubator yang menyediakan ruang, peralatan, dan sumber daya untuk para pelaku ekonomi kreatif, seperti seniman, desainer, dan pengusaha kreatif</p> <p>65. Menyediakan ruang usaha yang terjangkau dan strategis untuk bisnis kreatif, termasuk studio seni, galeri, dan ruang kerja bersama</p> <p>66. Menyediakan akses ke pembiayaan, hibah, dan pinjaman dengan syarat yang fleksibel untuk mendukung <i>start-up</i> dan usaha kecil dalam sektor kreatif</p> <p>67. Menerapkan program insentif untuk mendorong investasi dan pengembangan bisnis di sektor ekonomi kreatif</p> <p>68. Menyediakan pelatihan keterampilan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam bidang seperti desain grafis, multimedia, seni, dan pemasaran digital</p> <p>69. Mengintegrasikan mata pelajaran terkait kreativitas dan inovasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi</p> <p>70. Memfasilitasi program mentoring dengan para ahli dan pelaku industri untuk membantu pengembangan bisnis dan keterampilan individu</p> <p>71. Menyediakan bimbingan karir untuk membantu individu memilih jalur karir di sektor kreatif dan mengembangkan portofolio mereka</p> <p>72. Menciptakan atau mendukung platform digital untuk memasarkan produk dan jasa kreatif secara lebih luas, baik secara lokal maupun global</p> <p>73. Menyelenggarakan event, pameran, dan festival kreatif untuk memperkenalkan produk dan jasa kepada publik dan calon pembeli</p> <p>74. Mengembangkan <i>branding</i> kota sebagai pusat ekonomi kreatif untuk menarik perhatian investor, wisatawan, dan pelaku industri kreatif</p> <p>75. Mengadakan kampanye promosi untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi sektor kreatif di kota</p> <p>76. Membangun kemitraan dengan sektor swasta, perusahaan besar, dan lembaga keuangan untuk mendukung dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif</p> <p>77. Menyusun program bersama dengan perusahaan dan lembaga swasta yang dapat memberikan dukungan dan peluang bagi pelaku kreatif</p>

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>78. Menjalin kerja sama dengan kota-kota atau negara lain untuk pertukaran ide, teknologi, dan praktik terbaik di bidang ekonomi kreatif</p> <p>79. Mengikutsertakan pelaku kreatif dalam proyek internasional dan jaringan global untuk memperluas jangkauan dan peluang bisnis</p> <p>80. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mempermudah pendirian dan operasional usaha di sektor kreatif, serta mengurangi hambatan birokrasi</p> <p>81. Menyediakan dukungan dan perlindungan untuk hak kekayaan intelektual agar pelaku ekonomi kreatif dapat melindungi inovasi dan karyanya</p> <p>82. Menyediakan penyuluhan mengenai hak kekayaan intelektual dan hukum terkait untuk memastikan bahwa pelaku kreatif memahami dan dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang ada</p> <p>83. Memberikan bantuan dan pelatihan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal</p> <p>84. Menginisiasi proyek infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi</p> <p>85. Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk membuka peluang kerja dan menciptakan program magang atau pelatihan kerja</p> <p>86. Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, taman, dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup</p> <p>87. Menyediakan layanan dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah</p> <p>88. Menyelenggarakan program untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, termasuk penghijauan, pengurangan sampah, dan perlindungan sumber daya alam</p> <p>89. Menyediakan ruang publik dan fasilitas yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok untuk beraktivitas dan berkumpul secara aman dan nyaman</p> <p>90. Mengimplementasikan program pelatihan terstruktur untuk pegawai pemerintah kota dalam berbagai bidang, seperti manajemen, teknologi informasi, dan pelayanan publik</p> <p>91. Mendorong pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan, sertifikasi, dan program pengembangan profesional lainnya</p> <p>92. Menyusun standar operasional dan prosedur (SOP) untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan publik</p> <p>93. Menerapkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat</p> <p>94. Menyediakan kursus dan pelatihan khusus dalam kepemimpinan dan manajemen bagi pejabat tinggi dan manajer di pemerintahan kota</p> <p>95. Memfasilitasi program mentoring untuk mempersiapkan calon pemimpin dan meningkatkan keterampilan manajerial</p> <p>96. Mengembangkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan adil untuk menilai kontribusi pegawai serta memberikan umpan balik yang konstruktif</p> <p>97. Menyediakan sistem insentif dan penghargaan untuk memotivasi pegawai dan mendorong kinerja yang baik</p>

3.6 PROGRAM PRIORITAS

3.6.1 PROGRAM PRIORITAS KOTA SUKABUMI

Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome*. Pada perumusannya, penentuan program prioritas juga mempertimbangkan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi sebagaimana yang disampaikan pada saat kampanye.

Berdasarkan hasil analisis terhadap program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang telah dijanjikan saat kampanye, maka telah disepakati dan dikelompokkan menjadi 14 (empat belas) program unggulan sebagai berikut:

A. Misi 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Masyarakat Berbasis Vokasi serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat



1. Beasiswa Sarjana (Berbasis Kewilayahan dan Disabilitas)

Program unggulan pemberian beasiswa sarjana merupakan program beasiswa yang ditujukan untuk masyarakat Kota Sukabumi yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke tingkat Sarjana, namun memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi. Penentuan penerima beasiswa akan diatur dengan mekanisme yang sederhana, tepat sasaran dan selektif dengan melibatkan berbagai pihak untuk prosesnya. Pemberian beasiswa dilakukan untuk dua kategori yaitu:

a. Berbasis Kewilayahan

Penerima beasiswa akan diatur dengan mempertimbangkan unsur keadilan dari sisi asal wilayah penerima. Dalam implementasinya akan melibatkan pihak yang berwenang serta aparaturnya yang sangat memahami kondisi lapangan.

b. Kategori Disabilitas

Pemberian beasiswa untuk disabilitas adalah sangat penting untuk membantu individu disabilitas mencapai cita-cita mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja.

Beasiswa ini bukan hanya sekedar bantuan keuangan, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan dan dukungan terhadap hak-hak individu disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang lain. Dalam implementasinya, pemberian beasiswa ini akan melibatkan pihak terkait yang berwenang seperti: *Disabilitas Group Planner*, Institusi pendidikan luar biasa serta komunitas atau organisasi yang perhatian terhadap sahabat disabilitas. Hal tersebut untuk lebih memastikan bahwa pemberian beasiswa dapat tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat kepada sahabat disabilitas.



2. Pelatihan Vokasi melalui Optimalisasi BLK

Program unggulan optimalisasi BLK ini akan dilakukan melalui beberapa cara, seperti meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung, meningkatkan kualitas program pelatihan, memperbarui kurikulum, dan meningkatkan kualitas instruktur. Selain itu, BLK juga dapat bekerja sama dengan industri untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan optimalisasi BLK, pendidikan vokasi dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sehingga mereka dapat bersaing di dunia kerja yang semakin ketat.

Selain itu, optimalisasi BLK juga dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam jangka panjang, optimalisasi BLK dapat membantu meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya dan menjadi lebih mandiri.



3. Peningkatan Puskesmas (Layanan Puskesmas Gratis, *Homecare, Ambulance*)

Program unggulan peningkatan Puskesmas hadir untuk terus memastikan pentingnya keberadaan Puskesmas serta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas. Kondisi saat ini, masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, maka ketika mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar memerlukan pembiayaan. Ke depan, pemerintah harus hadir dalam memastikan warga Kota Sukabumi dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa biaya walaupun belum memiliki jaminan kesehatan, dengan catatan masyarakat tersebut dijadikan prioritas untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Sukabumi.

Selain itu melalui program unggulan ini pemerintah daerah juga harus bisa memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat di akses oleh masyarakat yang punya keterbatasan datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan *home care* serta *ambulance*. Melalui program ini petugas kesehatan akan hadir langsung ke setiap rumah masyarakat yang membutuhkan serta apabila memerlukan rujukan dapat langsung difasilitasi oleh pelayanan *Ambulance*.



4. Posyandu Ayeuna (Operasional Posyandu)

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama ibu dan anak. Posyandu menyediakan berbagai layanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan penanganan penyakit ringan. Namun, untuk menjalankan operasional posyandu, diperlukan anggaran yang memadai. Anggaran operasional posyandu digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti pembelian obat-obatan, peralatan kesehatan, dan biaya operasional lainnya.

Pemberian anggaran operasional posyandu sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, anggaran operasional posyandu memungkinkan posyandu untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Kedua, pemberian anggaran operasional posyandu juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Ketiga, pemberian anggaran operasional posyandu juga dapat membantu mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit. Dengan adanya posyandu yang berfungsi dengan baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan memperoleh penanganan yang tepat untuk berbagai penyakit.

B. Misi 2: Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial, Budaya dan Memperkuat Toleransi, Ketenteraman serta Ketertiban Umum



1. Sukabumi Kota Wakaf

Wakaf adalah salah satu konsep dalam Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Wakaf dapat berupa harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak berupa Uang, dan harta benda bergerak selain uang yang dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, bantuan modal usaha dan lain-lain.

Program unggulan “Sukabumi Kota Wakaf” adalah suatu konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan kota, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Program Kota Wakaf merupakan program pemberdayaan, pengembangan, dan pengelolaan harta benda wakaf berbasis kewilayahan dengan mengikutsertakan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan umum.

Dalam rangka menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, maka pemerintah daerah haruslah melakukan berbagai langkah dalam menuju cita-cita tersebut. Salah satu yang akan dilakukan sebagai tahap awal, adalah program Gerakan Wakaf Uang, dimana seluruh lapisan masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara dan dunia usaha dihimbau untuk melakukan wakaf uang sesuai kemampuan masyarakat. Gerakan Wakaf Uang ini dilaksanakan dengan tidak ada paksaan. Gerakan wakaf uang inilah yang nanti akan menjadi salah satu prasyarat utama dalam menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, dimana dalam implementasinya akan diatur lebih lanjut dengan aturan pelaksanaan.

Pengelolaan wakaf uang nantinya akan dilakukan oleh lembaga Nazhir Wakaf Uang yang kredibel dan menghindari terjadinya *conflict of interest*. Selanjutnya Nazhir Wakaf Uang akan melakukan pengelolaan yang hasilnya akan disalurkan manfaatnya kepada masyarakat Kota Sukabumi sesuai dengan akta ikrar dan ketentuan yang berlaku.



2. Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembangunan (Insentif Marbot, Guru Ngaji, RT, RW, dan Linmas)

Pembangunan di Kota Sukabumi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peranan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena mereka adalah subjek dan objek pembangunan itu sendiri. Dengan peranan masyarakat, pembangunan di Kota Sukabumi dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam bentuk ide, sumber daya, dan tenaga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat tersebut, maka diluncurkan sebuah program unggulan untuk memberikan apresiasi dan penguatan akan peran masyarakat dalam pembangunan.

Implementasinya adalah pemberian insentif kepada para RT, RW, Marbot/Pengurus Masjid, Guru Ngaji, serta Linmas yang selama ini senantiasa aktif memberikan sumbangsih kepada keberhasilan pembangunan di Kota Sukabumi.

Pemberian insentif ini dilakukan setiap bulan, dengan catatan unsur masyarakat tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membantu pemerintah sesuai bidangnya dan berdasarkan arahan atau ketentuan yang akan disampaikan dalam sebuah regulasi khusus. Sebagai salah satu contoh adalah keterlibatan para RT dan RW dalam mendukung program strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi.



3. Pusat Konseling Keluarga Ayeuna (Ponsel Ayeuna) (Konseling Ibu, Ayah, Anak, Remaja)

Pusat Konseling Keluarga Ayeuna merupakan sebuah program unggulan yang memfokuskan pada ketahanan keluarga dengan memberikan konsultasi gratis serta solusi-solusi bagi permasalahan keluarga untuk penduduk Kota Sukabumi. Melalui Pusat Konseling Keluarga Ayeuna, diharapkan dapat berperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga. Melalui program ini akan didapatkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, menyediakan layanan konseling yang profesional dan terintegrasi untuk membantu keluarga mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Kedua, menyediakan informasi dan edukasi tentang cara mengelola konflik dan masalah keluarga. Ketiga, membantu keluarga mengembangkan kemampuan dan strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi.

Keberadaan pusat konseling keluarga ayeuna ini diharapkan memiliki dampak positif pada masyarakat. Dengan adanya pusat konseling keluarga ayeuna, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah ke layanan konseling dan penanganan masalah keluarga. Hal ini dapat membantu mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, dan gangguan mental.

Selain itu, keberadaan pusat konseling keluarga juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara luas.



4. Pemuda Berdaya (optimalisasi peran dan anggaran kepemudaan)

Di tengah-tengah perubahan zaman yang cepat dan kompleks, peran pemuda menjadi sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara. Pemuda merupakan generasi penerus yang akan mewarisi tanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan negara di masa depan. Pemuda memiliki energi, kreativitas, dan idealisme yang tinggi, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam proses pembangunan. Program unggulan pemuda berdaya sangat relevan untuk mendukung peningkatan peran pemuda dalam pembangunan. Melalui program ini pemerintah daerah akan memberikan kesempatan kepada para pemuda di semua sektor untuk dapat berperan lebih besar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Melalui program unggulan ini pemerintah daerah akan memberikan kesempatan kepada pemuda seperti dalam hal menyusun sendiri perencanaan pembangunan versi pemuda yang fokus kepada peningkatan peran dan kualitas pemuda itu sendiri, selain itu peningkatan kualitas dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk sektor-sektor strategis bidang kepemudaan juga akan semakin diperhatikan. Dalam implementasinya akan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga yang menampung para pemuda di dalamnya. Selanjutnya ke depannya diharapkan peran pemuda dalam pembangunan dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kemajuan Kota Sukabumi, serta dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memajukan ekonomi, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

C. Misi 3: Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata



1. Menata Kebaikan *Tech*

Dalam era digital saat ini, mempromosikan produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada platform digital merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas, meningkatkan penjualan, dan memperluas jangkauan pasar. Untuk itulah maka program menata kebaikan *tech* hadir yang merupakan sebuah platform promosi gratis berbasis digital yang dilakukan melalui pembuatan *vlog reality*, *podcast* dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk dan di seleksi secara profesional yang berisikan kreator digital dan profesional lainnya sesuai bidang keahliannya, dengan tujuan untuk mempromosikan UKM, UMKM, pariwisata serta program unggulan dan kreatif yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Melalui program ini masyarakat atau komunitas yang mempunyai produk unggulan dan memerlukan pemasaran lebih jauh dapat dibantu untuk lebih diperkenalkan kepada masyarakat luas baik Kota Sukabumi maupun di luar Kota Sukabumi.

Selain itu program-program unggulan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta program-program prioritas lainnya di setiap Perangkat daerah ataupun dari lembaga lain dapat juga diperkenalkan melalui program ini, sehingga dapat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dan pada akhirnya akan lebih banyak masyarakat yang menerima manfaat dari berbagai program tersebut.



2. Dana Bergulir

Merupakan sebuah program yang menyiapkan dana untuk modal usaha yang pengelolaannya diserahkan kepada lembaga yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana yang disediakan untuk program ini difokuskan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan dengan terlebih dahulu dilakukan pembatasan jumlah pinjaman sesuai ketentuan.

Selanjutnya dana ini akan dikembalikan secara bertahap dan tidak memberatkan, dari masyarakat yang melakukan pinjaman kepada lembaga pengelola tersebut. Dengan demikian dana ini akan tetap tersedia atau kembali utuh, yang selanjutnya dapat dijadikan modal bergulir kembali untuk masyarakat yang lainnya. Kedepannya sangat memungkinkan jumlah pinjaman akan bisa menjadi lebih banyak dari pinjaman awal yang diberikan.

Melalui program unggulan ini diharapkan akan menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki potensi untuk menjadi wirausaha. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memperoleh akses ke modal usaha yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.

D. Misi 4: Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Publik



1. Infrastruktur Ayeuna (Stadion Bertaraf Nasional dan Infrastruktur Publik lainnya)

Pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi merupakan salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di kota ini. Infrastruktur utama yang harus jadi prioritas adalah yang berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan publik. Salah satunya adalah infrastruktur dalam mendukung kegiatan olahraga masyarakat.

Namun demikian kondisi hari ini fasilitas olahraga yang memadai dan memenuhi standar nasional masih sangat terbatas. Salah satunya adalah Stadion yang merupakan sebuah ikon dari pusat kegiatan olahraga di suatu wilayah. Oleh karena itu, maka pembangunan sebuah stadion olahraga berstandar nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung perkembangan dunia olahraga, serta mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik di Kota Sukabumi.

Program unggulan Infrastruktur Ayeuna melalui pembangunan stadion olahraga berstandar nasional bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi perkembangan olahraga, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam implementasinya pembiayaan program infrastruktur ini akan menggunakan berbagai pendekatan pembiayaan mulai dari PAD, dana transfer, investor, CSR serta dari berbagai sumber lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari pemerintah, swasta, serta masyarakat, Sukabumi dapat memiliki stadion yang menjadi kebanggaan bersama dan memberikan manfaat besar bagi semua pihak.



2. Layanan Ambulans Jenazah

Program unggulan Layanan Ambulans Jenazah hadir dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program ini masyarakat bisa mengakses layanan ambulans tanpa biaya dengan hanya menyampaikan permohonan kepada lembaga yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaannya.

Program unggulan layanan ambulans jenazah bukan sekadar kendaraan pengangkut, tetapi juga bentuk penghormatan terakhir bagi seseorang yang telah berpulang. Dengan adanya layanan ini, jenazah dapat dipindahkan dengan cepat dan dalam kondisi yang terjaga. Selain itu, layanan ini sangat membantu keluarga yang mungkin tidak memiliki akses kendaraan yang memadai untuk membawa jenazah. Terlebih lagi, dalam kasus tertentu seperti kecelakaan, pemulangan jenazah dari luar kota, atau kondisi medis tertentu, ambulans jenazah menjadi solusi yang sangat dibutuhkan.

E. Misi 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintah untuk Pelayanan Publik Berkualitas



1. Sukabumi Menyala (Layanan Publik Terintegrasi)

Di era digital saat ini, masyarakat menginginkan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Namun, seringkali layanan publik tersebar di berbagai platform, masing-masing dengan sistem dan prosedur yang berbeda. Menyatukan semua layanan publik dalam satu portal yang terintegrasi merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses semua layanan publik yang dibutuhkan dalam satu tempat, tanpa harus mengunjungi beberapa tempat yang berbeda.

Program unggulan Sukabumi Menyala difokuskan pada integrasi pelayanan publik yang ada di Kota Sukabumi sehingga terciptanya beberapa manfaat yaitu kemudahan akses, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta mendukung transformasi digital nasional.

Program ini tentu sangat sejalan dengan konsep smart city atau kota cerdas yaitu sebuah konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk dalam aspek pelayanan publik. Teknologi digunakan untuk mempercepat proses birokrasi, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



2. NGOPI (Ngobrol Happy bareng Wali Kota)

Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk selanjutnya bekerja melaksanakan janji politik yang sudah disampaikan. Setelah dilantik maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi milik masyarakat dan bertugas untuk menjahterakan masyarakat.

Untuk itu maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus mendengar secara langsung masukan, pendapat, keluhan dan permasalahan langsung dari masyarakat sehingga program kerja yang dilaksanakannya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam mengakomodir kebutuhan tersebut, maka program unggulan NGOPI (Ngobrol Happy bareng Wali Kota dan Wakil Wali Kota) hadir sebagai jembatan komunikasi antar masyarakat dengan pemimpinnya. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan berbasis kewilayahan serta juga dapat dilakukan dengan berbasiskan tematik tertentu.

Berdasarkan cascading kinerja yang dimulai visi dan mempertimbangkan program unggulan di atas, maka program prioritas Kota Sukabumi untuk 5 (lima) tahun ke depan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2026-2030

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET	
<p>Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik 	<p>Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter</p>	<p>Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata</p>		Indeks Pembangunan Manusia			
				Indeks Pendidikan			
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	<p>Program Pengelolaan Pendidikan</p>		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS) Jumlah Anak Usia 7 -18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan 			
				Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	
		<p>Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas</p>			Usia Harapan Hidup		
				Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat</p>	
				Meningkatnya kualitas pengendalian dan pencegahan penyakit	Angka Keberhasilan pengobatan TB		
				Meningkatnya kualitas layanan primer, rujukan dan laboratorium kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
			Meningkatnya kualitas perbekalan kesehatan dan pembiayaan kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kelurahan dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota		Tingkat Kemiskinan		
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota		Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensinya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif			Indeks Rasa Aman		
		Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran		Indeks Kerukunan Umat Beragama		
			Meningkatnya kualitas masyarakat kota yang agamis	Indeks Zakat Nasional Kota Sukabumi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya	Persentase Konflik antar Inter Umat Beragama yang Diantisipasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tentram dan Tertib		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
			Meningkatnya Penanganan Gangguan	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang terselesaikan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Trantibumlinmas di Kota Sukabumi			
		Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya		Indeks Warisan Budaya		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	
		Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif			PDRB Per Kapita		
		Meningkatnya ekonomi kreatif kota		Indeks Kota Kreatif		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UKM Menjalin Kemitraan	Program Pengembangan UMKM	
		Berkembangnya industri pariwisata MICE		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota		Indeks Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota		Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru		
			Meningkatnya investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
		Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
			Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan			Indeks Kota Layak Huni		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		
			Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya Ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan	Persentase Ketersediaan penerangan jalan umum yang terpelihara dan memenuhi standar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyediaan sistem air minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangan	Program Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya kualitas ruang publik	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Meningkatnya kualitas layanan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya kualitas layanan air limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Meningkatnya resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya ketahanan bencana Daerah	Persentase Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya pelayanan	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran dan	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan	

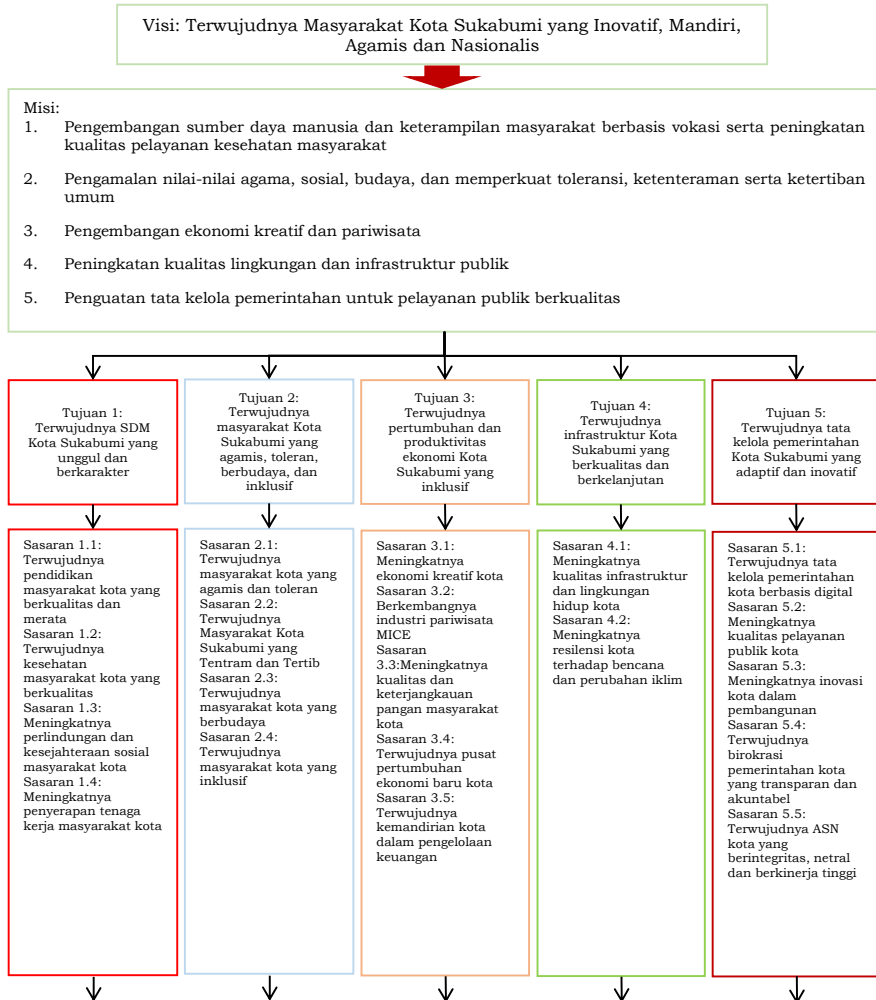
VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif		penyelamatan dan evakuasi korban <u>kebakaran</u>	Non Kebakaran Sesuai Standar Pelayanan	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Meningkatnya pengurangan emisi GRK	Emisi Co2 Equivalen	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Indeks Reformasi Birokrasi		
			Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
			Meningkatnya efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dokumen	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Program Pengelolaan Arsip	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	<ul style="list-style-type: none"> ● Indeks Pelayanan Publik ● Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota 		
			Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatkan kualitas peraturan daerah yang ditetapkan	Persentase Prolegda yang Ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan		Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General) Kota Sukabumi		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD ● Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra 	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Nilai rata-rata RB Perangkat Daerah yang melakukan pengukuran IRB-PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Nilai Laporan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Persentase Rekomendasi Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi		Indeks Sistem Merit		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah	

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab III di atas, maka dapat disimpulkan *logical framework* dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode Tahun 2025 - 2030 adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 3.9
Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode Tahun 2025 - 2030



<p>Outcome 1.1.1: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Dasar</p> <p>Outcome 1.1.2: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</p> <p>Outcome 1.1.3: Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional</p> <p>Outcome 1.2.1: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</p> <p>Outcome 1.2.2: Meningkatnya kualitas pengendalian dan pencegahan penyakit</p> <p>Outcome 1.2.3: Meningkatnya kualitas layanan primer, rujukan dan laboratorium kesehatan</p> <p>Outcome 1.2.4: Meningkatnya kualitas perbekalan kesehatan dan pembiayaan kesehatan</p> <p>Outcome 1.2.5: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p> <p>Outcome 1.3.1: Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial</p> <p>Outcome 1.4.1: Meningkatnya kompetensi tenaga kerja</p> <p>Outcome 1.4.2: Meningkatnya penempatan tenaga kerja</p>	<p>Outcome 2.1.1: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif agamis</p> <p>Outcome 2.1.2: Meningkatnya pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya</p> <p>Outcome 2.2.1: Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibulminfas di Kota Sukabumi</p> <p>Outcome 2.3.1: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan</p> <p>Outcome 2.4.1: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>Outcome 2.4.2: Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan</p> <p>Outcome 2.4.3: Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif</p> <p>Outcome 2.4.4: Meningkatnya daya saing kepemudaan</p>	<p>Outcome 3.1.1: Meningkatnya kualitas masyarakat kreatif</p> <p>Outcome 3.1.2: Meningkatnya daya saing UMKM</p> <p>Outcome 3.2.1: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata</p> <p>Outcome 3.3.1: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</p> <p>Outcome 3.3.2: Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan</p> <p>Outcome 3.4.1: Meningkatnya investasi</p> <p>Outcome 3.5.1: Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah</p>	<p>Outcome 4.1.1: Meningkatnya kualitas jalan jembatan</p> <p>Outcome 4.1.2: Meningkatnya pelayanan sarana transportasi darat</p> <p>Outcome 4.1.3: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyediaan sistem air minum</p> <p>Outcome 4.1.4: Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman</p> <p>Outcome 4.1.5: Meningkatnya kualitas layanan persampahan</p> <p>Outcome 4.1.6: Meningkatnya kualitas layanan sumber daya air</p> <p>Outcome 4.1.7: Meningkatnya kualitas layanan persampahan</p> <p>Outcome 4.1.8: Meningkatnya kualitas layanan air limbah</p> <p>Outcome 4.2.1: Meningkatnya ketahanan bencana daerah</p> <p>Outcome 4.2.2: Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran</p> <p>Outcome 4.2.3: Meningkatnya pengurangan emisi GRK</p>	<p>Outcome 5.1.1: Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan</p> <p>Outcome 5.1.2: Meningkatnya efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dokumen</p> <p>Outcome 5.2.1: Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik</p> <p>Outcome 5.2.2: Meningkatkan kualitas peraturan daerah yang ditetapkan</p> <p>Outcome 5.2.3: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa</p> <p>Outcome 5.2.4: Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan</p> <p>Outcome 5.2.5: Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan</p> <p>Outcome 5.3.1: Meningkatnya pendayagunaan inovasi</p> <p>Outcome 5.4.1: Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>Outcome 5.4.2: Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik</p> <p>Outcome 5.4.3: Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Outcome 5.4.4: Meningkatnya efektivitas pengawasan internal</p> <p>Outcome 5.5.1: Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN</p>
---	--	--	--	---

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Secara rinci *logical framework* dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi periode tahun 2025 - 2030 per tujuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.10
 Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi
 Periode Tahun 2025 - 2030 Berdasarkan Tujuan Pertama

TUJUAN	TUJUAN											
	Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter											
SASARAN	INDIKATOR TUJUAN											
	Indeks Pembangunan Manusia											
SASARAN	Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata				Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas				Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	
	INDIKATOR SASARAN											
Indeks Pendidikan				Usia Harapan Hidup				Tingkat Kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka		
OUTCOMES - PROGRAM	OUTCOMES											
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Dasar	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pencegahan penyakit	Meningkatnya kualitas layanan primer, rujukan dan laboratorium kesehatan	Meningkatnya kualitas perbekalan kesehatan dan pembiayaan kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	
	INDIKATOR OUTCOMES											
	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	1. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 2. Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan	Prevalensi Stunting	Angka Keberhasilan pengobatan TB	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persentase Kelurahan dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensinya	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	
PROGRAM												
Program Pengelolaan Pendidikan		Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat				Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja		
INDIKATOR PROGRAM												
Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	1. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 2. Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan	Prevalensi Stunting	Angka Keberhasilan pengobatan TB	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persentase Kelurahan dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensinya	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan		
PD	Urusan Pendidikan		Urusan Perpustakaan	Urusan Kesehatan				Urusan Kesehatan	Urusan Sosial	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Gambar 3.11
 Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi
 Periode tahun 2025 - 2030 Berdasarkan Tujuan Kedua

TUJUAN	TUJUAN							
	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, berbudaya, dan inklusif							
	INDIKATOR TUJUAN Indeks Rasa Aman							
SASARAN	SASARAN							
	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tenram dan Tertib	Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif				
	INDIKATOR SASARAN							
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Penyelenggaraan	Indeks Warisan Budaya	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)				
OUTCOMES - PROGRAM	OUTCOMES							
	Meningkatnya kualitas masyarakat kota yang agamis	Meningkatnya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya	Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibumlinmas di Kota Sukabumi	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Meningkatnya daya saing kepemudaan
	INDIKATOR OUTCOMES							
	Indeks Zakat Nasional Kota Sukabumi	Persentase konflik antar inter umat beragama yang diantisipasi	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang terselesaikan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Rasio Wirausaha Pemuda
	PROGRAM							
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
INDIKATOR PROGRAM								
Indeks Zakat Nasional Kota Sukabumi	Persentase konflik antar inter umat beragama yang diantisipasi	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang terselesaikan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Rasio Wirausaha Pemuda	
PD	Urusan Sekretariat Daerah	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Kebudayaan	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Gambar 3.12
Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi
 Periode Tahun 2025 - 2030 Berdasarkan Tujuan Ketiga

TUJUAN	TUJUAN						
	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif						
SASARAN	INDIKATOR TUJUAN						
	PDRB Per Kapita						
	SASARAN						
	Meningkatnya ekonomi kreatif kota	Berkembangnya industri pariwisata MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions)	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru	Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan		
INDIKATOR SASARAN							
Indeks Kota Kreatif	Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Indeks Ketahanan Pangan	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Pertumbuhan PAD			
OUTCOMES - PROGRAM	OUTCOMES						
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Meningkatnya daya saing UMKM	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya investasi	Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah
	INDIKATOR OUTCOMES						
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase UMKM Menjalinkan Kemitraan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Skor Pola Pangan Harapan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persentase peningkatan nilai investasi	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
	PROGRAM						
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan UMKM	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
INDIKATOR PROGRAM							
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase UMKM Menjalinkan Kemitraan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Skor Pola Pangan Harapan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persentase peningkatan nilai investasi	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	
PD	Urusan Pariwisata	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Urusan Pariwisata	Urusan Pangan	Urusan Pangan	Urusan Penanaman Modal	Urusan Keuangan

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Gambar 3.13
 Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi
 Periode Tahun 2025 - 2030 Berdasarkan Tujuan Keempat

SASARAN TUJUAN	TUJUAN										
	Terwujudnya infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan										
SASARAN	INDIKATOR TUJUAN										
	Indeks Kota Layak Huni										
SASARAN	SASARAN										
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kota						Meningkatnya Resiliensi Kota terhadap bencana dan				
SASARAN	INDIKATOR SASARAN						INDIKATOR SASARAN				
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur						Indeks Risiko Bencana				
OUTCOMES - PROGRAM	OUTCOMES										
	Meningkatnya kualitas jalan jembatan	Meningkatnya Ketersediaan kelengkapan jalan	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyediaan sistem air minum	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas ruang publik	Meningkatnya Perindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Meningkatnya kualitas layanan persampahan	Menongkatnya kualitas layanan air limbah	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya pengurangan emisi GRK
	INDIKATOR OUTCOMES										
	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persentase Ketersediaan penerangan jalan umum yang terpelihara dan memenuhi standar	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dalam kondisi baik	Persentase Peningkatan Perindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana	Persentase penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran sesuai standar pelayanan	Emisi Co2 Equivalen
	PROGRAM										
Program penyelenggaraan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Program kawasan permukiman	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Program pengelolaan persampahan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Program Penanggulangan Bencana	Program pencegahan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
OUTCOMES - PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM										
	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persentase Ketersediaan penerangan jalan umum yang terpelihara dan memenuhi standar	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dalam kondisi baik	Persentase Peningkatan Perindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana	Persentase penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran sesuai standar pelayanan	Emisi Co2 Equivalen
PD	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Perhubungan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Lingkungan Hidup	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Ketentrman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Ketentrman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Lingkungan Hidup

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Gambar 3.14
 Logical Framework Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi
 Periode Tahun 2025 - 2030 Berdasarkan Tujuan Kelima

TUJUAN	TUJUAN												
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif												
	INDIKATOR TUJUAN												
SASARAN	SASARAN												
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota						Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Terwujudnya ASN yang Berintegritas, Netral, dan Berkinerja Tinggi	
	INDIKATOR SASARAN												
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	* Indeks Pelayanan Publik * Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota						Indeks Inovasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General) Kota Sukabumi			Indeks Sistem Merit		
OUTCOMES - PROGRAM	OUTCOMES												
	Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas peraturan daerah yang ditetapkan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya pendayagunaan inovasi	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN
	INDIKATOR OUTCOMES												
	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase proleđa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Indeks tata kelola pengadaan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	* Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD * Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	Nilai rata-rata RB Perangkat Daerah yang melakukan pengukuran IRB-PD	Nilai laporan keuangan	Persentase rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensi
	PROGRAM												
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Arsip	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ProgramDukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Perencanaan dan Pembangunan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kepegawaian Daerah	
INDIKATOR PROGRAM													
Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase proleđa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Indeks tata kelola pengadaan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	* Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD * Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	Nilai rata-rata RB Perangkat Daerah yang melakukan pengukuran IRB-PD	Nilai laporan keuangan	Persentase rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengembangan Karir ASN	
PD	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Perpustakaan	Urusan Sekretariat Daerah	Urusan Sekretariat DPRD	Urusan Sekretariat Daerah	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Kecamatan	Urusan Penelitian	Urusan Perencanaan	Urusan Sekretariat Daerah	Urusan Keuangan	Urusan Inspektorat Daerah	Urusan Kepegawaian Daerah

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Selain adanya visi, misi dan program yang telah dijanjikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat juga beberapa agenda pembangunan yang cukup mendapat perhatian khusus dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agenda pembangunan tersebut berupa prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan yang juga harus diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah dan stakeholder yang ada di Kota Sukabumi.

Prioritas Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)



Salah satu kunci utama dalam melakukan pembangunan adalah ketersediaan sumber daya terutama anggaran. Maka opsi terbaiknya adalah melakukan optimalisasi peningkatan PAD melalui: Normalisasi dan optimalisasi pajak daerah, retribusi, BLUD dan BUMD.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



Fokus pembangunan adalah demi kepentingan masyarakat, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan khususnya untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Adapun secara teknis prioritas ini akan dilaksanakan melalui: implementasi wakaf uang, dana bergulir/dana abadi, penguatan ekonomi kreatif termasuk UMKM, serta pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

3. Penciptaan Lapangan Kerja



Salah satu masalah besar di Kota Sukabumi selain ketimpangan adalah masih tingginya angka pengangguran, maka prioritas penciptaan lapangan kerja merupakan hal yang harus dilakukan. Program yang dapat dilakukan di antaranya melalui: pengembangan pendidikan vokasi serta pengiriman tenaga kerja luar negeri, kemitraan dengan industri dan pelaku ekonomi serta dukungan untuk pengusaha dan *start up*.

4. Penataan Kota



Sebuah kota yang indah adalah kota yang tertata dengan baik sehingga akan banyak kunjungan wisatawan untuk menikmati alam dan lingkungannya. Penataan kota merupakan hal yang harus terus menerus dilakukan dengan terlebih dahulu mempunyai perencanaan yang matang. Langkah yang akan dilakukan untuk penataan kota di antaranya melalui: perbaikan dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, penanganan sampah, serta penerangan seluruh wilayah kota.

5. Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan



Salah satu pembangunan yang tidak boleh dilupakan adalah pembangunan nilai, mental dan budaya masyarakat. Maka penguatan nilai-nilai positif serta keterbukaan dalam semua proses pembangunan menjadi salah satu kunci yang harus dilakukan. Prioritas ini dapat dilakukan melalui penguatan nilai agama, sosial, dan budaya, toleransi dan keberagaman, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai tugas dan perannya serta kolaborasi pembangunan dengan semua stakeholder yang ada.

Dalam implementasinya, prioritas pembangunan selain harus sesuai dengan perencanaan secara teknokratis haruslah sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Maka pelaksanaan prioritas pembangunan haruslah mempertimbangkan usulan masyarakat melalui musrenbang serta saran dan masukan unsur legislatif melalui sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD.

3.6.2 INDIKASI INTERVENSI PROYEK DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI KOTA SUKABUMI

RPJMN Tahun 2025-2029 juga terdapat beberapa indikasi intervensi berupa proyek strategis yang akan dilaksanakan di Kota Sukabumi. Berbagai indikasi intervensi tersebut antara lain:

1. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi (PHTC).

2. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD R. Syamsudin, SH Sukabumi (PHTC).
3. Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi.
4. Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Cianjur-Ciranjang-Padalarang.
5. Pembangunan TPST Regional Bogor-Sukabumi.
6. *Urban renewal* pada kota-kota wisata antara lain di Bogor dan Sukabumi.

Selain itu telah ditetapkan pula program strategis nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun Program Strategis Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Penanggulangan Kemiskinan
 - 1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - 2) Sekolah Rakyat
 - 3) Pembangunan 3 Juta Rumah
- II. Ketahanan Pangan
 - 4) Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
- III. Kesehatan untuk Semua
 - 5) Jaminan Kesehatan Nasional
 - 6) Makan Bergizi Gratis
- IV. Perluasan Akses Pendidikan
 - 7) Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
- V. Perumbuhan Ekonomi

- 8) Pengendalian Inflasi
- 9) Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih
- 10) Kemudahan Perizinan di Daerah

3.6.3 PROGRAM/PROYEK PRIORITAS JAWA BARAT DI KOTA SUKABUMI

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 terdapat beberapa program/proyek strategis provinsi yang akan dilaksanakan di Kota Sukabumi. Keberadaan program/proyek strategis ini diharapkan dapat lebih mendorong pembangunan di Kota Sukabumi. Selain itu, program/proyek strategis ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target-target pembangunan Kota Sukabumi. Program/proyek strategis provinsi tersebut antara lain:

1. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi
2. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi
3. Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang
4. TPPAS Bersama Sukabumi

3.6.4 RENCANA PROYEK STRATEGIS KOTA SUKABUMI

Dalam lima tahun ke depan terdapat beberapa proyek strategis daerah yang rencananya akan dilakukan di wilayah Kota Sukabumi. Proyek tersebut tentunya dalam mendukung implementasi program unggulan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Rencana proyek strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Rencana Proyek Strategis Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

NO	PROYEK STRATEGIS	RENCANA SUMBER PEMBIAYAAN
1	Pembangunan jembatan pusat pemerintahan	APBD Kota
2	Penyiapan lahan serta sarana prasarana pendukung pusat pemerintahan	APBD Kota
3	Pembangunan kantor Kecamatan Gunung Puyuh	APBD Kota
4	Pembangunan/rehabilitasi gedung perkantoran	APBD Kota /DAK Fisik/Bankeu

NO	PROYEK STRATEGIS	RENCANA SUMBER PEMBIAYAAN
		Provinsi/Pembiayaan lainnya
5	Pembangunan/rehabilitasi Stadion Suryakencana	APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Obligasi Daerah/CSR/ KPBU/BSG/BGS/Hibah/ Pembiayaan lainnya
6	Pembangunan gapura batas kota	APBD Kota/CSR
7	Penerangan Jalan Umum	APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Obligasi Daerah/CSR/ KPBU/BSG/BGS/Hibah/ Pembiayaan lainnya
8	Pembangunan/rehabilitasi jalan	APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Obligasi Daerah/CSR/ KPBU/BSG/BGS/Hibah/ Pembiayaan lainnya
9	Pengolahan sampah	APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Obligasi Daerah/CSR/ KPBU/BSG/BGS/Hibah/ Pembiayaan lainnya
10	Revitalisasi jaringan PDAM	APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Obligasi Daerah/CSR/ KPBU/BSG/BGS/Hibah/ Pembiayaan lainnya
11	Operasionalisasi SAUM	APBD Kota /DAK Fisik/Bankeu Provinsi
12	Penuntasan kawasan kumuh dan rutilahu	APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Hibah/ Pembiayaan lainnya
13	Peningkatan jaringan drainase	APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/Pembiayaan lainnya
14	Pembangunan/rehabilitasi RSUD R. Syamsudin SH, Al-Mulk, serta sarana kesehatan lainnya	APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/ CSR/ KPBU/ Pembiayaan lainnya
15	Pembangunan/rehabilitasi sarana pendidikan	APBD Kota/DAK Fisik/Bankeu Provinsi/CSR

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

4.1.1 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program prioritas Kota Sukabumi beserta pagu indikatif (sigma pagu subkegiatan yang dominan berkontribusi terhadap program prioritas) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Program Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF TAHUN (Juta Rupiah)					PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Pengelolaan Pendidikan	12.002.497.000	13.173.697.000	13.148.697.000	13.153.697.000	13.371.211.698	Pendidikan
Program Pembinaan Perpustakaan	135.000.000	117.599.996	117.599.996	119.878.997	119.878.997	Perpustakaan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	55.399.477.598	56.394.445.240	56.594.445.240	57.651.651.918	57.851.651.918	Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.826.000.000	4.904.021.800	4.904.021.800	4.982.457.127	4.982.457.127	Kesehatan
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	434.083.700	491.829.039	499.698.303	515.308.879	531.407.128	Sosial
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	487.071.000	494.864.136	494.864.136	502.287.098	502.287.098	Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	56.027.500	56.923.940	56.923.940	57.777.799	57.777.799	Tenaga Kerja
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.741.479.471	8.881.343.143	8.881.343.143	9.014.563.290	9.014.563.290	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	399.185.000	405.571.960	405.571.960	411.655.539	411.655.539	Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.574.645.750	1.576.959.362	1.576.959.362	1.591.525.577	1.591.525.577	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program Pengembangan Kebudayaan	127.889.000	129.935.224	129.935.224	131.884.252	131.884.252	Kebudayaan
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.939.511.350	1.941.814.040	1.942.410.812	1.945.172.548	1.945.172.548	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	85.000.000	86.360.000	86.360.000	87.655.400	87.655.400	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak	37.298.250	37.298.250	37.895.022	38.463.447	38.463.447	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.379.759.650	1.401.835.804	1.401.835.804	1.422.863.341	1.422.863.341	Kepemudaan dan Olahraga

PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF TAHUN (Juta Rupiah)					PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	30.000.000	30.480.000	30.480.000	30.937.200	30.937.200	Pariwisata
Program Pengembangan UMKM	350.000.000	355.600.000	350.000.000	360.934.000	350.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	219.999.250	223.519.238	223.519.238	226.872.026	226.872.026	Pariwisata
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	325.850.400	309.565.390	316.314.790	333.557.251	333.557.251	Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	6.749.400	4.577.390	11.326.790	3.947.251	3.947.251	Pangan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99.999.550	68.071.694	68.071.694	69.092.769	69.092.769	Penanaman Modal
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.142.979.567	4.209.267.240	4.209.267.241	4.272.406.248	4.272.406.248	Keuangan
Program Penyelenggaraan Jalan	20.769.662.773	12.101.977.377	12.101.977.377	12.283.507.038	12.283.507.038	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	786.538.750	786.538.750	786.538.750	786.538.750	786.538.750	Perhubungan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	563.000.000	572.008.000	572.008.000	580.588.120	580.588.120	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Permukiman	6.207.854.468	6.307.180.139	6.307.180.139	6.401.787.842	6.401.787.842	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3.296.760.468	3.349.508.635	3.349.508.635	3.399.751.265	3.399.751.265	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.640.000.000	2.682.240.000	2.682.240.000	2.722.473.600	2.722.473.600	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Persampahan	3.050.994.460	3.099.810.371	3.099.810.371	3.146.307.527	3.146.307.527	Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.286.069.897	1.306.647.015	1.306.647.015	1.326.246.721	1.326.246.721	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penanggulangan Bencana	53.202.500	78.896.700	78.806.225	73.043.653	73.043.653	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	266.623.550	206.494.374	221.494.374	212.776.790	212.776.790	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF TAHUN (Juta Rupiah)					PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	353.239.775	358.891.611	358.891.611	364.274.986	364.274.986	Lingkungan Hidup
Program Aplikasi Informatika	365.472.000	370.759.552	370.759.552	375.795.945	375.795.945	Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Arsip	30.107.950	32.205.081	32.205.081	34.202.599	34.202.599	Kearsipan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	565.879.500	565.879.500	565.879.500	565.879.500	565.879.500	Sekretariat DPRD
Program Perekonomian dan Pembangunan	245.923.300	249.858.073	249.858.073	253.605.944	253.605.944	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	139.507.000	139.507.000	139.507.000	139.507.000	139.507.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	176.656.776	172.736.624	172.736.624	175.327.674	175.327.674	Kecamatan Baros
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85.019.650	86.379.964	86.379.964	87.675.664	87.675.664	Kecamatan Cikole
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	105.782.650	108.030.852	108.030.852	109.902.256	109.902.256	Kecamatan Citamiang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	145.185.168	147.510.000	147.510.000	149.715.000	149.715.000	Kecamatan Cibeureum
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85.331.600	86.696.906	86.696.906	87.997.359	87.997.359	Kecamatan Gunung Puyuh
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	108.836.532	110.646.511	110.646.511	112.370.516	112.370.516	Kecamatan Warudoyong
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	174.004.844	166.788.922	166.788.922	169.440.755	169.440.755	Kecamatan Lembursitu
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	93.396.500	121.415.450	121.415.450	145.698.540	145.698.540	Perencanaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	252.340.050	334.420.334	334.420.334	415.188.479	415.188.479	Sekretariat Daerah
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.510.246.050	2.621.107.485	2.733.163.485	2.771.910.937	2.771.910.937	Perencanaan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.519.301.268	17.495.876.235	18.502.025.998	19.080.398.848	22.487.823.623	Keuangan

PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF TAHUN (Juta Rupiah)					PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.419.214.000	1.441.921.424	1.441.921.424	1.463.550.245	1.463.550.245	Pengawasan
Program Kepegawaian Daerah	652.000.000	662.735.787	662.432.000	572.368.480	572.341.635	Kepegawaian

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

4.1.2 PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN ASTA CITA

Dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah maka Kota Sukabumi melalui Perangkat Daerah akan berkontribusi terhadap kegiatan prioritas utama dan proyek strategis nasional (Lampiran 1) RPJMN Tahun 2025-2029. Kontribusi Kota Sukabumi terhadap pencapaian Asta Cita seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Program Dukungan Kota Sukabumi Terhadap Pencapaian Asta Cita dan Program Prioritas Nasional

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD
		2026	2027	2028	2029	2030	
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA							
PN 1							
Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	256.247.000	313.739.952	313.739.952	324.870.228	324.870.228	Urusan Komunikasi dan Informatika
PN 2							
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	528.372.550	536.826.511	536.826.511	544.878.908	544.878.908	Urusan Pangan
Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu Daerah Kabupaten/Kota	101.752.000	101.054.000	101.054.000	98.538.000	98.538.000	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.458.000	94.331.000	94.331.000	101.395.000	101.395.000	Urusan Kelautan dan Perikanan
Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.640.000.000	2.682.240.000	2.682.240.000	2.722.473.600	2.722.473.600	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	563.000.000	572.008.000	572.008.000	580.588.120	580.588.120	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD
		2026	2027	2028	2029	2030	
Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.286.069.897	1.306.647.015	1.306.647.015	1.326.246.721	1.326.246.721	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	1.150.000.000	1.265.000.000	1.391.500.000	1.530.650.000	1.683.715.000	Urusan Lingkungan Hidup
Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Urusan Persandian
Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	30.000.000	30.480.000	30.480.000	30.937.200	30.937.200	Urusan Pariwisata
PN 3							
Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	Urusan Komunikasi dan Informatika
Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	30.000.000	30.480.000	30.480.000	30.937.200	30.937.200	Urusan Pariwisata
Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	6.663.900.000	6.770.522.400	6.770.522.400	6.872.080.326	6.872.080.326	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
PN 4							
Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	1.926.850.000	1.901.850.000	1.901.850.000	1.901.850.000	1.901.850.000	Urusan Pendidikan

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD
		2026	2027	2028	2029	2030	
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	275.850.000	275.850.000	280.850.000	280.850.000	275.850.000	Urusan Pendidikan
Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	14.335.700	14.565.071	14.565.071	14.780.107	14.780.107	Urusan Sosial
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengendalian Izin Pendidikan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Urusan Pendidikan
Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	400.000.000	629.200.000	692.120.000	534.804.796	506.254.796	Urusan Penelitian
Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	58.715.477.598	59.628.467.040	59.278.467.040	60.939.109.045	61.164.109.045	Urusan Kesehatan
Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	32.212.189.598	32.903.467.040	32.903.467.040	33.814.109.045	33.839.109.045	Urusan Kesehatan
Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	5.040.538.290	5.230.538.290	5.230.538.290	5.230.538.290	5.230.538.290	Urusan Kesehatan
Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	4.280.538.290	4.380.538.290	4.380.538.290	4.380.538.290	4.380.538.290	Urusan Kesehatan
Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pengawasan Keamanan Pangan	6.749.400	6.857.390	6.857.390	6.960.251	6.960.251	Urusan Kesehatan

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD
		2026	2027	2028	2029	2030	
Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	6.749.400	6.857.390	6.857.390	6.960.251	6.960.251	Urusan Kesehatan
Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	4.200.538.290	4.200.538.290	4.200.538.290	4.200.538.290	4.200.538.290	Urusan Kesehatan
Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	55.179.477.598	56.035.085.240	55.685.085.240	57.286.951.518	57.511.951.518	Urusan Kesehatan
Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	376.470.000.000	397.230.640.000	420.730.640.000	464.750.299.600	512.750.299.600	Urusan Kesehatan
Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.290.000.000	1.310.640.000	1.310.640.000	1.330.299.600	1.330.299.600	Urusan Kesehatan
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	127.889.000	129.935.224	129.935.224	131.884.252	131.884.252	Urusan Kebudayaan
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	400.000.000	629.200.000	692.120.000	534.804.796	506.254.796	Urusan Penelitian

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD
		2026	2027	2028	2029	2030	
PN 5							
Tidak ada kegiatan prioritas utama yang relevan dengan Kota Sukabumi							
PN 6							
Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	458.536.450	465.873.033	465.873.033	472.861.129	472.861.129	Urusan Sosial
Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Program Pengembangan UMKM	350.000.000	355.600.000	355.600.000	360.934.000	360.934.000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Program Pengembangan UMKM	350.000.000	355.600.000	355.600.000	360.934.000	360.934.000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.475.988.000	3.531.603.808	3.531.603.808	3.584.577.865	3.584.577.865	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PN 7							
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.055.610.000	1.072.499.760	1.072.499.760	1.088.587.256	1.088.587.256	Urusan Inspektorat Daerah

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD
		2026	2027	2028	2029	2030	
Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	652.000.000	662.432.000	662.432.000	672.368.480	672.368.480	Urusan Kepegawaian Daerah
Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Aplikasi Informatika	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	Urusan Komunikasi dan Informatika
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.519.301.268	17.495.876.235	18.502.025.998	19.080.398.848	22.487.823.623	Urusan Keuangan
PN 8							
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	887.580.160	901.781.443	901.781.443	915.308.164	915.308.164	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Wawasan Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	127.889.000	129.935.224	129.935.224	131.884.252	131.884.252	Urusan Kebudayaan
PROYEK STRATEGIS NASIONAL							
Program Makan Bergizi Gratis	Program Pengawasan Keamanan Pangan	6.749.400	4.577.390	11.326.790	3.947.251	3.947.251	Urusan Pangan
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	275.850.000	275.850.000	280.850.000	280.850.000	275.850.000	Urusan Pendidikan
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengendalian Izin Pendidikan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Urusan Pendidikan

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD
		2026	2027	2028	2029	2030	
Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	376.470.000.000	397.230.640.000	420.730.640.000	464.750.299.600	512.750.299.600	Urusan Kesehatan
Program Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	4.280.538.290	4.380.538.290	4.380.538.290	4.380.538.290	4.380.538.290	Urusan Kesehatan
Pembangunan 3 Juta rumah	Program Kawasan Permukiman	811.094.000	807.671.504	780.951.504	799.972.577	799.972.577	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	50.000.000	50.800.000	50.800.000	51.562.000	51.562.000	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL							
Penanggulangan Kemiskinan							
Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	518.078.750	434.083.700	441.029.039	448.085.503	462.083.695	Urusan Sosial
Sekolah Rakyat	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.011.000	6.107.176	6.204.891	6.398.732	6.598.628	Urusan Sosial
Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Kawasan Permukiman	811.094.000	807.671.504	780.951.504	799.972.577	799.972.577	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	50.000.000	50.800.000	50.800.000	51.562.000	51.562.000	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD
		2026	2027	2028	2029	2030	
Kegiatan Ketahanan Pangan							
Pengadaan Dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Penanganan Kerawanan Pangan	226.234.000	222.666.000	222.666.000	249.846.000	249.846.000	Urusan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	6.749.400	6.857.390	6.857.390	6.960.251	6.960.251	Urusan Pangan
Kegiatan Kesehatan Untuk Semua							
Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	26.000.000.000	28.000.000.000	30.000.000.000	33.000.000.000	33.000.000.000	Urusan Kesehatan
Makan bergizi gratis		1.355.000.000	1.405.000.000	1.405.000.000	1.405.000.000	1.405.000.000	Urusan Kesehatan
Pertumbuhan Akses Pendidikan							
Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Revitalisasi Pendidikan Dasar Dan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	-	311.376.017	311.376.017	311.376.017	311.376.017	Urusan Pendidikan
Pertumbuhan Ekonomi							
Pengendalian Inflasi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	87.476.000	76.711.000	76.711.000	72.920.000	72.920.000	Urusan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	21.933.000	17.019.000	17.019.000	15.219.000	15.219.000	Urusan Pangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	45.000.000	45.720.000	45.720.000	45.675.000	45.675.000	Urusan Perdagangan
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	125.000.000	127.000.000	127.000.000	128.905.000	128.905.000	Urusan Sekretariat Daerah
Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	45.100.000	45.821.600	45.821.600	46.508.924	46.508.924	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	6.663.900.000	6.770.522.400	6.770.522.400	6.872.080.236	6.872.080.236	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD
		2026	2027	2028	2029	2030	
Kemudahan Perizinan Di Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	215.781.332	219.233.833	219.233.833	222.522.340	222.522.340	Urusan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	9.916.625	10.075.291	10.204.119	10.226.420	10.226.420	Urusan Penanaman Modal

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

4.1.3 PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN JABAR ISTIMEWA

Selain melaksanakan prioritas pembangunan, Kota Sukabumi juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian Jabar Istimewa. Kontribusi Kota Sukabumi terhadap pencapaian Jabar Istimewa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Program Dukungan Kota Sukabumi Terhadap Jabar Istimewa

JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2026	2027	2028	2029	2030	
Langkah Kahiji Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Program Penyelenggaraan Jalan	20.769.662.773	12.101.977.377	12.101.977.377	12.283.507.038	12.283.507.038	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	600.000.000	600.000.000	600.000.000	650.000.000	650.000.000	Perhubungan
	Program Kawasan Permukiman	2.911.094.000	2.957.671.504	2.957.671.504	3.002.036.577	3.002.036.577	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	50.800.000	50.800.000	51.562.000	51.562.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Langkah Kedua Pembangunan Jaringan Irigasi di Seluruh Wilayah Pertanian dan Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	189.241.350	192.269.212	192.269.212	195.153.250	195.153.250	Pertanian
Langkah Katilu Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru	Program Pengelolaan Pendidikan	12.672.097.000	13.929.673.017	13.929.673.017	14.154.033.356	14.154.033.356	Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90.000.000	91.440.000	91.440.000	92.811.600	92.811.600	Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	40.000.000	40.960.000	40.960.000	41.874.400	41.874.400	Kepegawaian
Langkah Kaopat Pengembangan Lapangan Kerja Baru	Program Penempatan Tenaga Kerja	36.750.000	38.587.500	40.516.875	40.516.875	42.542.719	Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	350.653.800	350.653.800	368.186.490	386.595.815	405.925.605	Tenaga Kerja

JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	30.000.000	30.480.000	30.480.000	30.937.200	30.937.200	Pariwisata
	Program Pengembangan UMKM	350.000.000	355.600.000	355.600.000	360.934.000	360.934.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	219.999.250	223.519.238	223.519.238	226.872.026	226.872.026	Pariwisata
	Program Promosi Penanaman Modal	45.000.000	45.720.000	45.720.000	46.405.800	46.405.800	Penanaman Modal
Langkah Kalima Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	530.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.290.000.000	1.310.640.000	1.310.640.000	1.330.299.600	1.330.299.600	Kesehatan
Langkah Kagenep Penanganan Stunting dan Gizi Buruk serta Penataan Lingkungan	Program Pengawasan Keamanan Pangan						Pangan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.425.000.000	1.525.000.000	1.525.000.000	1.525.000.000	1.525.000.000	Kesehatan

JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.826.000.000	4.904.021.800	4.904.021.800	4.982.457.127	4.982.457.127	Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kesehatan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	528.372.550	536.826.511	536.826.511	544.878.908	544.878.908	Pangan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	3.475.988.000	3.531.603.808	3.531.603.808	3.584.577.865	3.584.577.865	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	50.800.000	50.800.000	51.562.000	51.562.000	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Langkah Katujuh Pemulihan Kondisi Lingkungan Jawa Barat	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	47.232.900	47.988.626	47.988.626	48.708.456	48.708.456	Lingkungan Hidup
	Program Penanggulangan Bencana	369.075.000	374.980.200	374.980.200	380.604.903	380.604.903	Ketentruman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	299.040.500	303.825.148	303.825.148	308.382.525	308.382.525	Lingkungan Hidup
	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	280.998.400	285.494.374	285.494.374	289.776.790	289.776.790	Ketentruman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU INDIKATIF TAHUN					PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2026	2027	2028	2029	2030	
Langkah Kadalapan Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri	Program Pengelolaan Persampahan	3.050.994.460	3.099.810.371	3.099.810.371	3.146.307.527	3.146.307.527	Lingkungan Hidup
Langkah Kasalapan Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi	Program Pemberdayaan Masyarakat	2.289.300.000	2.289.300.000	2.289.300.000	2.289.300.000	2.289.300.000	Kecamatan Baros
	Program Pemberdayaan Masyarakat	4.028.862.520	4.197.180.164	4.188.087.139	4.235.388.562	4.196.700.971	Kecamatan Cikole
	Program Pemberdayaan Masyarakat	3.311.850.000	3.221.826.104	3.221.826.104	3.227.078.496	3.227.078.496	Kecamatan Citamiang
	Program Pemberdayaan Masyarakat	2.841.880.750	2.851.513.732	2.851.513.732	2.894.268.030	2.894.268.030	Kecamatan Gunungpuyuh
	Program Pemberdayaan Masyarakat	3.541.000.000	3.541.000.000	3.541.000.000	3.541.000.000	3.541.000.000	Kecamatan Warudoyong
	Program Pemberdayaan Masyarakat	2.587.560.000	2.588.964.593	2.588.964.592	2.627.799.062	2.627.799.062	Kecamatan Lembursitu
	Program Pemberdayaan Masyarakat	2.501.804.750	2.532.459.626	2.532.459.626	2.570.446.520	2.570.446.520	Kecamatan Cibeureum
	Program Pengembangan Kebudayaan	127.889.000	129.935.224	129.935.224	131.884.252	131.884.252	Kebudayaan
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.510.246.050	2.621.107.485	2.733.163.485	2.771.910.937	2.771.910.937	Perencanaan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.519.301.268	17.495.876.235	18.502.025.998	19.080.398.848	22.487.823.623	Keuangan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	701.980.000	691.450.300	691.450.300	701.822.055	701.822.055	Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

4.1.4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Rencana program Perangkat Daerah ini merupakan program untuk mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Tabel 4.4
Program Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
PENDIDIKAN																
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Outcome: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Persentase ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Binokradi General Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	42	61	176.715.981.101	76	126.422.467.280	77	128.658.564.987	78,01	128.658.564.987	79,01	130.588.443.462	80,01	130.588.443.462	Urusan Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan																
Outcome 1: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 7- 15 Tahun yang Berpatisipasi Dalam Pendidikan Dasar	Persen	99,31	99,45	11.555.956.000	99,59	12.309.957.000	99,73	11.769.305.912	99,87	11.769.305.912	100	1.199.366.625.068	100	1.199.366.625.068	Urusan Pendidikan
Outcome 2: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah anak usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini	Persen	78,97	82,01	5.084.689.700	84,98	2.411.850.000	87,95	3.188.050.000	90,92	3.188.050.000	93,47	3.188.050.000	96,02	3.188.050.000	
	Jumlah Anak Usia 7- 18 Tahun yang Berpatisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	50,49	56,98		63,47		69,96		76,45		77,21		77,97		
Program Pengembangan Kurikulum																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	30	30	37.270.000	32	60.000.000	34	60.960.000	36	60.960.000	38	61.874.400	40	61.874.400	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan																
Outcome: Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Point	0,29	0,25	79.889.800	0,2	90.000.000	0,175	91.440.000	0,15	91.440.000	0,125	92.811.600	0,1	92.811.600	Urusan Pendidikan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Pengendalian Perizinan Kependidikan														Urusan Pendidikan		
Outcome: Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Iain Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persen	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.160.000	100	10.160.000	100	10.312.400	100	10.312.400	
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra														Urusan Pendidikan		
Outcome: Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	Persen	75	75	35.000.000	75	35.000.000	80	35.560.000	80	35.560.000	85	36.093.400	90	36.093.400	
KEBUDAYAAN																
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya														Urusan Kebudayaan		
Outcome: Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen	75	76	50.000.000	78	55.000.000	80	55.880.000	82	55.880.000	84	56.718.200	86	56.718.200	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional														Urusan Kebudayaan		
Outcome: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	55	60	140.000.000	65	140.000.000	70	142.240.000	75	142.240.000	80	144.373.600	85	144.373.600	
Program Pengelolaan Permuseuman														Urusan Kebudayaan		
Outcome: Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Persen	55	60	65.625.000	65	65.625.000	70	66.675.000	75	66.675.000	80	67.675.125	85	67.675.125	
Program Pengembangan Kebudayaan														Urusan Kebudayaan		
Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Peninggalan Tradisi Budaya	Persen	60	63	135.489.000	65	127.889.000	65	129.935.224	70	129.935.224	70	131.884.252	75	131.884.252	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Pembinaan Sejarah																
Outcome: Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	30	60	20.000.000	65	20.000.000	70	20.320.000	75	20.320.000	80	20.624.800	85	20.624.800	Urusan Kebu dayaan
KESEHATAN																
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kesehatan	Persentase Jetercapaian Nilai Reformasi Birokrasi General (IRB General) Dinas Kesehatan	Angka	46.40	60	89.406.228.825	74,2	88.129.668.259	75,9	89.865.467.951	77,6	97.287.248.701	79,3	98.350.650.248	81	99.100.937.029	Urusan Kesehatan
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan di RSUD R Syamsudin SH	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan RSUD R Syamsudin SH	Angka	84.69	85	320.000.000.000	85	360.000.000.000	85	380.000.000.000	85	402.000.000.000	85	445.000.000.000	85	492.000.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan di RSUD Al-Mulk	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan RSUD Al-Mulk	Angka	83.63	85	14.250.000.000	85	14.250.000.000	85	15.000.000.000	85	16.500.000.000	85	17.500.000.000	85	18.500.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan di Puskesmas Selabatu	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskesmas Selabatu	Angka	85.23	85	2.470.000.000	85	2.580.000.000	85	2.680.000.000	85	2.780.000.000	85	288.000.000	85	2.980.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan di Puskesmas Sukabumi	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskesmas Sukabumi	Angka	83.62	0		85	2.534.000.000	85	2.634.000.000	85	2.734.000.000	85	2.834.000.000	85	2.934.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan	Angka	89.77	0		85	953.500.000	85	1.100.000.000	85	1.500.000.000	85	1.800.000.000	85	2.000.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan keehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan	Angka	84,77	85,00	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskesmas Cipelang	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskesmas Cipelang	Angka	83,62	85,00	1.254.000.000	86,50	1.396.000.000	87,50	1.396.000.000	88,50	1.396.000.000	89,50	1.396.000.000	90,00	1.396.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskesmas Benteng	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskesmas Benteng	Angka	84,8	85,00	1.123.000.000	86,50	1.350.000.000	87,50	1.350.000.000	88,50	1.350.000.000	89,50	1.350.000.000	90,00	1.350.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskesmas Pabuaran	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskesmas Pabuaran	Angka	84,17	85,00	540.000.000	86,50	629.000.000	87,50	629.000.000	88,50	629.000.000	89,50	629.000.000	90,00	629.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskesmas Nanggaleng	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskesmas Nanggaleng	Angka	80,03	85,00	788.000.000	86,50	860.000.000	87,50	860.000.000	88,50	860.000.000	89,50	860.000.000	90,00	860.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskesmas Tipar	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskesmas Tipar	Angka	84,9	85,00	894.000.000	86,50	1.200.000.000	87,50	1.200.000.000	88,50	1.200.000.000	89,50	1.200.000.000	90,00	1.200.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskesmas Gedong panjang	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskesmas Gedongpanjang	Angka	81,54	85,00	787.000.000	86,50	770.000.000	87,50	770.000.000	88,50	770.000.000	89,50	770.000.000	90,00	770.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskesmas Baros	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskesmas Baros	Angka	80,51	85,00	1.500.000.000	86,50	2.055.000.000	87,50	2.055.000.000	88,50	2.055.000.000	89,50	2.055.000.000	90,00	2.055.000.000	

BIDANG URBUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskemas Lembursitu	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskemas Lembursitu	Angka	842	85,00	819.000.000	86,50	852.000.000	87,50	852.000.000	88,50	852.000.000	89,50	852.000.000	90,00	852.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskemas Karangtengah	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskemas Karangtengah	Angka	84,08	85,00	1.009.000.000	86,50	1.305.000.000	87,50	1.305.000.000	88,50	1.305.000.000	89,50	1.305.000.000	90,00	1.305.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskemas Sukakarya	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskemas Sukakarya	Angka	84,21	85,00	770.000.000	86,50	851.000.000	87,50	851.000.000	88,50	851.000.000	89,50	851.000.000	90,00	851.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskemas Limusunggal	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskemas Limusunggal	Angka	85,2	85,00	794.000.000	86,50	794.000.000	87,50	794.000.000	88,50	794.000.000	89,50	794.000.000	90,00	794.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskemas Cikundul	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskemas Cikundul	Angka	80,29	85,00	694.000.000	86,50	896.000.000	87,50	896.000.000	88,50	896.000.000	89,50	896.000.000	90,00	896.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di Puskemas Cibeureumhilir	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Puskemas Cibeureumhilir	Angka	84,31	85,00	878.000.000	86,50	878.000.000	87,50	878.000.000	88,50	878.000.000	89,50	878.000.000	90,00	878.000.000	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan keehatan di UPTD Perujung Kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan UPTD Perujung Kesehatan	Angka	-	85,00	750.000.000	86,50	750.000.000	87,50	750.000.000	88,50	750.000.000	89,50	750.000.000	90,00	750.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan														Urusan Kesehatan		
Outcome: Meningkatkan Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Keterngagan Minimal	Persen	30	35	1.440.000.000	40,00	1.290.000.000	50,00	1.310.640.000	60,00	1.310.640.000	70,00	1.330.299.600	80,00	1.330.299.600	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman														Urusan Kesehatan		
Outcome: Meningkatkan Jaminan Keamanan Produk IRT, Obat dan Alat Kesehatan Bagi Masyarakat	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, UMOOT dan PIRT yang Memenuhi Standar	Persen	56	57	60.000.000	60,00	20.000.000	62,00	30.960.000	65,00	30.960.000	70,00	31.874.400	75,00	31.874.400	
Outcome: Meningkatkan Jaminan Keamanan Pangan Siap Saji Bagi Masyarakat	Persentase Tempat Pengolahan Pangan Siap Saji yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Persen	65	66	30.000.000	67,00	40.000.000	69,00	30.000.000	71,00	30.000.000	73,00	30.000.000	75,00	30.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Urusan Kesehatan		
Outcome: Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kekurahan dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif kesehatan	Persen	-	75	3.744.075.000	75,00	5.146.675.000	80,00	5.229.021.800	85,00	5.229.021.800	90,00	5.307.457.127	90,00	5.307.457.127	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Outcome: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persen	59,97	61	15.423.687.227	62,8	15.121.248.666	64,6	15.363.188.645	66,41	15.363.188.645	68,21	15.593.636.474	70,01	15.593.636.474	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase														Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Outcome: Meningkatkan Kualitas Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Cakupan Drainase Lingkungan	Persen	42,25	43,02	751.857.000	43,24	950.000.000	43,24	965.200.000	43,24	965.200.000	43,24	979.678.000	43,24	979.678.000	
Program Penataan Bangunan Gedung														Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Outcome: Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan Sesuai dengan Standar	Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan dalam Kondisi Baik	Persen	22,97	35,14	10.551.075.999	41,99	13.866.149.650	48,07	14.088.008.044	53,65	14.088.008.044	64,57	14.299.328.165	67,88	14.299.328.165	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya														Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Outcome: Meningkatkan Kualitas Ruang Publik	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dalam Kondisi baik	Persen	70,33	72,53	4.049.764.845	74,25	3.296.760.468	75,79	3.349.508.635	77,19	3.349.508.635	78,48	3.399.751.265	79,65	3.399.751.265	
Program Penyelenggaraan Jalan														Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Outcome: Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persen	88,59	88,85	18.599.821.335	89,02	20.769.662.773	89,02	12.101.977.377	89,02	12.101.977.377	89,02	12.283.507.038	89,02	12.283.507.038	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi														Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Outcome: Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	Persen	38,01	52,63	109.222.950	61,94	105.125.000	68,67	106.807.000	75,16	106.807.000	81,52	108.409.105	88,28	108.409.105	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Luasan Pemanfaatan Ruang yang Telah Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Penataan Ruang	Ha	20	20	407.995.750	22	280.000.000	24	284.480.000	26	284.960.000	28	289.234.400	30	289.234.400	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Program Pengembangan Perumahan															Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Outcome: Terpenuhinya Penyediaan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpeng hasilan Rendah	Persentase Rumah Susun yang Terpelihara	Persen	100	100	413.936.150	100	213.500.000	100	216.916.000	100	216.916.000	100	220.169.740	100	220.169.740	
Program Kawasan Permukiman															Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	Persen	-	13,07	12.029.156.400	16,34	2.911.094.000	19,60	2.957.671.504	24,83	2.957.671.504	31,37	3.002.036.577	37,90	3.002.036.577	
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh															Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Outcome: Meningkatnya Berkurangnya Rumah yang Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Persen	1,37	1,37	824.122.750	1,37	50.000.000	1,37	50.800.000	1,37	50.800.000	1,37	51.562.000	1,37	51.562.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Outcome: Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Perumahan yang telah serah terima dan tersedia Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Persen	13,83	15,96	302.103.550	18,09	3.475.988.000	21,28	3.531.603.808	25,53	3.531.603.808	30,85	3.584.577.865	37,23	3.584.577.865	
PERTANAHAN																
Program Penatagunaan Tanah															Urusan Pertanahan	
Outcome: Meningkatnya Terbit Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan Tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	0	25	11.551.000	27	30.000.000	29	30.000.000	31	30.000.000	33	30.450.000	35	30.450.000	
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
Program Penujngan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															Urusan Ketentraman dan Keteriban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
Outcome: Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persen	72,09	72,5	11.338.959.825	73	11.375.722.943	73,5	11.557.734.510	74	11.557.734.510	74,5	11.731.100.528	75	11.731.100.528	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Keterterapan Dan Keterlibatan Umum														Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat		
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Transibumimas di Kota Sukabumi	Persentase Gangguan Transibumimas yang Terealisasi	Persen	100	100	742.057.750	100	1.454.211.750	100	1.477.479.138	100	1.477.479.138	100	1.499.641.325	100	1.499.641.325	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat		
Outcome: Meningkatnya pelayanan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Sesuai Standar Pelayanan	Persen	100	100	209.849.250	100	280.998.400	100	285.494.374	100	285.494.374	100	289.776.790	100	289.776.790	
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat		
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	40.87	60	3.841.169.627	62	3.608.700.138	64	3.666.439.340.208	66	3.666.439.340.208	68	372.143.593.031.112	70	372.143.593.031.112	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Penanggulangan Bencana																
Outcome: Meningkatnya ketahanan bencana Daerah	Persentase Pemerlukan SPM Sub Urusan Bencana Daerah	Persen	100	100	299.071.250	100	369.075.000	100	374.980.200	100	374.980.200	100	380.604.903	100	380.604.903	Urusan Ketentraman dan Keterliban Umum serta Perlindungan Masyarakat
SOSIAL																
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Sosial	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Sosial	Persen	73,21	74,1	4.941.796.671	75,2	5.063.315.121	76,4	5.144.328.163	77,60	5.144.328.163	78,80	5.221.493.085	80	5.221.493.085	Urusan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial																
Outcome: Meningkatnya partisipasi Pelaku Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial	Persen	50,40	52	1.076.605.000	53	1.149.340.000	54	1.167.729.440	55	1.167.729.440	56	1.185.245.382	57	1.185.245.382	Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial																
Outcome: Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar	Persen	94,40	94,8	340.793.150	95,2	368.656.900	95,6	374.555.410	96,0	374.555.410	96,4	380.173.742	96,8	380.173.742	Urusan Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial																
Outcome: Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergradiasi dari Kemiskinan	Persen	0,62	0,81	407.582.450	1,37	458.536.450	1,91	465.873.033	2,24	465.873.033	2,60	472.861.129	3,08	472.861.129	Urusan Sosial

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Penanganan Tindak Kekerasan														Urusan Sosial		
Outcome: Meningkatnya layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persen	100	100	6.115.000	100	23.400.000	100	23.774.400	100	23.774.400	100	24.131.016	100	24.131.016	
Program Penanganan Bencana														Urusan Sosial		
Outcome: Meningkatnya perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Persen	90	100	368.010.000	100	377.506.000	100	383.546.096	100	383.546.096	100	389.299.287	100	389.299.287	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan														Urusan Sosial		
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	Persen	100	100	31.656.000	100	31.915.000	100	32.425.640	100	32.425.640	100	32.912.025	100	32.912.025	
TENAGA KERJA																
Program Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota														Urusan Tenaga Kerja		
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Tenaga Kerja	Persentase ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Generasi Dinas Tenaga Kerja	Persen	53,48	60,01	3.910.792.259	62,01	4.070.102.910	64,01	4.135.224.557	66,01	4.135.224.557	68,01	4.197.252.925	70,01	4.197.252.925	
Program Perencanaan Tenaga Kerja																
Outcome: Pemanfaatan Dokumen RTK Makro dan Mikro	Persentase Rekomendasi Kebijakan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang diterapkan	Persen	85,7	-	-	-	-	86,7	100.000.000	87,7	100.000.000	88,7	110.000.000	89,7	110.000.000	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja																
Outcome: Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase tenaga Kerja yang tersertifikasi kompetensinya	Persen	9,08	9,13	387.071.000	9,18	487.071.000	9,23	494.864.136	9,28	494.864.136	9,33	502.287.098	9,38	502.287.098	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Penempatan Tenaga Kerja																
Outcome: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	56,8	57,8	56.027.500	58,8	56.027.500	59,8	56.923.940	60,8	56.923.940	62,8	57.777.799	64,8	57.777.799	
Program Hubungan Industrial																
Outcome: Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan yang baik	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	50	52	63.610.500	54	63.610.500	56	64.628.268	58	64.628.268	60	65.597.692	62	65.597.692	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi																
Outcome: Meningkatnya pengelolaan Transmigran	Persentase Transmigran yang ditempatkan	Persen	100	100	44.219.500	100	44.219.500	100	44.927.012	100	44.927.012	100	45.600.917	100	45.600.917	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Program Perlindungan Perempuan																
Outcome: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPD yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	160.710.000	100	48.000.000	100	48.768.000	100	48.768.000	100	49.499.520	100	49.499.520	
Program Perlindungan Khusus Anak																
Outcome: Meningkatnya Pencegahan dan penanganan Tindak Kekerasan, Eksplotasi, Penelantaran,	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	401.919.547	100	8.939.547	100	9.082.580	100	9.082.580	100	9.218.818	100	9.218.818	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	2. Indeks Perlindungan Khinusus Anak (IPKA)	Persen	84,53 (2023)	85	84,63		84,65		84,67		84,69		84,70			
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan														Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Outcome: Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	41,7	41,9	81.215.500	42	85.000.000	42,5	86.360.000	43	86.360.000	43,5	87.655.400	44	87.655.400	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	45,67	45,7		45,75		45,78		45,8		45,85	45,9			
Program Pemenuhan Hak Anak														Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Outcome: Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komperhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	65,37	65,8	11.498.250	66,01	37.298.250	66,35	37.895.022	66,70	37.895.022	67,00	3.846.344.733	67,00	3.846.344.733	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga														Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Outcome: Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	1	1	450.350.000	1,5	460.380.510	2	467.746.598	2	467.746.598	2	4.747.627.971.324	2	4.747.627.971.324	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak														Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/stau Penyusunan Keputusan	Persen	16,12	32,25	4.512.000	48,38	5.000.000	58,06	5.080.000	64,51	5.080.000	74,19	5.156.200	87,09	5.156.200	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Pengendalian Penduduk KBP3A	Persentase ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Pengendalian Penduduk KBP3A	Persen	59,42	70	12.234.510.794	72	7.220.510.326	75	7.336.038.491	78	7.336.038.491	80	7.446.079.069	80,50	7.446.079.069	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)																
Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	8,51	20	58.918.100	21,50	58.918.100	23	59.860.790	24,50	59.860.790	26	60.758.701	28	60.758.701	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)																
Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	Persen	83,90	84,00	159.021.900	84,20	159.021.900	84,40	161.566.250	84,60	161.566.250	84,70	163.989.744	84,80	163.989.744	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Pengendalian Penduduk																
Outcome: Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Persentase Rumah Data Kependudukan Partisipasi di Kampung KB	Persen	63,63	66,67	271.749.000	72,72	90.745.000	78,79	92.196.920	84,85	92.196.920	87,88	93.579.874	90,91	93.579.874	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PANGAN																
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persen	77,86	78	10.295.401.745	79	10.015.744.105	80	10.175.996.011	81	10.175.996.011	82	10.328.635.951	83	10.328.635.951	Urusan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat																
Outcome: Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	90,10	91	871.717.200	92,36	528.372.550	92,58	536.826.511	92,81	536.826.511	93,03	544.878.908	93,26	544.878.908	
Program Penanganan Kerawanan Pangan																
Outcome : Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Resistan Rawan Pangan	Persen	6,06	6,06	58.425.000	6,06	82.000.000	6,06	83.312.000	6,06	83.312.000	3,03	84.561.680	3,03	84.561.680	
Program Pengawasan Keamanan Pangan																
Outcome: Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	80	80	4.115.850	80	6.749.400	81	6.857.390	82	6.857.390	83	6.960.251	84	6.960.251	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya																
Outcome: Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1445,45	1445,45	104.234.500	1446,01	403.012.525	1458,15	409.460.725	1470,55	409.460.725	1483,34	415.602.636	1493,72	415.602.636	
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan																
Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Aturan	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Taat Aturan	Persen	5	0	-	5	15.000.000	5	20.000.000	10	20.000.000	10	24.996.060	15	24.996.060	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan																
Outcome: Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Kapita/ Tahun	18,54	19	90.530.000	19,25	78.952.000	19,62	75.455.252	19,99	75.455.252	20,37	71.891.000	20,76	71.891.000	
PERTANIAN																
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian																
Outcome: Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	2	2	314.381.250	2	488.783.500	2	496.604.036	2	496.604.036	2	504.053.097	2	504.053.097	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
Outcome: Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LPZB	Ha	19	20	730.181.100	22	189.241.350	24	192.269.212	26	192.269.212	28	195.153.250	30	195.153.250	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																
Outcome: Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PFMS)	Persen	33,33	35	171.157.536	45,40	205.748.700	60,60	209.040.679	75,70	209.040.679	87,80	212.176.289	100	212.176.289	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Masyarakat Veteriner	2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	16,67	25	50	62,50		75	87,50	100						
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian														Urusan Pertanian		
Outcome: Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	39	45	54	62	70	78	85							
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	78	80	7.215.000	86	10.000.000	89	10.160.000	93	10.160.000	97	10.312.400	98	10.312.400	
Program Penyuluhan Pertanian														Urusan Pertanian		
Outcome: Meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian	1. Persentase SDM Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	23	23	423.187.500	23	503.950.000	23	512.013.200	23	512.013.200	23	519.693.398	23	519.693.398	
	2. Persentase Kelompok Tani yang Difasilitasi Berbadan Hukum	Persen	6,88	7		9,38		10,63		11,88		13,13		14,38		
LINGKUNGAN HIDUP																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Urusan Lingkungan Hidup		
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup	Persentase ketercapaian nilai evaluasi reformasi birokrasi general Dinas Lingkungan Hidup	Persen	62,15	63	26.906.260.799	64	25.353.447.953	65,50	25.759.103.120	67	25.759.103.120	68,50	26.145.489.667	70,01	26.145.489.667	
Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup														Urusan Lingkungan Hidup		
Outcome: Meningkatnya Pengurangan Emisi GRK	Emisi Co2 Equivalen	Ton Co2eq	26.699,28	31.699,28	397.595.250	32.091,23	400.472.750	38.971,05	406.880.314	48.708,01	406.880.314	62.234,48	412.983.519	62.858,63	412.983.519	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat														Urusan Lingkungan Hidup		
Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan hidup	Persentase jumlah penghargaan untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	Persen	-	25	20.896.250	50	26.420.350	50	26.843.076	75	26.843.076	75	27.245.722	100	27.245.722	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup														Urusan Lingkungan Hidup		
Outcome : tertanganinya penanganan pengaduan lingkungan hidup tingkat kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup tingkat kota	Persen	100	100	76.038.600	100	76.038.385	100	77.254.999	100	77.254.999	100	78.413.824	100	78.413.824	
Program Pengelolaan Persampahan														Urusan Lingkungan Hidup		
Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persen	49,65	60	2.357.901.370	62	3.051.741.510	64	3.102.169.374	66	3.102.169.374	68	3.150.201.915	70	3.250.201.915	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)														Urusan Lingkungan Hidup		
Outcome : Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	100	100	155.500.000	100	7.000.000	100	7.112.000	100	7.112.000	100	7.218.680	100	7.218.680	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota														Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	3,23	16,67	54.461.100	33,33	144.455.000	50	146.766.280	66,67	146.766.280	83,33	1.489.677.742	100	1.489.677.742	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	14.603.000	100	44.623.000	100	45.336.968	100	45.336.968	100	46.017.023	100	46.017.023	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PERHUBUNGAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Perhubungan	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Perhubungan	Persen	47,94	60	15.665.241.872	61	15.894.171.405	62	16.148.478.147	63	16.148.478.147	64	16.390.705.320	65	16.390.705.320	Urusan Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
Outcome: Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas kelengkapan jalan	Presentase Ketersediaan Peningrangan Jalan Umum yang terpelihara dan memenuhi standar	Persen	40	40,5	2.590.899.904	41	2.447.347.600	41,5	2.486.505.162	42	2.486.505.162	42,5	2.523.802.739	43	2.523.802.739	Urusan Perhubungan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	46,95	72,5	5.797.920.254	73	5.784.330.443	73,5	5.876.879.730	74	5.876.879.730	74,5	5.965.032.926	75	5.965.032.926	Urusan Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																
Outcome: Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	93	95	330.562.000	96	330.472.000	97	335.759.552	98	335.759.552	99	340.795.945	100	340.795.945	Urusan Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik																
Outcome: Meningkatnya penyebaran informasi kebijakan/program pemerintah kepada masyarakat	Persentase informasi kebijakan/program pemerintah yang di disseminasikan kepada publik	Persen	90	90	239.799.500	92	871.747.000	94	885.694.952	96	885.694.952	98	898.980.376	100	898.980.376	Urusan Komunikasi dan Informatika
STATISTIK																
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral																
Outcome: Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Penggunaan Statistik Sektoral Untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Persen	99,81	100	30.229.000	100	51.080.000	100	51.897.280	100	51.897.280	100	52.675.739	100	52.675.739	Urusan Statistik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
PERSANDIAN																
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi																
Outcome: Meningkatnya Kesamaan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah	Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	Persen	65	77	68.333.850	84	125.041.450	87	127.042.113	94	127.042.113	97	128.947.745	100	128.947.745	Urusan Persandian
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persen	61,83	70	8.818.535.524	71	9.116.967.064	72	9.262.838.537	73	9.262.838.537	74	9.401.781.115	75	9.401.781.115	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	11,02	11,26	-	11,50	20.900.000	11,73	22.990.000	11,97	25.289.000	12,20	27.817.900	12,43	30.599.690	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)																
Outcome: Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Pertumbuhan Wirusaha	Persen	0,69	1,35	499.208.650	1,72	649.100.000	2,05	659.485.600	2,33	659.485.600	2,59	669.377.884	2,82	669.377.884	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Pengembangan UMKM															Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
Outcome: Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UKM Menjalin Kemitraan	Persen	0,10	0,11	350.000.000	0,12	350.000.000	0,13	355.600.000	0,14	355.600.000	0,15	360.934.000	0,16	360.934.000	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi															Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
Outcome: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	8,06	8,58	20.835.000	9,09	45.100.000	9,6	45.821.600	10,11	45.821.600	10,61	46.508.924	10,85	46.508.924	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi															Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
Outcome: Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkuualitas	Persen	14,78	15,92	256.743.000	17,02	6.663.900.000	18,09	6.770.522.400	19,13	6.770.522.400	20,15	6.872.080.236	21,14	6.872.080.236	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian															Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
Outcome: Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	14,52	14,85	44.200.000	15,18	100.000.000	15,50	101.600.000	15,82	101.600.000	16,12	103.124.000	16,42	103.124.000	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi															Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
Outcome: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	65,59	66,05	18.509.500	66,49	20.000.000	66,93	20.320.000	67,35	20.320.000	67,76	20.624.800	68,16	20.624.800	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
PERDAGANGAN																
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	60	80	338.746.300	100	348.401.250	100	353.975.670	100	353.975.670	100	359.285.305	100	359.285.305	Urusan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting																
Outcome: Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	8,04	8,24	40.273.000	8,44	45.000.000	8,64	45.720.000	8,84	45.720.000	9,04	45.675.000	9,24	45.675.000	
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen																
Outcome: Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Alat-Alat Ukur, Timbangan dan Perengkapannya (UFTF) Bertanda Terakreditasi yang Berlaku	Persen	72,95	73,14	92.392.500	73,33	150.000.000	73,52	152.400.000	73,71	152.400.000	73,90	154.686.000	74,10	154.686.000	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri																
Outcome: Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/difasilitasi/dilaksanakan	Persen	100	100	52.613.000	100	55.000.000	100	55.880.000	100	55.880.000	100	56.718.200	100	56.718.200	
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan																
Outcome: Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase lain Usaha Perdagangan yang difasilitasi	Persen	100	100	23.492.500	100	32.280.000	100	32.796.480	100	32.796.480	100	33.288.427	100	33.288.427	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Pengembangan Ekspor																
Outcome: Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang	US\$	27.654.556	27.654.556	85.414.500	27.654.556	140.000.000	27.654.556	142.240.000	27.654.556	142.240.000	27.654.556	144.373.600	27.654.556	144.373.600	
PERINDUSTRIAN																
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri																
Outcome: Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Industri	Persen	2,66	2,86	100.754.000	3,06	240.000.000	3,26	243.840.000	3,46	243.840.000	3,66	247.497.600	3,86	247.497.600	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase IKM yang di Fasilitas Legalitas Usahanya	Persen	100	100	35.801.000	100	-	100	93.500.000	100	102.850.000	100	113.135.000	100	124.448.500	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional																
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Persentase Pameran yang dilaksanakan dan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	Persen	100	100	89.013.500	100	750.000.000	100	762.000.000	100	762.000.000	100	773.430.000	100	773.430.000	
PENANAMAN MODAL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu	Persen	70,18	75	4.943.957.956	75,5	5.020.331.645	76	510.065.695.132	76,5	5.100.656.951	77	5.177.166.806	77,50	5.177.166.806	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
Program Pelayanan Penanaman Modal																Urusan Penanaman Modal
Outcome: Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	82,52	83	314.740.500	84	317.323.750	85	322.400.930	86	322.400.930	87	327.236.944	90	327.236.944	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal																Urusan Penanaman Modal
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	67.089.000	100	75.000.000	100	76.200.000	100	76.200.000	100	77.343.000	100	77.343.000	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal																Urusan Penanaman Modal
Outcome: Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	-0,0034	1	75.000.000	1,25	99.999.550	1,50	101.599.543	1,75	101.599.543	2	103.123.536	2,25	103.123.536	
Program Promosi Penanaman Modal																Urusan Penanaman Modal
Outcome: Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	Persen	65	65,2	43.196.500	65,4	45.000.000	65,6	45.720.000	65,8	45.720.000	66	46.405.800	66,2	46.405.800	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal																Urusan Penanaman Modal
Outcome: Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Didapati Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	100	100	44.335.900	100	50.006.900	100	50.807.010	100	50.807.010	100	51.569.116	100	51.569.116	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Persen	41,7	60,01	6.921.251.034	62,01	6.570.458.257	64,01	6.675.585.589	66,01	6.675.585.589	68,01	6.775.719.373	70,01	6.775.719.373	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan																
Outcome: Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirusaha Pemuda	Persen	25	25	1.192.759.950	26	1.379.759.650	27	1.401.835.804	28	1.401.835.804	29	1.422.863.341	30	1.422.863.341	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan																
Outcome: Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	0,0033	0,0067	2.540.273.350	0,01	4.533.501.533	0,0133	3.106.037.558	0,02	3.106.037.558	0,0267	4.652.628.121	0,0333	4.652.628.121	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan																
Outcome : Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	Persen	0	0	-	30	609.290.000	35	609.290.000	40	609.290.000	45	609.290.000	50	609.290.000	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
PARIWISATA																
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																
Outcome: Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	8,12	8,12	219.264.475	8,32	219.999.250	8,52	223.519.238	8,72	223.519.238	8,92	226.872.026	9,12	226.872.026	Urusan Pariwisata

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Pemasaran Pariwisata														Urusan Pariwisata		
Outcome: Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	25	25	77.680.500	38	100.014.000	50	101.614.224	63	101.614.224	75	103.138.437	88	103.138.437	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																
Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Ekonomi Kreatif	Persen	67,72	68	798.296.500	69	1.556.700.500	70	1.581.607.708	71	1.581.607.708	72	1.605.331.824	73	1.605.331.824	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	14	16	50.963.000	19	30.000.000	22	30.480.000	25	30.480.000	28	30.937.200	31	30.937.200	
PERPUSTAKAAN																
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Urusan Perpustakaan		
Outcome: Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persen	66,16	67	5.213.851.524	68	5.358.828.224	69	5.444.569.476	70	5.444.569.476	71	5.526.238.018	72	5.526.238.018	
Program Pembinaan Perpustakaan														Urusan Perpustakaan		
Outcome : Meningkatnya layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional	Persentase Peningkatan Jumlah layanan Perpustakaan Umum Daerah	Persen	1,59	1,75	1.473.510.520	5	599.999.900	5	609.599.898	6	609.599.898	6	618.743.897	7	618.743.897	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno															Urusan Perpustakaan	
Outcome: Terwujudnya Pengembangan dan Pemamfaatan Bahan Perpustakaan dan Koleksi Nusantara	Persentase Koleksi Budaya Etnis dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	0	25	41.298.000	25	20.000.000	25	20.320.000	25	20.320.000	25	20.624.800	25	20.624.800	
Program Pengelolaan Arsip															Urusan Perpustakaan	
Outcome : Meningkatnya efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dokumen	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Niai	64,79	64,90	115.405.280	65	131.070.700	65,20	133.167.831	65,40	133.167.831	65,50	135.165.349	65,60	135.165.349	
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip															Urusan Perpustakaan	
Outcome : Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	15	18	11.138.500	20	11.131.000	20,25	11.309.096	20,40	11.309.096	20,55	11.478.732	20,75	11.478.732	
SEKRETARIAT DAERAH																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota															Urusan Sekretariat Daerah	
Outcome: Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Nilai rata-rata RB Peningkat Daerah yang melakukan pengukuran IRB-PD	Nilai	63,95	66	354.058.850	68	252.340.050	70	334.420.334	72	334.420.334	74	415.188.479	76	415.188.479	
	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	933,54	93,83		94,12		94,4		94,69		94,98		95,27		
Outcome: Meningkatnya kualitas implementasi RB General Sekretariat Daerah	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Sekretariat Daerah	Persen	77,46	81	118.429.600	81,8	97.437.400	82,6	103.523.961	83,4	103.523.961	84,2	109.053.296	85	109.053.296	

BIDANG URBUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik Setda	Nilai	3	3,05	40.647.925.497	3,33	37.845.232.326	3,54	38.368.185.637	3,88	38.368.185.637	4,01	38.863.980.106	4,15	38.863.980.106	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat															Urusan Sekretariat Daerah	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Masayarakat Kota yang Agamis	Indeks Zakat Nasional Kota Sukabumi Persentase pembinaan lembaga keagamaan	Nilai Persen	0,53 9,4	0,55 10	9.473.901.808	0,57 11	8.741.479.471	0,59 12	8.881.343.142	0,61 13	8.881.343.142	0,63 14	9.014.563.290	0,65 15	9.014.563.290	
Meningkatnya kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	87,32	88,5	685.000.000	89	451.920.000	89,5	459.150.720	91	459.150.720	92	466.037.980	93	466.037.980	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD	Nilai	3,27	3,32	1.828.028.200	3,37	1.282.413.850	3,42	1.302.932.472	3,47	1.302.932.472	3,52	1.322.476.459	3,57	1.322.476.459	
Program Perekonomian dan Pembangunan															Urusan Sekretariat Daerah	
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Persen	66,49	70	342.853.100	71	245.923.300	72	249.858.073	73	249.858.073	74	253.605.944	75	253.605.944	
Meningkatnya BUMD yang sehat	Persentase BUMD yang sehat	Persen	66,70	66,7	238.125.000	66,7	261.875.500	66,7	266.065.508	100	266.065.508	100	270.056.491	100	270.056.491	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
SEKRETARIAT DPRD																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat DPRD	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Sekretariat DPRD	Persen	65.74	66,01	36.395.610.233	67,01	39.205.775.072	68,01	39.833.067.473	69,01	39.833.067.473	70,01	40.430.563.485	71,01	40.430.563.485	Urusan Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																
Outcome: Meningkatkan kualitas peraturan daerah yang ditetapkan	Persentase Prolegda yang Ditetapkan dengan Peraturan Daerah	persen	100	100	13.249.858.450	100	20.799.720.780	100	21.132.516.312	100	21.132.516.312	100	21.449.504.057	100	21.449.504.057	Urusan Sekretariat DPRD
PERENCANAAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	55,63	65	8.910.390.253	66	9.677.743.100	67	9.832.586.990	68,01	9.832.586.990	69,01	9.980.075.794	70,01	9.980.075.794	Urusan Perencanaan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah																
Outcome: Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselaraan RPJMD dengan RKPd	Persen	100	100	2.484.038.000	100	2.622.501.000	100	2.664.461.016	100	2.664.461.016	100	2.704.427.931	100	2.704.427.931	Urusan Perencanaan
	Persentase Keselaraan RPJMD dengan Renstra	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah														Urusan Perencanaan		
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	1.301.459.650	100	924.000.000	100	954.000.000	100	954.000.000	100	954.000.000	100	954.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	1.493.822.050	100	1.100.858.130	100	1.086.455.860	100	1.086.455.860	100	1.134.887.698	100	1.134.887.698	
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perkeonomian dan sumber daya alam	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perkeonomian dan SDA	Persen	100	100	1.258.731.800	100	825.000.000	100	855.000.000	100	855.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	
PENELITIAN																
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah														Urusan Penelitian		
Outcome: Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	Persen	100	100	1.041.291.300	100	1.051.041.280	100	1.067.857.940	100	1.067.857.940	100	1.083.875.810	100	1.083.875.810	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
KEUANGAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Persentase ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Poin	77,67	78,00	45.106.980.643	78,70	42.594.634.580	79,40	43.276.148.733	80,10	43.276.148.733	80,80	43.925.290.964	81,50	43.925.290.964	Urusan Keuangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah																
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Nilai Laporan Keuangan	Nilai	100	100	968.337.150	100	730.306.892	100	742.330.471	100	742.330.471	100	753.465.425	100	753.465.425	Urusan Keuangan
Outcome: - Menurunnya Jumlah Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persen	41	41	1.339.967.100	39	1.010.569.224	37	1.027.076.998	35	1.027.076.998	33	1.042.483.153	31	1.042.483.153	
Outcome:Meningkatnya Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar:	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	100	100	12.327.723.818	100	5.778.425.152	100	15.906.468.766	100	16.912.618.529	100	17.464.450.270	100	20.871.875.045	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah																
Outcome: Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase Administrasi BMD	Persen	65	75	1.157.457.350	84,88	1.157.457.350	94,76	1.175.976.668	100	1.175.976.668	100	1.193.616.318	100	1.193.616.318	Urusan Keuangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah															Urusan Keuangan	
Outcome: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	32,82	35	4.142.981.450	35,77	4.142.979.567	36,54	4.209.267.240	36,82	4.209.267.240	37,59	4.272.406.248	38,36	4.272.406.248	
KEPEGAWAIAN DAERAH																
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															Urusan Kepegawaian Daerah	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	42,32	72,05	6.458.840.263	73,30	7.720.919.746	74,40	7.844.454.462	75,50	7.844.454.462	76,12	7.962.121.279	77,25	7.962.121.279	
Program Kepegawaian Daerah															Urusan Kepegawaian Daerah	
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	75	77	749.234.100	78	652.000.000	78,05	662.432.000	78,25	662.432.000	78,75	672.368.480	80,25	672.368.480	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia															Urusan Pendidikan dan Pelatihan	
Outcome: Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persen	18	18,50	767.884.236	18,55	787.884.236	18,65	800.490.384	18,68	800.490.384	19,25	812.497.740	19,75	812.497.740	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
INSPEKTORAT DAERAH																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																
Outcome:Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Inspektorat	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Inspektorat	Persen	53,75	67	9.984.870.854	67,50	10.369.158.100	68	10.535.064.630	68,50	10.535.064.630	69	10.693.090.599	70	10.693.090.599	Urusan Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan																
Outcome:Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Pengawasan yang Diindaklanjuti	Persen	83	83,17	1.172.159.000	83,63	1.419.214.000	84,10	1.441.921.424	84,57	1.441.921.424	85	1.463.550.245	85,50	1.463.550.245	Urusan Inspektorat Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi																
Outcome:Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	3	490.804.000	3	1.055.610.000	3	1.072.499.760	3	1.072.499.760	3	1.088.587.256	3	1.088.587.256	Urusan Inspektorat Daerah
	2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3		3		3		3		3		3		
	3 Manajemen Risiko Indeks	level	3	3		3		3		3		3		3		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																
Outcome:Meningkatnya Kualitas Pemerintahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	63,31	65	4.234.406.541	66	4.344.410.166	67	4.413.920.729	68,50	4.413.920.729	69,50	4.480.129.540	70,50	4.480.129.540	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	100	36	747.996.150	36	887.580.160	52	901.781.443	68	901.781.443	84	915.308.164	100	915.308.164	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial														Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Outcome: Meningkatnya kondusivitas wilayah kota sukabumi	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	93	2.874.280.500	96	2.757.737.200	96,67	2.801.860.995	97,24	2.801.860.995	98,18	2.843.888.910	100	2.843.888.910	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik														Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Outcome: Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik bagi Kader Politik, pelajar dan Masyarakat	Persen	100	44	871.401.706	44	891.726.706	59	905.994.333	69	905.994.333	82	919.584.248	100	919.584.248	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat														Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Outcome: Meningkatnya Keterbacaan Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	Persen	100	67	627.406.500	67	829.364.500	71	842.634.332	78	842.634.332	84	855.273.847	100	855.273.847	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya														Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Outcome: Meningkatnya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya	Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang Diantisipasi	Persen	100	73	393.497.500	73	399.185.000	79	405.571.960	85	405.571.960	88	411.655.539	100	411.655.539	
KECAMATAN WARUDOYONG																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Warudoyong	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Warudoyong	Persen	54.38	68,50	8.628.735.516	68,75	8.517.788.363	69	8.654.072.977	69,25	8.654.072.977	69,50	8.783.884.071	70,01	8.783.884.071	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Warudoyong	Nilai	97.96	98,15	1.652.307.682	98,25	113.123.682	98,30	114.933.661	98,45	114.933.661	98,50	116.657.666	98,60	116.657.666	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	3.524.783.400	100	4.373.063.400	100	4.443.032.414	100	4.443.032.414	100	4.509.677.901	100	4.509.677.901	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum															Urusan Kecamatan	
Outcome: Terselenggaranya fasilitas/Koordinasi /Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Fasilitas/Koordinasi /Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	70.350.000	100	59.760.000	100	60.716.160	100	60.716.160	100	61.626.902	100	61.626.902	
Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum															Urusan Kecamatan	
Outcome: Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	43.558.200	100	43.558.200	100	44.255.131	100	44.255.131	100	44.918.958	100	44.918.958	
KECAMATAN BAROS																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															Urusan Kecamatan	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Baros	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Baros	Persen	61,38	68,00	6.636.311.663	68,80	6.480.647.833	69,60	6.584.338.198	70,40	6.584.338.198	71,20	6.683.103.271	72	6.683.103.271	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															Urusan Kecamatan	
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Baros	Nilai	84,80	84,85	1.182.049.860	84,90	216.943.010	84,95	220.414.098	85	220.414.098	85,05	223.720.310	85,10	223.720.310	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan															Urusan Kecamatan	
Outcome: Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	2.417.548.700	100	3.065.708.250	100	3.114.759.582	100	3.114.759.582	100	3.161.480.976	100	3.161.480.976	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum														Urusan Kecamatan		
Outcome: Terselenggaranya fasilitas/Koordinasi /pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Fasilitas/Koordinasi /Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	50	100	41.904.000	100	47.118.000	100	47.871.888	100	47.871.888	100	48.589.966	100	48.589.966	
Program Koordinasi Ketransmran dan Keterriban Umum														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	33.379.400	100	32.158.000	100	32.672.528	100	32.672.528	100	33.162.616	100	33.162.616	
KECAMATAN GUNUNG PUYUH																
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Gunung Puyuh	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Generat Kecamatan Gunung Puyuh	Persen	48,63	75	7.691.952.338	76	7.723.501.537	77	7.847.077.561	78	7.847.077.561	79	7.964.783.725	80	7.964.783.725	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunungpuyuh	Nilai	84,8	84,83	1.458.112.608	84,87	85.331.600	84,90	86.696.906	84,94	86.696.906	84,97	87.997.359	85,50	87.997.359	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Partisipasi LKK dalam Forum Musrenbang	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	2.918.906.500	100	3.601.846.350	100	3.659.475.892	100	3.659.475.892	100	3.714.368.030	100	3.714.368.030	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Koordinasi Ketenraman dan Keteriban Umum														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	41.688.000	100	41.684.600	100	42.351.554	100	42.351.554	100	42.986.827	100	42.986.827	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum														Urusan Kecamatan		
Outcome: Terselenggaranya Fasilitasi / Koordinasi / Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi / Koordinasi / Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	57.957.000	100	19.900.000	100	20.218.400	100	20.218.400	100	20.521.676	100	20.521.676	
KECAMATAN CIBEUREUM																
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Cibeureum	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Cibeureum	Persen	60,85	67	7.300.253.772	67,80	7.104.945.322	68,50	7.218.624.447	70	7.218.624.447	71,20	7.326.903.814	72	7.326.903.814	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeureum	Nilai	88,77	88,85	1.238.609.168	89	176.538.168	89,20	179.362.779	89,50	179.362.779	89,77	182.053.220	90	182.053.220	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Partisipasi LKK dalam Forum Musrenbang	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	2.504.904.750	100	3.162.804.750	100	3.213.409.626	100	3.213.409.626	100	3.261.610.770	100	3.261.610.770	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum															Urusan Kecamatan	
Outcome: Terselenggaranya fasilitas/Koordinasi /pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Fasilitas/Koordinasi /Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	46.154.500	100	46.154.500	100	46.892.972	100	46.892.972	100	47.596.367	100	47.596.367	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum															Urusan Kecamatan	
Outcome: Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	39.847.000	100	39.847.000	100	40.484.552	100	40.484.552	100	41.091.820	100	41.091.820	
KECAMATAN CITAMIANG																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota															Urusan Kecamatan	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Citamiang	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Citamiang	Persen	100	78,00	8.520.382.101	78,50	8.455.573.151	79	8.590.862.321	79,50	8.590.862.321	80	8.719.725.256	80,50	8.719.725.256	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															Urusan Kecamatan	
Outcome: Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Citamiang	Nilai	97,96	97,97	1.235.396.222	97,98	140.512.650	98	142.760.852	98,25	142.760.852	98,50	144.902.265	98,75	144.902.265	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan															Urusan Kecamatan	
Outcome: Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	3.134.444.000	100	3.953.569.000	100	4.016.826.104	100	4.016.826.104	100	4.077.078.496	100	4.077.078.496	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum														Urusan Kecamatan		
Outcome: Terselenggaranya fasilitasi/koordinasi/pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	44.560.000	100	36.977.000	100	37.568.632	100	37.568.632	100	38.132.161	100	38.132.161	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	47.203.500	100	47.203.400	100	47.958.654	100	47.958.654	100	48.678.034	100	48.678.034	
KECAMATAN CIKOLE																
Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Cikole	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Generasi Kecamatan Cikole	Persen	44,59	50,00	9.784.581.411	50,25	9.435.924.691	50,50	9.586.899.486	51	9.586.899.486	51,25	9.730.702.978	51,50	9.730.702.978	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikole	Nilai	94,07	95,00	53.850.726	96,00	85.019.650	96,50	86.379.964	97,00	86.379.964	97,50	87.675.664	80,00	87.675.664	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	4.403.240.150	100	5.411.526.290	100	5.498.110.711	100	5.498.110.711	100	5.580.582.371	100	5.580.582.371	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	64.074.950	100	64.074.800	100	65.099.997	100	65.099.997	100	66.076.497	100	66.076.497	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum														Urusan Kecamatan		
Outcome: Terselenggaranya fasilitasi/koordinasi /pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase pelaksanaan fasilitasi/koordinasi /Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	41.534.500	100	50.033.800	100	50.834.341	100	50.834.341	100	51.596.856	100	51.596.856	
KECAMATAN LEMBURSITU																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Lembursitu	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Lembursitu	Persen	43,62	68	8.526.362.545	68,80	8.556.262.940	69,60	8.693.163.147	70,40	8.693.163.147	71,20	8.823.560.595	72	8.823.560.595	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lembursitu	Nilai	85,95	87,20	1.552.946.962	88,10	1.74.004.844	88,90	176.788.922	89,20	176.788.922	89,70	179.440.755	90	179.440.755	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan														Urusan Kecamatan		
Outcome: Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	3.058.824.050	100	3.763.923.750	100	3.824.146.530	100	3.824.146.530	100	3.881.508.728	100	3.881.508.728	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		TARGET TAHUN		PD		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		KINERJA	PAGU
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum															Urusan Kecamatan	
Outcome: Terselenggaranya fasilitasi/koordinasi/pembinaan/penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	84.912.500	100	84.902.250	100	86.260.686	100	86.260.686	100	87.554.596	100	87.554.596	Urusan Kecamatan
Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum															Urusan Kecamatan	
Outcome: Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	68.506.600	100	70.429.600	100	71.556.474	100	71.556.474	100	72.629.821	100	72.629.821	Urusan Kecamatan

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Sukabumi tersebut, maka target IKU Kota Sukabumi seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.5
IKU Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,69	78,19	78,31	79,82	80,58	81,36	82,17
2	Indeks Pendidikan	Poin	72,43	73,63	74,41	75,19	75,98	76,76	77,54
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,11	75,31	75,52	75,73	75,94	76,15	76,36
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,20	6,36 -	5,99 -	5,19 -	4,23 -	3,11 -	2,72 -
				7,02	6,54	5,87	5,06	4,19	3,72
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,34	7,54 -	7,25 -	7,24 -	7,20 -	7,18 -	7,13 -
				8,21	7,92	7,91	7,87	7,85	7,80
6	Indeks Rasa Aman	Poin	75,40	77,43	77,98	78,53	79,08	79,63	80,18
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78,16	79,00	79,27	79,55	79,82	80,09	80,36
8	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	75	76	77	78	79	80	81
9	Indeks Warisan Budaya	Poin	38,85	38,85	38,95	39,05	39,15	39,25	39,35
10	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	56,5	60,1	61,5	62,8	64,1	65,3	66,4
11	PDRB Per Kapita	Juta. Rp	44,76	45,29 – 47,48	50,38 -	54,02 - 55,77	57,92 - 60,72	62,09 - 68,16	66,78 - 72,99
12	Indeks Kota Kreatif	Poin	87,86	87,86	88,53	89,21	89,88	90,56	91,23
13	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	3,26	3,29	3,36	3,44	3,53	3,61	3,70
14	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,90	81	81,25	81,50	81,75	82	82,25
15	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Persen	0	0	25	30	35	40	50
16	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	2,47	10	12	14	16	18	20

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Indeks Kota Layak Huni	Poin	65,74	66,75	67,74	68,75	69,74	70,75	71,74
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	87,37	88,37	88,4	88,43	88,48	88,53	88,58
19	Indeks Risiko Bencana	Skor	77,56	75,56	73,56	71,55	70,53	69,51	68,50
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	BB	BB	A	A	A	A
21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,79	3,83	3,87	3,90	3,94	3,97	4,00
22	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,18	4,25	4,30	4,35	4,40	4,45	4,50
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,20	87,50	88,00	88,30	88,50	89,00	90,00
24	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
25	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	Poin	76,36	78	80	81	82	83	84
26	Indeks Sistem Merit	Poin	0,78	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD Kota Sukabumi Tahun 2025-2030 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.6
IKD Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,90	81	81,25	81,50	81,75	82	82,25	Ketahanan Pangan
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	4,56 (2023)	3,74	3,60	3,44	3,25	3,04	2,73	Ketahanan Pangan
3	Kapasitas Air Baku	m ³ /detik	-	0,56	0,68	0,81	0,93	1,06	1,19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan	Persen	19,52 (2023)	24,30	28,09	31,87	35,66	39,44	43,23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61,28	61,28	61,79	61,78	62,04	62,29	62,54	Lingkungan Hidup
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	n/a	6,69	12,07	17,44	22,82	28,19	33,57	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	0,49 (2023)	0,63	1,02	1,16	5,75	19,85	20,95	Lingkungan Hidup
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	81,29 (2023)	89,01	93,14	97,47	100	100	100	Lingkungan Hidup
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	N/A	0,14	0,45	0,78	1,21	1,76	2,16	Lingkungan Hidup
10	Penurunan Emisi Co2 Kumulaif	Ton CO2eq	26.699,28	26.699,28	32.091,53	38.971,05	48.708,01	63.234,48	80.856,65	Lingkungan Hidup
11	Indeks Risiko Bencana	Skor	77,56	75,56	73,56	71,55	70,53	69,51	68,50	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
12	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	56,5	60,1	61,5	62,8	64,1	65,3	66,4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	52,91 (2023)	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00	Tenaga Kerja
13	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun	10,38	10,73	10,93	11,13	11,33	11,53	11,73	Pendidikan
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,62	13,65	13,70	13,75	13,81	13,86	13,91	Pendidikan
15	Skor Literasi/Numerasi									Pendidikan
	a. Skor Literasi SD	Poin	62,84	65,72	69,17	70,36	71,55	72,74	73,93	Pendidikan
	b. Skor Literasi SMP	Poin	75,75	79,52	80,83	81,52	82,21	82,89	83,58	Pendidikan
	c. Skor Numerasi SD	Poin	47,88	47,41	49,96	51,87	53,78	55,70	57,61	Pendidikan
	d. Skor Numerasi SMP	Poin	65,65	65,02	69,02	70,06	71,10	72,13	73,17	Pendidikan
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	87,81	89,91	91,80	93,81	95,80	97,81	99,80	Perpustakaan
17	Indeks Pendidikan	Poin	72,43	73,63	74,41	75,19	75,98	76,76	77,54	Pendidikan
18	Indeks Rasa Aman	Poin	75,40	77,43	77,98	78,53	79,08	79,63	80,18	Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
19	Indeks Warisan Budaya	Poin	38,85	38,85	38,95	39,05	39,15	39,25	39,35	Pendidikan
20	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78,16	79,00	79,27	79,55	79,82	80,09	80,36	Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah
21	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	58,70	60,46	61,76	63,06	64,36	64,55	66,25	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,359	0,334	0,309	0,284	0,259	0,234	0,209	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,93	4,02	4,21	4,45	4,63	4,85	4,95	Perencanaan
2	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	Persen	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	Perencanaan
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	4,87	4,82	4,77	4,71	4,66	4,6	4,54	Perencanaan, Perindustrian
4	Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,26	3,29	3,36	3,44	3,53	3,61	3,70	Perencanaan, UMKM, Perdagangan
5	Indeks Kota Kreatif	Persen	87,86	87,86	88,53	89,21	89,88	90,56	91,23	Pariwisata
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	-	5,34	5,59	5,86	6,15	6,45	6,76	UMKM, Perindustrian
7	PDRB Per Kapita (ADHK)	Juta. Rp.	28,17	29,61	30,21	31,45	32,35	33,50	34,85	UMKM Perdagangan, Perindustrian, Perencanaan
8	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rp.	44,76	45,29 - 45,65	50,38 - 51,35	54,02 - 55,77	57,92 - 60,72	62,09 - 66,24	66,78 - 72,99	UMKM Perdagangan, Perindustrian, Perencanaan
9	Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	4,80	4,82	4,84	4,86	4,88	4,91	4,95	Komunikasi dan Informatika
10	Indeks Konektivitas	Skor	N/A	3	3,05	3,1	3,15	3,20	3,25	Perencanaan, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Persen	0	0	25	30	35	40	50	Perencanaan, Penanaman Modal Perdagangan
12	Tingkat Inflasi	Persen	2,59	3,04	3,01	2,98	2,95	2,92	2,89	Perencanaan, Ketahanan Pangan, Perdagangan, Sekretariat Daerah
13	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	N/A	85	85,5	86	86,5	87	87,5	Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	15,97	16,12	16,17	16,22	16,27	16,32	16,36	Penanaman Modal
15	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	N/A	44,12	46,17	47,41	49,04	50,76	52,56	Perencanaan
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	87,37	88,37	88,4	88,43	88,48	88,53	88,58	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perencanaan
17	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	36,30	35,88	36,77	37,66	38,55	39,41	43,19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Rasio Akses Masyarakat Terhadap Energi	Persen)	99,99	100	100	100	100	100	100	Perencanaan
19	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Perencanaan
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	N/A	6,70	6,78	6,84	6,91	6,99	7,08	Keuangan
21	Indeks Zakat	Poin	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	Sekretariat Daerah
22	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	41,43	67,87	68,40	68,64	68,93	69,22	69,51	Perencanaan
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	BB	BB	A	A	A	A	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General)	Poin	76,36	78	80	81	82	83	84	Sekretariat Daerah
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,79	3,83	3,87	3,90	3,94	3,97	4,00	Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,18	4,25	4,30	4,35	4,40	4,45	4,50	Sekretariat Daerah
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,20	87,50	88,00	88,30	88,50	89,00	90,00	Sekretariat Daerah
6	Nilai SAKIP	Poin	76,36	78	80	81	82	83	84	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

Tabel 4.7
IKD Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PENDIDIKAN										
1	Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (APS)	Persen	99,31	99,45	99,59	99,73	99,87	100	100	
2	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	Persen	78,97	82,01	84,98	87,95	90,92	93,47	96,02	
3	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	Persen	50,49	56,98	63,47	69,96	76,45	77,21	77,97	
4	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	30	30	32	34	36	38	40	
5	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	0,29	0,25	0,2	0,175	0,15	0,125	0,1	
6	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persen	75	75	80	80	80	85	90	
KESEHATAN										
1	Prevalensi Stunting	Persen	19,7	18,07	16,05	15,41	14,32	13,36	12,53	
2	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	68	90	90	90	90	90	90	
3	Persentase pengendalian dan pencegahan penyakit	Persen	67,6	68,53	68,93	69,55	71,50	72,80	74,07	
4	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	41,5	42,00	45,00	47,00	49,00	51,00	53,00	
5	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah	persen	30	35,00	40,00	45,00	55,00	65,00	75,00	
6	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	persen	66	67	68	70	72	75	77	
7	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	persen	77,04	80,00	80,00	80,00	81,50	83,50	85,00	
8	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketenagaan Minimal	Persen	30	35	40	50	60	70	80	
9	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, U MOT dan PIRT yang Memenuhi Standar	Persen	56	57	60	62	65	70	75	

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase kelompok Masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	Persen	46	100	46	100	100	100	100	
7	Persentase jumlah penghargaan untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	Persen	-	25	50	50	75	75	100	
8	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
9	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persen	49,65	60	62	64	66	68	70	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	72,53	75	79	83	87	91	95	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	6,16	7,50	11,25	15,00	18,75	22,50	26,25	
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-4 Tahun	Persen	99,84	99,85	99,86	99,87	99,88	99,89	99,90	
4	Persentase Kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	Persen	72,41	72,91	74,41	75,91	77,41	78,91	80,41	
5	Persentase Kepemilikan akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai	Persen	51,13	52,63	54,13	55,63	57,13	58,63	60,13	
6	Persentase kepemilikan akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	3,23	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100	
8	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	8,51	20	21,5	23	24,5	26	28	
2	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	Persen	83,90	84,00	84,20	84,40	84,60	84,70	84,80	
3	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	Persen	63,63	66,67	72,72	78,79	84,85	87,88	90,91	
PERHUBUNGAN										
1	Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum yang terpelihara dan memenuhi standar	Persen	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	93	95	96	97	98	99	100	
2	Persentase informasi kebijakan/ program pemerintah yang di diseminasikan kepada publik	Persen	90	90	92	94	96	98	100	
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1	Persentase Koperasi yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam	Persen	11,02	11,26	11,50	11,73	11,97	12,20	12,43	
2	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Persen	0,69	1,35	1,72	2,05	2,33	2,59	2,82	
3	Persentase UMKM Menjalin Kemitraan	Persen	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	
4	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	8,06	8,58	9,09	9,60	10,11	10,61	10,85	
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	14,78	15,92	17,02	18,09	19,13	20,15	21,14	
6	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	14,52	14,85	15,18	15,50	15,82	16,12	16,42	
7	Persentase Koperasi Aktif	Persen	65,59	66,05	66,49	66,93	67,35	67,76	68,16	
PENANAMAN MODAL										
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	82,52	83	84	85	86	87	90	
2	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	-0,0034	1	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	
4	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	Persen	65	65,2	65,4	65,6	65,8	66	66,2	
5	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	25	25	26	27	28	29	30	
2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	0,003	0,0076	0,01	0,0133	0,02	0,0267	0,033	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	Persen	0	0	30	35	40	45	50	

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
STATISTIK										
1	Persentase Penggunaan Statistik Sektorial Untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan)	Persen	99,81	100	100	100	100	100	100	
PERSANDIAN										
1	Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	Persen	65	77	84	87	94	97	100	
KEBUDAYAAN										
1	Persentase jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	75	76	78	80	82	84	86	
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	55	55	65	70	75	80	85	
3	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Persen	55	60	65	70	75	80	85	
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persen	60	60	65	65	70	70	75	
5	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	30	60	65	70	75	80	85	
PERPUSTAKAAN										
1	Persentase Koleksi Budaya Etnis dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	-	25	25	25	25	25	25	
2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan di Perpustakaan Umum Daerah	Persen	1,59	1,75	5	5	6	6	7	
KEARSIPAN										
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Niai	64,79	64,90	65	65,20	65,40	65,50	65,60	
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	15	18	20	20,25	20,40	20,55	20,75	
KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1445,45	1434,24	1446,01	1458,15	1470,55	1483,34	1493,72	
2	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Taat Aturan	Persen	5	0	5	5	10	10	15	

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
KEUANGAN										
1	Nilai Laporan Keuangan	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Administrasi BMD	Persen	65	75	84,88	94,76	100	100	100	
3	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	32,82	35	35,77	36,54	36,82	37,59	38,36	
KEPEGAWAIAN										
1	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Poin	75	77	78	78,05	78,25	78,75	80,25	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persen	18	18,50	18,55	18,65	18,68	19,25	19,75	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
INSPEKTORAT										
1	Persentase Rekomendasi Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Persen	83	83	83	84	84	85	85	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	
4	Manajemen Risiko Indeks	Level	3	3	3	3	3	3	3	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Persen	100	36	36	52	68	84	100	
2	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	93	96	96,67	97,24	98,18	100	
3	Persentase Pendidikan Politik bagi Kader Politik, pelajar dan Masyarakat	Persen	100	44	44	59	69	82	100	
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	Persen	100	67	67	71	78	84	100	
5	Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang Diantisipasi	Persen	100	73	73	79	85	88	100	

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen	100	65	60	55	50	45	40	
KECAMATAN CITAMIANG										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Citamiang	Nilai	97,96	97,97	97,98	98	98,25	98,50	98,75	
2	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN CIKOLE										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikole	Nilai	94,07	95,00	96,00	96,5	97,00	97,50	80,0	
2	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN LEMBURSITU										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lembursitu	Nilai	85,95	87,2	88,1	88,9	89,2	89,7	90	
2	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2025

BAB V PENUTUP

RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 ini disusun dengan berbagai pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, *bottom up - top down*, holistik - tematik, integratif dan spasial. RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 ini disusun untuk mengoperasionalkan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi dengan berpedoman pada RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042. RPJMD Kota Sukabumi ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, RPJMD Kota Sukabumi juga akan dijabarkan secara lebih rinci dalam RKPD setiap tahunnya.

Pada pelaksanaannya seluruh target kinerja dalam dokumen RPJMD perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara rutin dan berkala untuk melihat ketercapaiannya. Pengendalian dan evaluasi ini penting untuk pemutakhiran target yang akan dituangkan ke dalam dokumen RKPD setiap tahunnya. Pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJMD ini diharapkan melibatkan multi-pihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat di Kota Sukabumi. Adapun pembiayaan pelaksanaan program RPJMD Kota Sukabumi ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan, antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Sukabumi. Selain itu, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Guna mengoptimalkan pemanfaatan barang produksi dalam negeri maka menjadi penting dalam pelaksanaan pembangunan agar memanfaatkan produk dari Kota Sukabumi khususnya. Hal ini untuk mewujudkan peningkatan dampak berganda dan nilai tambah dari hasil produk ekonomi Kota Sukabumi.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah diperlukan juga penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi serta memberikan landasan kepastian hukum dalam mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko. Penyelenggaraan manajemen risiko ditujukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan, peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern serta berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Untuk mencapai hal itu perlu adanya analisis risiko untuk mengetahui potensi risiko. Seperti adanya risiko terkait kebijakan, risiko kepatuhan atau risiko legal. Karena itu, diperlukan upaya preventif sehingga ketika risiko terjadi, tidak berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan.

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI